



TUGAS AKHIR – TI 141501

**PERANCANGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA UNTUK
PELAKU USAHA DI BAWAH BINAAN PEMERINTAH KOTA
SURABAYA DENGAN METODE *INTEGRATED
PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM* (IPMS)**

DELINA RISA KINASIH
NRP 2512 100 042

Dosen Pembimbing
Naning Aranti Wessiani, S.T., M.M
NIP. 197802072003122001

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2016



FINAL PROJECT– TI 141501

**PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM DESIGN FOR
MICRO ENTERPRISE UNDER THE SUSTAINABLE
COACHING PROGRAM OF SURABAYA GOVERNMENT
WITH INTEGRATED PERFORMANCE MEASUREMENT
SYSTEM (IPMS)**

DELINA RISA KINASIH

NRP 2512 100 042

Supervisor

Naning Aranti Wessiani, S.T., M.M

NIP. 197802072003122001

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI

Fakultas Teknologi Industri

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2016

LEMBAR PENGESAHAN
PERANCANGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA UNTUK
PELAKU USAHA DIBAWAH BINAAN PEMERINTAH KOTA
SURABAYA DENGAN METODE *INTEGRATED*
PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM (IPMS)

TUGAS AKHIR

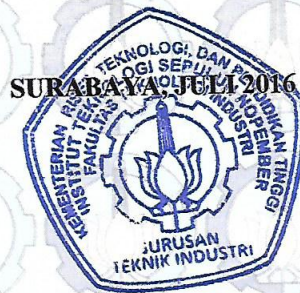
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
pada Program Studi S-1 Jurusan Teknik Industri
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya

Penulis :

DELINA RISA KINASHI
NRP 2512 100 0042

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing Tugas Akhir :


NANING ARANTI WESSIANI, S.T., M.M.
NIP. 197802072003122001



**PERANCANGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA UNTUK
PELAKU USAHA DIBAWAH BINAAN PEMERINTAH KOTA
SURABAYA DENGAN METODE *INTEGRATED
PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM* (IPMS)**

Nama : Delina Risa Kinasih
NRP : 2512100042
Pembimbing : Naning Aranti Wessiani, ST, MM

ABSTRAK

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) periode 2016 – 2020, Pemerintah Kota Surabaya telah merancang pembinaan pelaku usaha berkelanjutan dengan sasaran, pelaku usaha kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pelaku usaha kategori pemuda, dan pelaku usaha dari sektor pertanian. Instansi yang terlibat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS), Dinas Pemuda (DISPORA), Dinas Pertanian (DISPERTAN), Dinas Koperasi & UMKM (DINKOP&UMKM), serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERDAGIN). Untuk mengoptimalkan implementasi sistem pembinaan berkelanjutan yang berjenjang, dilakukan perancangan sistem pengukuran kinerja pelaku usaha dengan *framework Intergrated Performance Measurement System* (IPMS). Tahapan dalam perancangan pengukuran kinerja dengan *framework* IPMS, yaitu identifikasi level bisnis, identifikasi *stakeholder* dan *stakeholder requirement*, *external monitor*, *set objective*, penetapan *performance indicators*, penyusunan *performance indicator properties*, *scoring system*, dan *traffic light system*. *Output* yang didapatkan adalah indikator kinerja yang mampu mendukung terciptanya pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing.

Kata Kunci - *Framework* IPMS, Pelaku Usaha, Pembinaan Berkelanjutan, Pengukuran Kinerja.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM DESIGN FOR MICRO ENTERPRISE UNDER THE SUSTAINABLE COACHING PROGRAM OF SURABAYA GOVERNMENT WITH INTEGRATED PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM (IPMS)

Name : Delina Risa Kinasih

Student ID : 2512100042

Supervisor : Naning Aranti Wessiani, ST, MM

ABSTRACT

Trough the Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) in the period from 2016 to 2020, Surabaya Government have been designing Sustainable Business Coaching Program, which is intended for businesses category with social welfare problems, youth business enterprise, and entrepreneurs from the agricultural sector. This program involved some Bureau, such BAPEMAS, DISPORA, DISPERTAN, DINKOP &UMKM, and DISPERDAGIN. To optimize the implementation of Sustainable Business Coaching Program, needed to design system performance measurement businesses with the framework of Integrated Performance Measurement System (IPMS). There are ten stages, such as the identification of business level, stakeholder identification and stakeholder requirement, external monitor, set objectives, the establishment of performance indicators and performance indicator properties, scoring system, and traffic light system. Output obtained are performance indicators that could support the creation of an independent and competitive business.

Keywords - IPMS Framework, Business Communities, Sustainable Business Coaching Program, Performance Measurement.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.5.1 Batasan	6
1.5.2 Asumsi	7
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Instansi Terkait dan Program – Program Binaan Pemerintah Kota Surabaya	9
2.2 Sektor- Sektor yang Menjadi Intervensi Pemerintah Kota Surabaya.....	12
2.2.1 Kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).....	13
2.2.2 Pemuda.....	16
2.2.3 Usaha di Sektor Pertanian	17
2.2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	19
2.3 Pengukuran Kinerja.....	20
2.4 <i>Integrated Performance Measurement System (IPMS)</i>	22

2.5 <i>Key Performance Indicator (KPI)</i>	24
2.6 <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i>	26
2.7 Penelitian Terdahulu.....	27
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Tahap Identifikasi Masalah pada Pengelolaan UMKM oleh Instansi terkait	31
3.2 Perumusan Masalah dan Penetapan Tujuan Penelitian	31
3.3 Studi Literatur dan Studi Lapangan.....	32
3.4 Pengumpulan Data.....	32
3.4.1 Identifikasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pemerintah Kota Surabaya	32
3.4.2 Identifikasi Strategi dan Program Kerja Instansi Terkait	33
3.5 Pengolahan Data	33
3.5.1 Identifikasi Level Program Pembinaan oleh Instansi Terkait	33
3.5.2 Identifikasi <i>Stakeholder</i> dan <i>Stakeholder Requirement</i>	33
3.5.3 <i>Set Objective</i>	34
3.5.4 Penyusunan <i>Key Performance Indicator (KPI)</i>	34
3.5.5 <i>External Monitor</i>	34
3.5.6 Validasi <i>Key Performance Indicator (KPI)</i>	34
3.5.7 Penyusunan <i>Key Performance Indicator (KPI) Properties</i>	34
3.5.8 Pembobotan <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> menggunakan AHP.....	35
3.5.9 Penentuan Target Pencapaian <i>Key Performance Indicator (KPI)</i>	35
3.6 Analisis dan Interpretasi Data.....	35
3.7 Kesimpulan dan Saran	35
3.8 <i>Flowchart</i> Penelitian	35
BAB 4 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....	39
4.1 Pengumpulan Data.....	39
4.1.1 Gambaran Pembinaan Usaha Berkelanjutan	39

4.1.2 Alur Pembinaan Usaha Berkelanjutan	53
4.2 Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja	55
4.2.1 Identifikasi Level Bisnis	55
4.2.2 Identifikasi <i>Stakeholder</i> dan <i>Stakeholder Requirement</i>	58
4.2.3 <i>Set Objective</i>	64
4.2.4 Penetapan <i>Performance Indicators</i>	69
4.2.5 <i>External Monitor</i>	90
4.2.6 Validasi <i>Performance Indicators</i>	95
4.2.7 Pembobotan dengan AHP	99
4.2.8 <i>Performance Indicator Properties</i>	108
4.2.9 <i>Scoring System</i>	109
4.2.10 <i>Traffic Light System</i>	109
4.3 Pembuatan <i>Spreadsheet Modelling</i>	111
4.4 Pembuatan Petunjuk Teknis	136
BAB 5 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA	141
5.1 Analisis <i>Framework</i> Pengukuran Kinerja Pelaku Usaha dengan IPMS	141
5.1.1 Identifikasi Level Bisnis	142
5.1.2 Identifikasi <i>Stakeholder</i> dan <i>Stakeholder Requirement</i>	143
5.1.3 <i>External Monitor</i>	143
5.1.4 <i>Set Objective</i>	143
5.1.5 Penetapan <i>Performance Indicators</i>	144
5.1.6 Penyusunan <i>Performance Indicator Properties</i>	145
5.2 Analisis <i>Spreadsheet Modelling</i>	146
5.2.1 Analisis Konsep dan Interface <i>Spreadsheet Modelling</i>	146
5.2.2 Uji Coba <i>Spreadsheet Modelling</i>	151
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	159

6.1 Kesimpulan.....	159
6.2 Saran	160
DAFTAR PUSTAKA.....	161
DAFTAR LAMPIRAN	163
BIODATA PENULIS.....	213

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Level Organisasi (Bititci, Carrie, & Liam McDevitt, 1997)	22
Gambar 2. 2 Model Referensi Integrated Performance Measurement System	23
Gambar 3. 1 Flowchart Penelitian.....	36
Gambar 3. 2 <i>Flowchart</i> Penelitian (Lanjutan)	37
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat	41
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga.....	43
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Dinas Pertanian	44
Gambar 4. 4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM	46
Gambar 4. 5 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	48
Gambar 4. 6 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota	50
Gambar 4. 7 Alur Pembinaan Usaha Berkelanjutan	53
Gambar 4. 8 Level Sistem Pembinaan Usaha Berkelanjutan.....	55
Gambar 4. 9 Framework Pengukuran Kinerja Pembinaan Berkelanjutan dengan Metode IPMS	57
Gambar 4. 10 <i>Framework</i> Input - Proses - Output Indikator PMKS	72
Gambar 4. 11 <i>Framework Input - Proses - Output</i> Pelaku Usaha Kategori Pemuda	75
Gambar 4. 12 <i>Framework</i> Input - Proses - Output Indikator Usaha Pertanian.....	78
Gambar 4. 13 <i>Framework</i> Input - Proses - Output Pelaku Usaha di Bawah Pembinaan Dinkop & UMKM	83
Gambar 4. 14 <i>Framework</i> Input - Proses - Output Pelaku Usaha dibawah Binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	88
Gambar 4. 15 Hirarki Pengukuran Kinerja pada Level Bisnis Proses	96
Gambar 4. 16 Hirarki Pengukuran Kinerja pada Level Bisnis Unit	97
Gambar 4. 17 Hirarki Pengukuran Kinerja pada Level Bisnis.....	98
Gambar 4. 18 Hasil Pembobotan Antar Kriteria pada BAPEMAS	99
Gambar 4. 19 <i>Flowchart SpreadSheet Modelling</i>	112
Gambar 4. 20 Alur Penggunaan Sistem pengukuran Kinerja Pelaku Usaha pada Pembinaan Berkelanjutan.....	137

Gambar 5. 1 Tampilan <i>Home Spreadsheet Modelling</i>	146
Gambar 5. 2 Tampilan Menu <i>Overview</i>	147
Gambar 5. 3 Tampilan <i>Framework IPMS</i> pada <i>Spreadsheet Modelling</i>	147
Gambar 5. 4 Tampilan Menu Instansi Terlibat pada <i>Spreadsheet Modelling</i>	147
Gambar 5. 5 Tampilan Pilihan Instansi Sebelum Login.....	148
Gambar 5. 6 Contoh Tampilan Menu Login Instansi.....	148
Gambar 5. 7 Tampilan Jika <i>Username</i> dan <i>Password</i> Tidak Sesuai	149
Gambar 5. 8 Tampilan Menu Instansi Setelah Login.....	149
Gambar 5. 9 Tampilan Menu <i>Update</i> Binaan Instansi	150
Gambar 5. 10 Rekapitulasi Database Binaan dan Hasil Pengukuran	150
Gambar 5. 11 Tampilan Menu Input Penilaian	150
Gambar 5. 12 <i>Update</i> Binaan BAPEMAS	152
Gambar 5. 13 Input Penilaian Lucky Catering.....	152
Gambar 5. 14 <i>Update</i> Binaan Diluar Pembinaan Berkelanjutan (Dari Pelaku Usaha Mandiri).....	153
Gambar 5. 15 <i>Update</i> Binaan Pelaku usaha dari Pembinaan Berkelanjutan.....	153
Gambar 5. 16 Input penilaian Binaan DINKOP & UMKM, CV. BINA BANGSA	154
Gambar 5. 17 Hasil Input Penilaian CV. BINA BANGSA.....	155
Gambar 5. 18 <i>Update</i> Binaan diluar Pembinaan Berkelanjutan (dari Pelaku Usaha Mandiri).....	155
Gambar 5. 19 Input Penilaian Pelaku Usaha Binaan DISPERDAGIN	156
Gambar 5. 20 Database Pelaku Usaha Binaan DISPERDAGIN.....	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 <i>ASEAN Competitiveness Index</i>	2
Tabel 1. 2 Perkembangan UMKM dari 2010 - 2012	3
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 4. 1 <i>Stakeholder</i> Sistem Pembinaan Usaha Berkelanjutan Level Bisnis dan Bisnis Unit.....	58
Tabel 4.2 <i>Stakeholder</i> Sistem Pembinaan Usaha Berkelanjutan Level Bisnis Proses	59
Tabel 4.3 <i>Stakeholder</i> Sistem Pembinaan Usaha Berkelanjutan Level Bisnis Proses (Lanjutan)	60
Tabel 4. 4 <i>Stakeholder</i> Sistem Pembinaan Usaha Berkelanjutan Level Aktivitas	60
Tabel 4. 5 <i>Stakeholder Requirement</i> Badan Pemberdayaan Masyarakat.....	62
Tabel 4. 6 <i>Stakeholder Requirement</i> Dinas Pemuda dan Olahraga	62
Tabel 4. 7 <i>Stakeholder Requirement</i> Dinas Pertanian.....	63
Tabel 4. 8 <i>Stakeholder Requirement</i> Dinas Koperasi dan UMKM.....	63
Tabel 4. 9 <i>Stakeholder Requirement</i> Dinas Perdagangan dan Perindustrian	64
Tabel 4. 10 <i>Stakeholder Requirement</i> Badan Pemberdayaan Masyarakat.....	65
Tabel 4. 11 <i>Stakeholder Requirement</i> Dinas Pemuda dan Olahraga	65
Tabel 4. 12 <i>Stakeholder Requirement</i> Dinas Pertanian.....	66
Tabel 4. 13 <i>Stakeholder Requirement</i> Dinas Koperasi dan UMKM.....	67
Tabel 4. 14 <i>Stakeholder Requirement</i> Dinas Perdagangan & Perindustrian.....	68
Tabel 4. 15 Identifikasi Indikator Kinerja Pelaku Usaha Kategori PMKS	71
Tabel 4. 16 Indikator Pelaku Usaha Kategori PMKS	73
Tabel 4. 17 Identifikasi Indikator Kinerja Pelaku Usaha Kategori Pemuda	74
Tabel 4. 18 Indikator Pelaku Usaha Kategori Pemuda	76
Tabel 4. 19 Identifikasi Indikator Kinerja Pelaku Usaha Sektor Pertanian	77
Tabel 4. 20 Indikator Pelaku Usaha Kategori Pertanian	79
Tabel 4. 21 Identifikasi Indikator Kinerja Pelaku Usaha.....	80
Tabel 4. 22 Indikator Pelaku Usaha di Bawah Pembinaan Dinkop & UMKM	83
Tabel 4. 23 Identifikasi Indikator Kinerja Pelaku Usaha.....	85

Tabel 4. 24 Indikator Pelaku Usaha dibawah Binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	88
Tabel 4. 25 Hasil Perbandingan dengan Variabel Kinerja BAPPENAS	90
Tabel 4. 26 Pembobotan Kriteria dan Indikator BAPEMAS	100
Tabel 4. 27 Pembobotan Kriteria dan Indikator DISPORA	102
Tabel 4. 28 Pembobotan Kriteria dan Indikator DISPERTAN	103
Tabel 4. 29 Pembobotan Kriteria dan Indikator Dinas Koperasi dan UMKM...	104
Tabel 4. 30 Pembobotan Kriteria dan Indikator Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	106
Tabel 4. 31 Ketentuan Status Pelaku Usaha	110

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Pembobotan dengan *Expert Choice*

Lampiran 2. *Performance Indicators Properties*

Lampiran 3. *Form* Petunjuk Teknis

Lampiran 4. Uji Coba Rancangan *Spreadsheet Modelling*

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang dilakukannya penelitian tugas akhir, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan

1.1 Latar Belakang

Pada 2015, persatuan negara – negara di Asia Tenggara (ASEAN) telah memasuki era ekonomi yang baru dengan adanya produksi dan pasar tunggal yang disebut *ASEAN Economic Community* (AEC). AEC merupakan integrasi ekonomi di negara-negara ASEAN dalam rangka mencapai ekonomi ASEAN yang stabil, sejahtera dan sangat kompetitif. Dengan adanya AEC, akan terjadi kebebasan aliran barang, jasa, investasi modal, dan tenaga kerja terampil antar negara – negara di Asia Tenggara (ASEAN, *ASEAN Economic Community Blueprint*, 2012).

AEC mampu menjadi peluang atau bahkan menjadi ancaman bagi Negara Indonesia. Di antara negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia memainkan peran penting di ASEAN karena beberapa alasan. Pertama, Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN dengan jumlah penduduk sebanyak 255.461.686 juta jiwa ((BPS), 2015) sehingga mampu menjadi target pasar yang sangat potensial bagi para pelaku bisnis. Kedua, peningkatan relatif dari PDB Indonesia memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Ketiga, karena stabilitas ekonomi, jumlah kesepakatan yang lebih baik dari tenaga kerja dalam hal kualitas dan gaji, Indonesia menawarkan kesempatan yang baik untuk investasi. Dengan demikian, Indonesia perlu menyiapkan upaya terbaik untuk mempersiapkan AEC agar dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan pada saat yang sama mendapatkan manfaat paling banyak dari integrasi AEC. (Mahendrawathi ER, 2014)

Namun, dalam salah satu indikator persaingan global yaitu *Global Competitiveness Index* pada Tabel 1.1 terlihat bahwa Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. Salah satu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dengan pengembangan usaha mikro yang ada di Indonesia. Usaha mikro memiliki peranan penting dalam penciptaan lapangan kerja dan penciptaan unit usaha. Selain itu, usaha mikro juga berperan besar dalam penciptaan nilai pasar dari produksi barang dan jasa dalam negeri melalui penciptaan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menguasai 99,99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia, menyerap 97,16 % jumlah tenaga kerja yang ada, serta menguasai 59,08 % PDB Indonesia pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan eksistensi UMKM dalam menunjang perekonomian Negara.

Tabel 1. 1 ASEAN *Competitiveness Index*

Negara	<i>Global Competitiveness Index</i>
Singapura	2
Malaysia	24
Brunei Darussalam	26
Thailand	37
Indonesia	38
Philipina	59
Vietnam	70
Lao PDR	81
Kamboja	88
Myanmar	139

Sumber : *World Economic Forum, The Global Competitiveness Index, 2013 – 2014*

Tabel 1. 2 Perkembangan UMKM dari 2010 - 2012

Indikator	DATA			PERKEMBANGAN		PROPORSI		
	2010	2011	2012	2010 s/d 2011	2011 s/d 2012	2010	2011	2012
Jumlah Unit Usaha	53,82 Juta	55,21 Juta	56,53 Juta	2,57 %	2,41%	99,99 %	99,99 %	99,99 %
Tenaga Kerja	99,40 Juta	101,72 Juta	107,65 Juta	2,33 %	5,83%	97,22%	97,24 %	97,16 %
PDH (Harga Konstan Th. 2000)	1.282,57 Triliun	1.369,33 Triliun	1.504,93 Juta	6,76 %	9,90%	57,83%	57,60 %	57,49 %
PDB (Harga Berlaku)	3.466,39 Triliun	4.303,57 Triliun	4.869,57 Triliun	24,15 %	13,15%	57,12 %	57,94 %	59, 08%
Ekspor Non Migas	157,89	187,44 Triliun	208,07 Triliun	6.56%	11,00 %	15,81%	16,44 %	14,06 %
Investasi (Harga Konstan 200)	247,12 Triliun	260,93 Triliun	300,18 Triliun	5,58 %	15,04 %	48,34 %	49,11 %	51,45%
Produktivitas								
- Per Unit Usaha	23,83 Juta	24,80 Juta	26,62 Juta	4,09 %	7,32 %			
- Per Tenaga Kerja	12,90 Juta	13,46 Juta	13,98 Juta	4,33 %	3,84%			

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kementrian Koperasi dan UKM, 2015

Namun demikian perkembangan UMKM umumnya masih mengalami berbagai masalah dan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Hafsah (2012) menyatakan bahwa permasalahan-permasalahan dan tantangan yang dialami oleh UMKM dapat dikategorikan menjadi dua yaitu berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Permasalahan dari faktor-faktor internal antara lain kurangnya pemodal, sumber daya manusia yang terbatas, lemahnya jaringan usaha, dan kemampuan penetrasi pasar. Sedangkan dari faktor-faktor eksternal antara lain iklim usaha yang kurang kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, implikasi otonomi daerah, implikasi perdagangan bebas, *life cycle* produk singkat, dan terbatasnya akses pasar. Untuk itu, dibutuhkan partisipasi pihak terkait atau pemangku kepentingan dalam pengembangan UMKM.

Pemerintah merupakan salah satu pemangku kepentingan yang turut berpartisipasi dalam pengembangan UMKM dan berperan sebagai fasilitator pengembangan usaha. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM melalui penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan. Pemerintah Kota Surabaya melalui

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (DINKOP&UMKM), dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERDAGIN) Kota Surabaya merupakan pihak - pihak yang berwenang dalam pembinaan UMKM. Pemerintah Kota Surabaya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) periode 2016 – 2020 terus melakukan rencana perbaikan terhadap pengelolaan pelaku usaha dan UMKM yang ada di Kota Surabaya melalui kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan usaha mikro. Pada periode sebelumnya, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya pengembangan pelaku usaha. Diharapkan, pelaku usaha yang telah mendapat pembinaan dari instansi terkait mampu memiliki daya saing yang unggul sehingga dapat berkembang secara mandiri.

Daya saing merupakan kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dipengaruhi (1) faktor sumber daya ; (2) kondisi permintaan; (3) keberadaan industri pendukung; dan (4) strategi, struktur dan persaingan dunia usaha (Porter, 1990). Disamping itu, Pemerintah juga berinisiatif untuk menyiapkan sektor – sektor lain dapat menjadi inisiator pelaku usaha. Sektor – sektor yang menjadi sasaran pemerintah antara lain, individu atau kelompok masyarakat kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang akan dibina oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS), Pemuda yang akan dibina oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA), dan individu atau kelompok usaha di bidang pertanian yang akan dibina oleh Dinas Pertanian (DISPERTAN).

Meskipun upaya pembinaan telah banyak dilakukan oleh pemerintah, tidak banyak program yang menunjukkan manfaat dan perkembangan yang signifikan. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan secara parsial, tidak terintegrasi. Tidak adanya sasaran dan pemetaan yang jelas untuk masing-masing instansi, sehingga sangat memungkinkan adanya sektor - sektor pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan lebih dari satu instansi, serta memungkinkan adanya sektor – sektor yang tidak mendapat pembinaan sama sekali. Selain itu, pembinaan yang dilakukan saat ini belum memiliki mekanisme pembinaan yang terstruktur untuk menentukan sejauh mana pembinaan dilakukan.

Juga tidak adanya laporan yang jelas mengenai hasil pembinaan yang telah dilakukan. Sehingga instansi – instansi terkait tidak dapat mengetahui dan menilai status dari sektor – sektor pelaku usaha yang sedang dibina. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota, telah dibuat adanya rancangan alur pembinaan pelaku usaha secara berkelanjutan oleh instansi terkait secara terintegrasi. Untuk dapat merealisasikan hal tersebut, perlu adanya landasan data berupa indikator penilaian performansi sektor - sektor pelaku usaha yang sedang dibina. Oleh karena itu, perlu dirancang Sistem Pengukuran Kinerja yang dapat memberikan indikator kinerja dari sektor – sektor binaan. Indikator tersebut akan menjadi input untuk melakukan pemetaan sektor-sektor pelaku usaha binaan terhadap Instansi terkait, serta menjadi alat untuk menilai kinerja sektor - sektor pelaku usaha di bawah binaan Pemerintah Kota Surabaya.

Pengukuran kinerja merupakan proses di mana organisasi, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS), Dinas Pemuda (DISPORA), Dinas Pertanian (DISPERTAN), Dinas Koperasi dan UMKM (DINKOP&UMKM), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERDAGIN) Kota Surabaya, menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program dan investasi yang dilakukan. Pengukuran kinerja merupakan sistem terstruktur dan proses pengumpulan, pengawasan, dan penilaian informasi mengenai aktivitas organisasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi (Wu, 2009). Salah satu manfaat dari implementasi pengukuran kinerja pada sebuah organisasi adalah adanya kesempatan menilai kapasitas organisasi untuk melakukan pekerjaannya sehingga bisa dilakukan improvisasi dalam pelaksanaan, proses, aktivitas, strategi dan sistem organisasi (Lichiello. P and Turnock B.J, 2002).

Dengan adanya latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pengukuran kinerja untuk pelaku usaha yang berada dibawah binaan Pemerintah Kota Surabaya dengan metode *Integrated Performance Measurement System* (IPMS). Sehingga didapatkan indikator untuk melakukan pemetaan dan penilaian sektor – sektor pelaku usaha binaan Pemerintah Kota Surabaya.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan diselesaikan pada penelitian ini yaitu bagaimana merancang sistem pengukuran kinerja untuk pelaku usaha yang berada dibawah binaan Pemerintah Kota Surabaya dengan metode *Integrated Performance Measurement System* (IPMS). Dalam hal ini instansi yang terkait adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS), Dinas Pemuda (DISPORA), Dinas Pertanian (DISPERTAN), Dinas Koperasi dan UMKM (DINKOP&UMKM), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERDAGIN).

1.3 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merancang sistem pengukuran kinerja untuk pelaku usaha yang berada dibawah binaan Pemerintah Kota Surabaya.
2. Merancang *Spreadsheet modelling* pengukuran kinerja untuk pelaku usaha yang berada dibawah binaan Pemerintah Kota Surabaya.

1.4 Manfaat

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah

1. Membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pemetaan sasaran binaan Instansi terkait.
2. Terbentuknya sistem pengukuran kinerja untuk pelaku usaha yang berada dibawah binaan Pemerintah Kota Surabaya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari batasan dan asumsi.

1.5.1 Batasan

Batasan dalam penelitian ini adalah

1. Hasil penelitian ini diimplementasikan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS), Dinas Pemuda (DISPORA), Dinas Pertanian (DISPERTAN), Dinas Koperasi dan UMKM (DINKOP&UMKM), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERDAGIN).

2. Penelitian ini hanya difokuskan pada pelaku usaha yang menjadi intervensi Instansi terkait dibawah binaan Pemerintah Kota Surabaya.
3. *Framework* pengukuran kinerja yang dirancang tidak memperhatikan pelaku usaha mandiri yang juga akan dilakukan pengukuran kinerjanya.

1.5.2 Asumsi

Asumsi yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah tidak adanya perubahan kebijakan terkait Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS), Dinas Pemuda (DISPORA), Dinas Pertanian (DISPERTAN), Dinas Koperasi dan UMKM (DINKOP&UMKM), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERDAGIN)

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian tugas akhir merupakan rincian laporan tugas akhir yang berisi tentang penjelasan mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian tugas akhir. Berikut merupakan penjelasan dari tahapan-tahapan penelitian tugas akhir :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan berisi tentang latar belakang penelitian tugas akhir, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan dari laporan penelitian tugas akhir.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori penelitian yang berasal dari berbagai studi literatur yang membantu peneliti untuk menentukan metode yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan berisi tentang tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian tugas akhir yang berbentuk *flowchart* dan penjelasan dari masing-masing tahap.

BAB 4 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisi pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan untuk bahan analisa dan intepretasi data. Dari pengumpulan dan pengolahan data dapat mengetahui hasil yang diinginkan dari penelitian ini.

BAB 5 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Pada tahap ini akan berisi penjelasan tentang analisis dan intepretasi dari pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada tahap ini akan berisi tentang kesimpulan dari penelitian tugas akhir. Kesimpulan berisi tentang rekomendasi bagi instansi terkait, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai teori dan studi literatur yang menjadi landasan penulis untuk memperkuat pemahaman dan menentukan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya studi literatur, diharapkan penulis memiliki pedoman yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan dapat mencapai tujuan penelitian.

2.1 Instansi Terkait dan Program – Program Binaan Pemerintah Kota Surabaya

Berikut adalah Instansi terkait dan program – program binaan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Surabaya:

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bappemas & KB)

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang :

- Pendidikan;
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- Ketenagakerjaan;
- Pemberdayaan Masyarakat;
- Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Bappemas & KB dibagi menjadi Bidang Ketahanan Ekonomi, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Program – program terkait pembinaan sektor pelaku usaha antara lain:

- a. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

- b. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan sasaran PMKS diluar usia produktif
- c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dengan sasaran PMKS usia produktif untuk mandiri.

2. Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora)

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga.

Fungsi yang harus dijalankan oleh Dispora adalah :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga;
- Pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya, Dispora dibagi menjadi beberapa bidang yaitu Bidang Kepemudaan, Bidang Olahraga Prestasi, dan Bidang Olahraga Rekreasi. Program yang berkaitan dengan pembinaan sektor – sektor pelaku usaha dalam rangka menyiapkan inisiator pelaku usaha adalah Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan. Dengan sasaran untuk meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Dinas Pertanian (Dispertan)

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian. Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian;
- Pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, Dispertan dibagi menjadi Bidang Perikanan dan Kelautan, Bidang Peternakan, Bidang Pertanian dan Kehutanan. Program yang berkaitan dengan pembinaan sektor pelaku usaha antara lain:

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
- b. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembinaan dan pelatihan pengolahan hasil perikanan serta bantuan sarana produksi dan budidaya
- c. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Pertanian/Perkebunan
- d. Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/perkebunan, perikanan dan peternakan
- e. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak
- f. Program pengembangan perikanan budidaya

4. Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop dan UMKM)

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Bidang :

- Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Pemberdayaan Masyarakat.
- Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinkop dan UMKM dibagi menjadi Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; Bidang Usaha Koperasi; serta Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Program – program terkait pembinaan sektor pelaku usaha antara lain :

- a. Program perluasan jangkauan pemasaran UMK

- b. Program perkuatan permodalan UMK
- c. Program pengaplikasian inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha UMK
- d. Program standarisasi mutu produk UMK
- e. Program pendampingan usaha UMK
- f. Program penyusunan instrumen dasar kelembagaan Koperasi
- g. Program evaluasi kinerja koperasi
- h. Program Sertifikasi kompetensi usaha koperasi
- i. Program pembentukan dan pengembangan unit usaha non simpan pinjam
- j. Program Peningkatan Kualitas Koperasi

Program – program tersebut dilakukan dengan sasaran untuk meningkatkan produktivitas koperasi dan UMK sektor barang dan jasa.

5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan perindustrian. Dibagi menjadi Bidang Perdagangan, Bidang Industri, serta Bidang Promosi dan Pendaftaran Perusahaan. Program – program yang dilakukan terkait pembinaan sektor pelaku usaha adalah

- a. Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan
- b. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- c. Program legalisasi usaha kreatif
- d. Program perkuatan permodalan usaha kreatif.

Program – program tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pemantapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif.

2.2 Sektor- Sektor yang Menjadi Intervensi Pemerintah Kota Surabaya

Adapun sektor – sektor pelaku usaha yang menjadi sasaran binaan Pemerintah Kota Surabaya antara lain :

2.2.1 Kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar (Kementrian Sosial RI, 2013). Berikut adalah jenis – jenis PMKS menurut Kementrian Sosial Republik Indonesia :

- Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
- Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
- Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Panduan Pendataan PMKS PSKS Dilengkapi dengan Kode Wilayah 8
- Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
- Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

- Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
- Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
- Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
- Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
- Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
- Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai

tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

- Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
- Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, Panduan Pendataan PMKS PSKS Dilengkapi dengan Kode Wilayah 9 sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
- Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
- Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
- Korban *trafficking* adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
- Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun

mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

- Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
- Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
- Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Dalam penelitian ini, pelaku usaha kategori PMKS yang menjadi sasaran binaan adalah kategori masyarakat miskin.

2.2.2 Pemuda

Menurut Undang – Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting

pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Karakteristik pemuda menurut Undang – Undang Nomor 40 tahun 2009, antara lain :

- Memiliki semangat kejuangan dan kesukarelaa
- Tanggungjawab
- Ksatria
- Memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. Meningkatkan ketahanan budaya nasional
- g. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. Pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
- c. Advokasi;
- d. Akses untuk pengembangan diri; dan
- e. Kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

2.2.3 Usaha di Sektor Pertanian

Menurut (ASEAN, ASEAN Economic Community Blueprint, 2012), Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang. Pertanian adalah semua kegiatan yang

meliputi penyediaan komoditi tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Semua kegiatan penyediaan tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan itu dilakukan secara sederhana, yang masih menggunakan peralatan tradisional (Badan Pusat Statistik, 2013)

Sektor pertanian terbagi menjadi beberapa sub sektor, yaitu:

a. Subsektor Tanaman Pangan

Subsektor tanaman pangan adalah usaha pertanian yang berupa bahan pangan. Tanaman pangan dibedakan menjadi jenis padi-padian dan jenis palawija (ketela pohon, ketela rambat, umbi-umbian, kacang tanah dll). Berdasarkan Sensus Pertanian tahun 2013 diketahui subsektor Tanaman Pangan adalah subsektor yang mendominasi usaha pertanian di Indonesia. Namun, Subsektor Tanaman Pangan ternyata merupakan subsektor yang memiliki jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum paling sedikit dibandingkan dengan subsektor yang lainnya.

b. Subsektor Holtikultura

Subsektor holtikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika usaha pertanian.

c. Subsektor Perkebunan

Subsektor perkebunan adalah usaha pertanian yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan perdagangan besar. Tanaman perkebunan dapat dibedakan menjadi tanaman perkebunan musiman (tebu, tembakau, dll) dan tanaman perkebunan tahunan (kopi, karet, coklat, dll).

d. Subsektor Peternakan

Subsektor peternakan meliputi kegiatan beternak dan pengusahaan hasil ternak. Subsektor ini meliputi produksi ternak – ternak besar & kecil, telur, susu segar, wool, hasil pemotongan hewan, dll.

e. Subsektor Perikanan

Subsektor Perikanan yang terdiri dari semua hasil kegiatan perikanan laut, perairan umum, kolam, tambak, sawah, keramba, pengolahan sederhana produk perikanan (pengeringan & pengasinan).

f. Subsektor Kehutanan

Subsektor kehutanan meliputi seluruh kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

2.2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.3 Pengukuran Kinerja

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Veithzal, 2005). Kinerja adalah prestasi dari suatu kegiatan diukur terhadap standar akurasi, kelengkapan, biaya, dan kecepatan yang ada (Bierbusse, P. and Siesfeld, T, 1997)

Konsep pengukuran kinerja merupakan proses mengukur efisiensi dan efektivitas dari tindakan (Neely, Gregory, & Platts, 1995). Sistem pengukuran kinerja merupakan sebuah sistem yang memungkinkan suatu perusahaan untuk merencanakan, mengukur, serta mengontrol kinerja dan membantu memastikan bahwa penjualan dan pemasaran inisiatif, praktik operasi, informasi, sumber daya teknologi, keputusan bisnis, dan kegiatan masyarakat secara selaras dengan bisnis perusahaan. Pengukuran kinerja dilakukan untuk memastikan apakah pengambilan keputusan dilakukan secara tepat dan objektif. Melalui pengukuran kinerja, manajemen dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerjanya selanjutnya.

Dari berbagai pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen pokok pada pengukuran kinerja adalah:

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran dan Strategi Organisasi

Tujuan adalah pernyataan umum tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan, sasaran, dan strategi tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi organisasi. Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi tersebut selanjutnya dapat ditentukan indikator dan ukuran kinerja secara tepat.

2. Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian

tujuan, sasaran dan strategi. Indikator kinerja dapat berbentuk *critical success factors* dan *key performance indicator*. *Critical success factors* adalah menggambarkan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel kunci finansial dan non finansial pada kondisi waktu tertentu. *Critical success factors* harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Sedangkan *Key Performance Indicator* merupakan ukuran kinerja kunci yang bersifat finansial maupun non finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis.

3. Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran-sasaran Organisasi

Jika perusahaan telah memiliki indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka *performance measurement* dapat diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan negatif, atau penyimpangan nol. Penyimpangan positif berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Penyimpangan nol pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan *feedback* dan *reward punishment*, penilaian kinerja organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

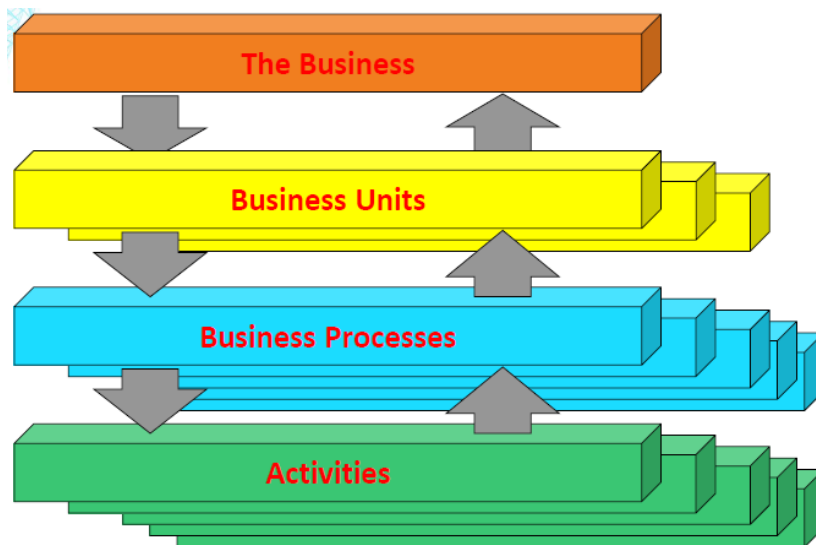
Suatu organisasi sudah seharusnya memiliki pengukuran kinerja yang benar-benar menunjukkan tingkat performansi yang dicapai, serta mampu menunjukkan seberapa berhasil pencapaian kinerja dari tiap level. Sehingga

nantinya pengukuran kinerja akan memiliki dampak signifikan terhadap suatu organisasi dan dapat berjalan secara efektif dan komprehensif.

2.4 Integrated Performance Measurement System (IPMS)

Integrated Performance Measurement System, yang selanjutnya disebut IPMS merupakan sistem baru pengukuran kinerja yang dibuat di *Centre for Strategic Manufacturing, University of Strathclyde, Glasgow* yang dikembangkan oleh Bittici et al. (1997). Model IPMS membagi level bisnis suatu organisasi menjadi 4 level seperti Gambar 2.1, yaitu :

1. *Business* (*Corporate* – Bisnis Induk)
2. *Business Unit* (Unit Bisnis)
3. *Business Process* (Proses Bisnis)
4. *Activity* (Aktivitas Bisnis)

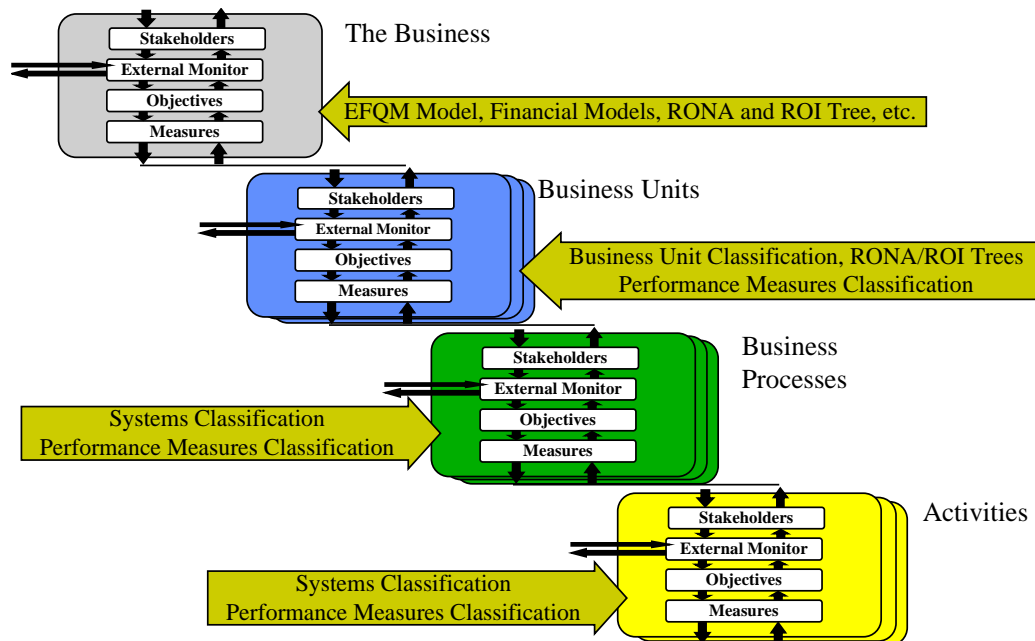


Gambar 2. 1 Level Organisasi (Bititci, Carrie, & Liam McDevitt, 1997)

Pada Model Referensi IPMS yang ditampilkan pada Gambar 2.2, terlihat setiap tingkat dari bisnis organisasi:

- Mengakui dan memahami *Stakeholders Requirement*.
- Monitor posisi eksternal terhadap pesaing dan kinerja kelas dunia untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan bisnis.
- Menetapkan tujuan berdasarkan implikasi dan kekritisian dari kesenjangan pembangunan bersama-sama dengan target yang tepat dan skala waktu.

- Monitor dan ulasan tujuan tersebut melalui laporan ukuran kinerja.
- Implementasikan tujuannya untuk tingkat yang lebih rendah



Gambar 2. 2 Model Referensi Integrated Performance Measurement System
(Bititci, Carrie, & Liam McDevitt, 1997)

Berikut adalah tahap – tahap sistem pengukuran kinerja dengan metode IPMS :

1. Identifikasi *Stakeholder* dan *Stakeholder Requirement*

Pada tiap-tiap level bisnis (organisasi) harus diketahui siapa saja *stakeholder*-nya atau pihak – pihak yang berkepentingan pada bisnis tersebut. Selanjutnya diidentifikasi permintaan/ keinginan (*requirement*) mereka terhadap bisnis yang disebut dengan *Stakeholder Requirement*. *Stakeholder* dapat meliputi; pemegang saham/pemilik, lingkungan sosial, pegawai/karyawan, pemerintah/instansi lain.

2. *External Monitor*

External monitor dilakukan untuk mengetahui posisi organisasi terhadap pesaing dan performansi/kinerja kelas dunia.

3. *Objectives*

Penyusunan tujuan (*objectives*) harus didasarkan pada keterlibatan dan prioritas perkembangan kebutuhan bersama dengan target dan skala waktu yang tepat. Tujuan seharusnya juga didasarkan pada pemikiran sejumlah

masukan, yaitu permintaan *stakeholder*, praktek dan performansi bisnis kelas dunia, *competitif gaps* dan rencana pesaing, tingkat performansi dimana organisasi mampu mencapainya dengan berbagai batasan yang ada disebut target realistis, tingkat\ performansi dimana organisasi memiliki kemampuan untuk mencapainya dengan menghilangkan berbagai batasan yang ada yang dikatakan sebagai target potensial (Suwignjo, 2000).

4. *Performance Measures*

Suatu bisnis (organisasi) seharusnya memiliki pengukuran performansi yang benar-benar menunjukkan tingkat performansi yang dicapai, serta mampu menunjukkan seberapa berhasil pencapaian tujuan pada tiap level. Pengukuran performansi untuk setiap bisnis memiliki perbedaan, oleh sebab itu diperlukan kejelian dan pemahaman yang baik dari bisnis agar diperoleh pengukuran performansi yang benar. Untuk memperoleh ukuran performansi atau KPI yang benar perlu dilakukan validasi terhadap KPI yang dibuat. Kemudian apabila KPI tersebut sudah valid, maka KPI dispesifikasikan untuk memudahkan dalam proses pengukurannya. Proses spesifikasi KPI ini dilakukan untuk mengetahui deskripsi yang jelas tentang KPI, tujuan, keterkaitan dengan *objectives*, target dan ambang batas, formula/cara mengukur KPI, frekuensi pengukuran, frekuensi review, siapa yang mengukur, dan apa yang mereka kerjakan.

2.5 *Key Performance Indicator (KPI)*

KPI merupakan serangkaian langkah-langkah yang berfokus pada aspek-aspek kinerja organisasi yang paling penting bagi keberhasilan saat ini dan masa depan organisasi (Parmenter, 2010). Berikut adalah tujuh karakteristik dari KPI yang efektif menurut David Parmenter (2010) :

1. Ukuran non-finansial (tidak dinyatakan dalam dolar, yen, poundsterling, dan sebagainya)
2. Diukur secara rutin (misalnya harian atau 24 jam/7 hari)
3. Ditindak lanjuti oleh CEO atau tim manajer
4. Semua anggota memahami pengukuran dan tindakan koreksi
5. Setiap individu dan tim harus ikut bertanggung jawab

6. Berpengaruh signifikan
7. Berpengaruh secara positif (misalnya mempengaruhi pengukuran kinerja lain secara positif)

Indikator kinerja yang baik setidaknya-tidaknya memenuhi kriteria “**SMART**”, yang terdiri atas:

1. **Specific**, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.
2. **Measurable**, indikator dalam angka atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai. Sedangkan indikator kualitatif adalah indikator yang bersifat pengamatan deskriptif (pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku). Meskipun indikator kuantitatif tidak lebih obyektif, ketepatan angkanya memungkinkan kesepakatan atas data mengenai hasil dan biasanya lebih disukai. Namun, meskipun indikator kuantitatif yang efektif digunakan, indikator kualitatif dapat mendukung angka dan persentase dengan kekayaan yang dimiliki informasi yang rnenghidupkan hasil program. Indikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif. Indikator yang bersifat kuantitatif atau dapat dikuantifikasi akan lebih mudah mengumpulkan datanya, menghitung capaian indikator, mengamati perkembangan dan evaluasinya.
3. **Achievable**, indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang, namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali organisasi yang bersangkutan. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu dipikirkan juga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kinerjanya, apakah masih dalam kendali organisasi yang bersangkutan atau tidak dan tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.
4. **Relevant**, suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

5. **Timely**, suatu indikator kinerja harus jelas dalam hal waktu pengukuran dan juga frekuensi dilakukannya pengukuran

2.6 Analytical Hierarchy Process (AHP)

Analytical Hierarchy Process yang selanjutnya disebut AHP, merupakan sebuah metode yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada 1970. AHP adalah alat pengambil keputusan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah keputusan yang kompleks. Menggunakan struktur hirarkis multi-level tujuan, kriteria, sub kriteria, dan alternative keputusan. (Saaty, 2008)

AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria yang paling dalam.
2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.
3. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan.

Layaknya sebuah metode analisis, AHP pun memiliki kelebihan dan kelemahan dalam system analisisnya. Kelebihan-kelebihan analisis ini adalah :

a. Kesatuan (*Unity*)

AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami.

b. Kompleksitas (*Complexity*)

AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif.

c. Saling ketergantungan (*Inter Dependence*)

AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linier.

d. Struktur Hirarki (*Hierarchy Structuring*)

AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa.

e. Pengukuran (*Measurement*)

AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas.

f. Konsistensi (*Consistency*)

AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas.

g. Sintesis (*Synthesis*)

AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif.

h. *Trade Off*

AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka.

i. Penilaian dan Konsensus (*Judgement and Consensus*)

AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda.

j. Pengulangan Proses (*Process Repetition*)

AHP mampu membuat pengambil keputusan menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan.

Sedangkan kelemahan metode AHP adalah sebagai berikut:

- a. Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru.
- b. Metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk.

2.7 Penelitian Terdahulu

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian-penelitian yang pernah dilakukan yang berhubungan dengan Pengukuran Kinerja sektor – sektor pelaku usaha. Berikut adalah penelitian – penelitian terdahulu yang terkait dengan pengukuran kinerja sektor – sektor pelaku usaha yang menjadi intervensi pemerintah :

1. Laksono (2010)
Judul penelitiannya adalah “Perancangan Model Pengukuran Kinerja Klaster Industri Usaha Kecil dan Menengah Komponen Otomotif Waru – Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun sebuah model pengukuran kinerja klaster yang bisa diimplementasikan dalam sistem manajemen klaster industri, sehingga model ini bisa berperan sebagai alat tata kelola yang terintegrasi dalam struktur klaster industri komponen otomotif tersebut. Model pengukuran kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Integrated Performance Measurement System* yang berbasis pada kebutuhan *stakeholder* klaster.
2. Pradana (2013)
Judul penelitiannya adalah “Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja Pada Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas Koperindag Tamben Kabupaten Trenggalek”. Pada penelitian ini, akan dilakukan perbaikan pada upaya pengembangan UMKM dengan diterapkannya pendekatan pengukuran kinerja pada unit kerja pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pengukuran kinerja pada Bidang Usaha Kecil Menengah di Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi (Dinas Koperindag Tamben) Kabupaten Trenggalek. Metode pengukuran kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Balanced Scorecard*.
3. Hidayat (2015)
Judul penelitiannya adalah “*Performance Measurement System Development for Micro Enterprises Under The Coaching Program of Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Surabaya*”. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perancangan sistem pengukuran kinerja untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di bawah pendampingan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. Model pengukuran kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Integrated Performance Measurement System*.
Berikut adalah tabel yang menunjukkan perbandingan penelitian ini dengan penelitian – penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Penulis	Objek	Sektor		Metode Pengukuran Kinerja				Sistem Pengukuran Kinerja
		Swasta	Pemerintah	BSC	IPMS	AHP	ANP	
Laksono, 2010	Klaster Industri UMKM Komponen Otomotif Waru		√		√		√	Spesifik untuk sebuah objek / organisasi
Pradana, 2013	Dinas Koperindag Tamben Kabupaten Trenggalek		√	√		√		Spesifik untuk sebuah objek / organisasi
Hidayat, 2015	Usaha Mikro Kecil Menengah di Surabaya		√		√	√		Umum untuk UMKM di Surabaya di bawah binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya
Kinasih, 2016	Sektor – sektor pelaku usaha di bawah binaan Pemerintah Kota Surabaya		√		√	√		Umum untuk sektor – sektor pelaku usaha di bawah binaan Pemerintah Kota Surabaya

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang meliputi tahapan – tahapan proses penelitian atau urutan langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian. Tahapan dalam metodologi akan dijadikan sebagai pedoman agar dapat melakukan penelitian secara sistematis dan terarah, sehingga dapat mencapai tujuan penelitian.

3.1 Tahap Identifikasi Masalah pada Pengelolaan UMKM oleh Instansi terkait

Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi dan penggalan informasi untuk mendapatkan masalah. Penggalan informasi dilakukan dengan melakukan diskusi dengan Instansi terkait di Pemerintah Kota Surabaya, yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS), Dinas Pemuda (DISPORA), Dinas Pertanian (DISPERTAN), Dinas Koperasi dan UMKM (DINKOP&UMKM), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERDAGIN). Penggalan informasi digunakan untuk merumuskan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini.

3.2 Perumusan Masalah dan Penetapan Tujuan Penelitian

Setelah dilakukan identifikasi didapatkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah merancang sistem pengukuran kinerja untuk sektor – sektor yang menjadi intervensi Instansi terkait . Sektor – sektor pelaku usaha tersebut antara lain, Individu atau kelompok masyarakat kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pemuda, usaha di sektor pertanian dan UMKM dibawah binaan Pemerintah Kota Surabaya. Instansi yang terlibat yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS), Dinas Pemuda (DISPORA), Dinas Pertanian (DISPERTAN), Dinas Koperasi dan UMKM (DINKOP&UMKM), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERDAGIN). Selanjutnya dilakukan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Tujuan akan menjawab rumusan masalah pada penelitian dan memberi petunjuk agar penelitian memiliki arah yang jelas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem

pengukuran kinerja untuk Individu atau kelompok masyarakat kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pemuda, usaha di sektor pertanian dan UMKM yang berada dibawah binaan Pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan metode *Integrated Performance Management System* (IPMS).

3.3 Studi Literatur dan Studi Lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan pembelajaran yang mampu membantu menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Studi pustaka yang dilakukan meliputi kajian terhadap literatur buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Studi literatur juga dilakukan untuk dapat menentukan konsep dan teori yang relevan untuk penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan penelitian. Studi literatur yang dilakukan meliputi Individu atau kelompok masyarakat kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pemuda, usaha di sektor pertanian, UMKM, pengukuran kinerja, *Integrated Performance Management System* (IPMS), *Key Performance Indicator (KPI)*, *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Selain Studi literatur, juga dilakukan studi lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang akan diselesaikan pada penelitian ini. Pada studi lapangan dilakukan tinjauan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016 – 2020 Kota Surabaya, kondisi pembinaan UMKM oleh Pemerintah Kota Surabaya saat ini serta pengamatan pada instansi yang terkait.

3.4 Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk pengolahan dalam penelitian. Data – data tersebut digunakan sebagai input dalam perancangan sistem pengukuran kinerja Individu atau kelompok masyarakat kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pemuda, usaha di sektor pertanian, dan UMKM di bawah binaan Pemerintah Kota Surabaya.

3.4.1 Identifikasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pemerintah Kota Surabaya

Visi, misi, tujuan, sasaran Pemerintah Kota Surabaya penting untuk diketahui karena pengukuran kinerja yang akan dirancang harus sesuai dengan strategi

Pemerintah Kota Surabaya. Data tersebut akan memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian.

3.4.2 Identifikasi Strategi dan Program Kerja Instansi Terkait

Strategi dan program kerja instansi terkait akan menjadi acuan penyusunan indikator dalam perancangan sistem pengukuran kinerja. Indikator – indikator yang dirancang akan disesuaikan dengan strategi masing – masing instansi. Data tersebut akan digunakan sebagai input dalam perancangan sistem pengukuran kinerja.

3.5 Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah diperoleh sebelumnya, selanjutnya akan dilakukan pengolahan data. Berikut adalah langkah – langkah yang dilakukan pada pengolahan data.

3.5.1 Identifikasi Level Program Pembinaan oleh Instansi Terkait

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi level program pembinaan sektor – sektor pelaku usaha, juga pada setiap instansi yang terlibat sesuai dengan kerangka kerja dari metode IPMS. Tahapan ini diperlukan karena instansi terkait merupakan salah satu *stakeholder* yang terlibat dalam penyusunan sistem pengukuran kinerja untuk sektor – sektor pelaku usaha.

3.5.2 Identifikasi *Stakeholder* dan *Stakeholder Requirement*

Pada tahap ini akan diidentifikasi *stakeholder* – *stakeholder* yang berhubungan dengan sektor sasaran binaan Pemerintah Kota Surabaya. Setelah seluruh *stakeholder* telah diidentifikasi, selanjutnya ditentukan *key stakeholder* dan dilakukan identifikasi *stakeholder requirement*. Proses identifikasi *stakeholder requirement*, dilakukan melalui metode wawancara atau diskusi dengan perwakilan masing – masing *stakeholder* pada setiap instansi dan sektor – sektor pelaku usaha.

3.5.3 Set Objective

Menetapkan objektif sistem pengukuran kinerja sektor sasaran berdasarkan gap dalam pemenuhan *stakeholder requirement* yang diperoleh dari tahap sebelumnya.

3.5.4 Penyusunan Key Performance Indicator (KPI)

Setelah didapatkan *strategic objective* pada masing – masing *stakeholder requirement*, maka ditentukan *Key Performance Indicator* (KPI) untuk setiap *stakeholder requirement* pada masing – masing instansi. KPI akan merepresentasikan indikator kinerja keberhasilan sektor – sektor yang menjadi sasaran Pemerintah Kota Surabaya. KPI juga akan menjadi tolok ukur pencapaian terhadap *strategic objective* yang telah dirumuskan.

3.5.5 External Monitor

External Monitor adalah kegiatan membandingkan kemampuan sistem pengukuran kinerja sektor sasaran dalam memenuhi keinginan *stakeholder* dengan sistem pengukuran kinerja sektor sasaran yang lain yang sejenis dalam pemenuhan keinginan *stakeholder* (*benchmarking*), sehingga diperoleh *gap* dalam *stakeholder requirement*. Namun, pada penelitian ini external monitor dilakukan *benchmarking* antar indikator. *Benchmarking* juga dilakukan untuk mengetahui indikator pengukuran yang telah dirancang oleh pihak lain, baik dalam skala nasional maupun internasional, yang hasilnya dapat dijadikan referensi untuk pengembangan sistem pengukuran kinerja sektor – sektor pelaku usaha di bawah binaan Pemerintah Kota Surabaya.

3.5.6 Validasi Key Performance Indicator (KPI)

Validasi KPI dilakukan oleh pihak *expert* pada masing – masing instansi Pemerintah Kota Surabaya yang terlibat. Pada tahap ini memungkinkan instansi terkait untuk menambahkan ataupun mengurangi beberapa indikator.

3.5.7 Penyusunan Key Performance Indicator (KPI) Properties

Setelah didapatkan KPI yang telah divalidasi oleh pihak *expert* masing – masing instansi. Selanjutnya dilakukan identifikasi *KPI Properties*, yang meliputi

deskripsi mengenai KPI, target, formula, satuan pengukuran, frekuensi, pihak yang mengukur, sumber data pengukuran, pemilik KPI, dan *scoring system*.

3.5.8 Pembobotan *Key Performance Indicator* (KPI) menggunakan AHP

Pembobotan KPI dilakukan oleh pihak *expertise* menggunakan kuisisioner perbandingan berpasangan. Pembobotan dilakukan berdasarkan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

3.5.9 Penentuan Target Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI)

Target masing – masing KPI didapatkan melalui wawancara dengan perwakilan *stakeholder* yang terlibat.

3.6 Analisis dan Interpretasi Data

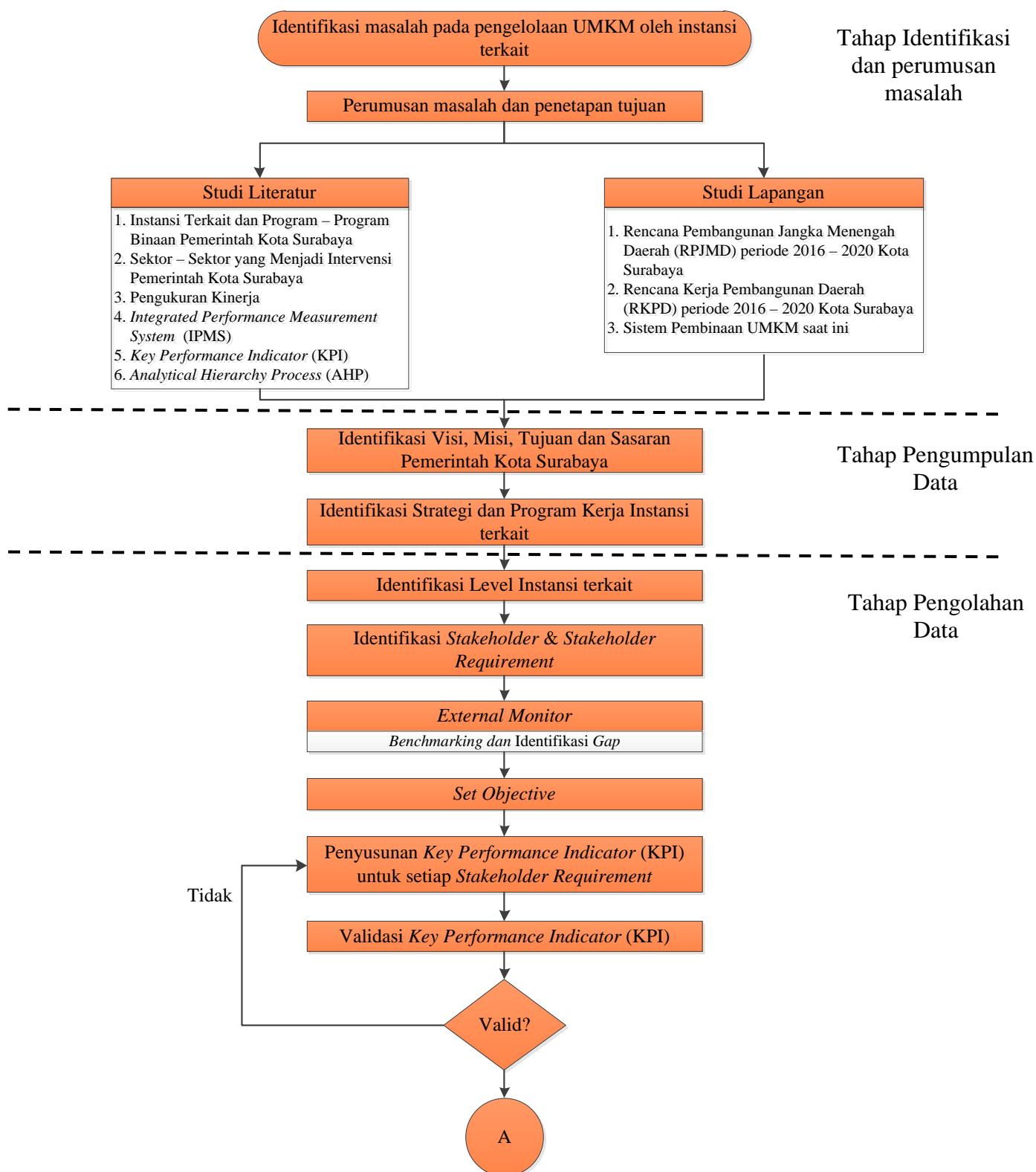
Pada tahap ini dilakukan analisis dan interpretasi data berdasarkan hasil pengolahan data serta uji coba sistem pengukuran kinerja yang telah dilakukan. Analisis dan interpretasi data dilakukan pada seluruh aktivitas yang dilakukan dalam pengolahan data.

3.7 Kesimpulan dan Saran

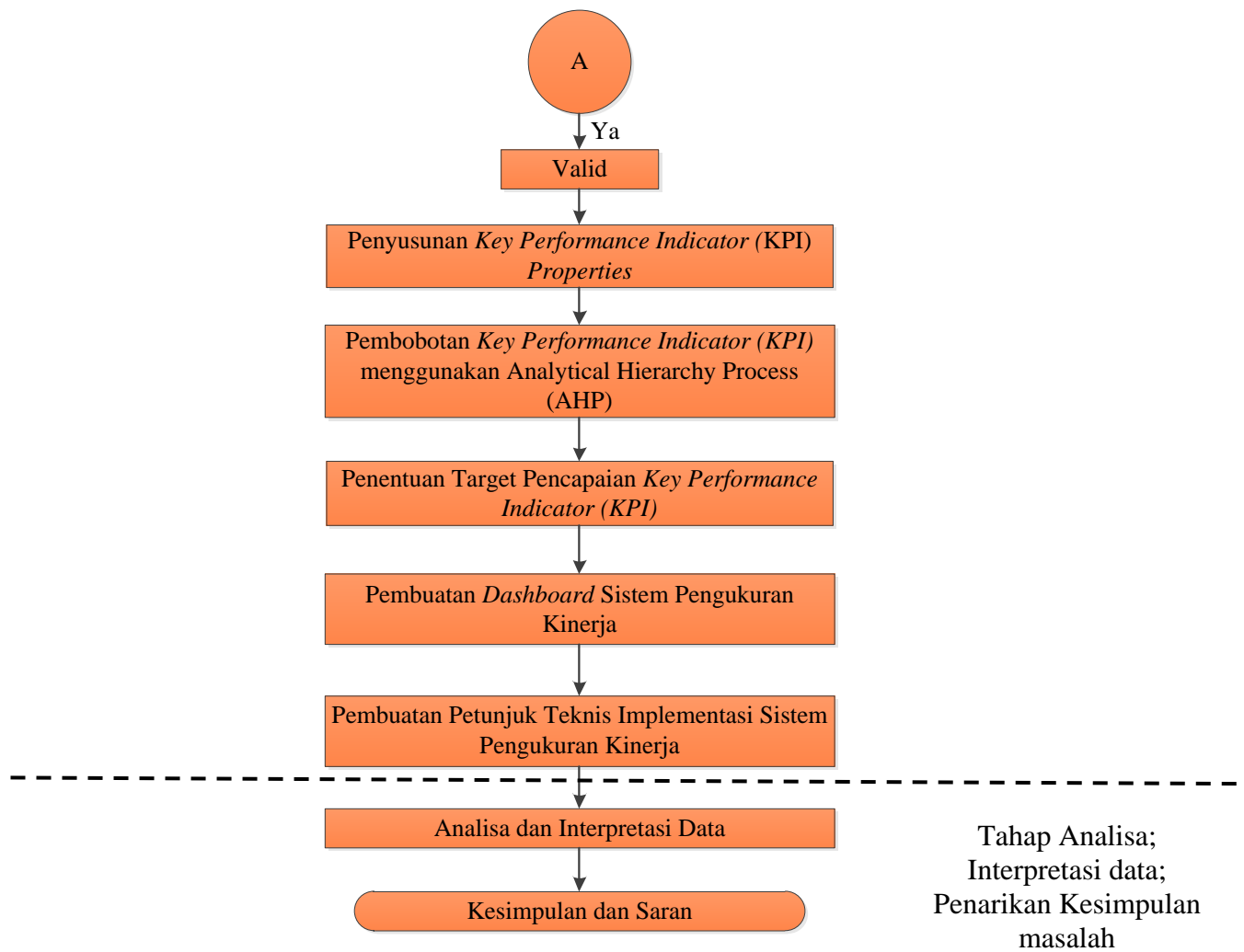
Kesimpulan dan saran adalah tahap akhir yang dilakukan dalam penelitian. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan yang menjawab tujuan dari penelitian dan saran bagi instansi terkait. Selain itu, juga akan diberikan saran – saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

3.8 *Flowchart* Penelitian

Flowchart memberikan gambaran alur proses penelitian. Berikut adalah *flowchart* dari penelitian ini :



Gambar 3. 1 Flowchart Penelitian



Gambar 3. 2 Flowchart Penelitian (Lanjutan)

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 4

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai tahap pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis. Data yang akan digunakan, diperoleh dari wawancara dan *brainstorming* dengan pihak Pemerintah Kota Surabaya.

Tahap pengumpulan data dimulai dengan mencari informasi terkait Sistem Pembinaan Usaha Berkelanjutan. Mulai dari gambaran umum pembinaan usaha, alur pembinaan, dan pihak – pihak yang terlibat. Selanjutnya dilakukan pengolahan data mulai dari melakukan identifikasi level bisnis pada sistem pembinaan usaha, identifikasi *stakeholder* dan *stakeholder requirement*, *external monitor*, *set objective*, penetapan *Performance Indicator* (PI), validasi PI, penentuan PI *properties*, pembobotan yang dilakukan pihak instansi melalui kuisioner, hingga penentuan target PI.

4.1 Pengumpulan Data

Pada sub bab ini dilakukan pengumpulan data meliputi peninjauan kembali Visi dan Misi Pemerintah Kota Surabaya periode 2016 – 2020, ruang lingkup dan peran instansi terkait, serta alur pembinaan usaha berkelanjutan.

4.1.1 Gambaran Pembinaan Usaha Berkelanjutan

Berikut adalah visi dan misi Pemerintah Kota Surabaya periode 2016 – 2020:

Visi :

“Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”

Misi :

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas.
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha.
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum.

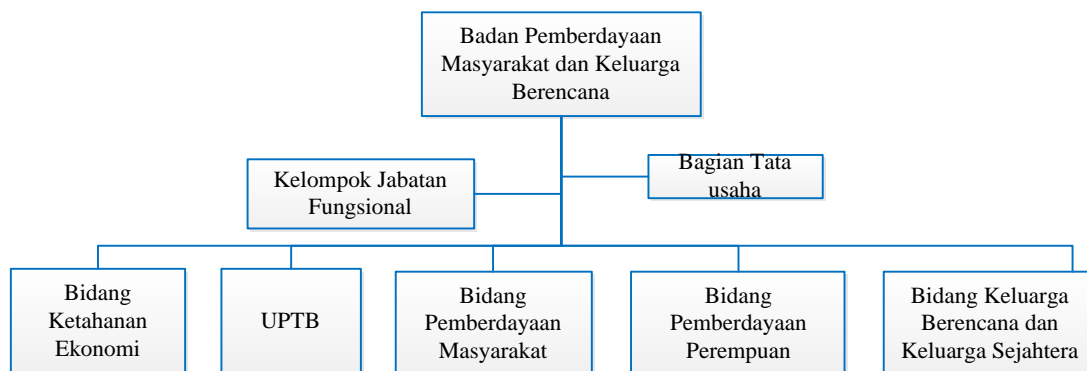
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota.
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional.
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif.
10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.

Pembinaan usaha berkelanjutan merupakan salah satu program yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Surabaya, khususnya misi nomor 1, 2, dan 9. Pembinaan usaha berkelanjutan dilakukan dengan tujuan mendorong pementapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif, namun hal tersebut bukanlah satu – satunya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan lain yang ingin dicapai dari sistem pembinaan usaha berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda, meningkatkan penanganan PMKS. Untuk mencapai tujuan – tujuan tersebut, maka Pemerintah Kota Surabaya merancang Sistem Pembinaan usaha berkelanjutan yang terintegrasi yang melibatkan :

a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BAPEMAS & KB)

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dibagi

menjadi 5 bidang seperti pada Gambar 4.2. Bidang yang bertanggung jawab penuh terhadap Sistem Pembinaan usaha berkelanjutan adalah Bidang Ketahanan Ekonomi. Pada Bidang Ketahanan Ekonomi akan dilakukan pembinaan terhadap masyarakat kategori PMKS.



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat

(Sumber : Badan Organisasi dan Tata Laksana)

Tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan Ekonomi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan Pembinaan Usaha Berkelanjutan antara lain :

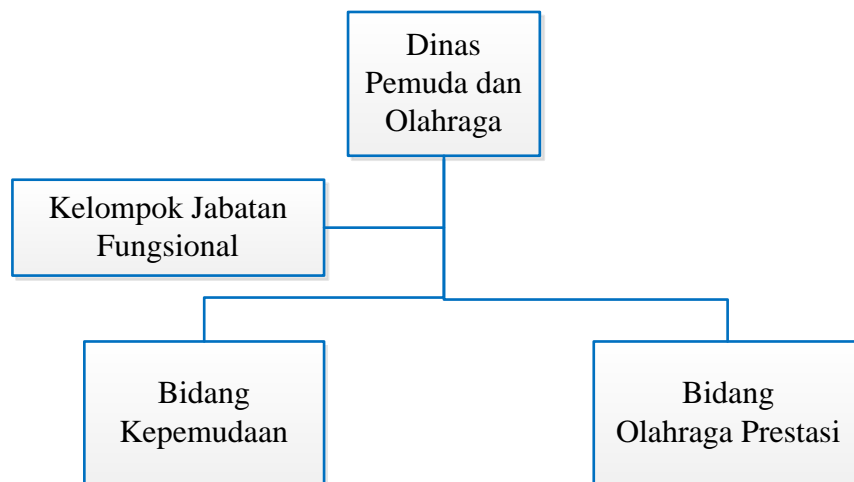
1. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kota;
2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota;
3. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota;
5. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota;
6. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota;
8. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro skala kota;

9. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala kota;
10. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota;
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota;
12. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota;
13. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.

Tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan Ekonomi, Badan Pemasarakatan dan Keluarga Berencana akan menjadi salah satu landasan dalam penyusunan indikator kinerja sasaran.

b. Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA)

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga. Dinas Olahraga terlibat dalam Sistem Pembinaan usaha berkelanjutan untuk menyiapkan inisiator pelaku usaha dari masyarakat kategori Pemuda, dalam rangka mewujudkan misi pertama Pemerintah Kota Surabaya, yaitu mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas. Bidang yang bertanggung jawab terhadap sistem pembinaan usaha berkelanjutan ini adalah Bidang Kepemudaan.



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga

(Sumber : Badan Organisasi dan Tata Laksana)

Tugas pokok dan fungsi Bidang Kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olahraga yang berkaitan dengan Pembinaan Usaha berkelanjutan antara lain :

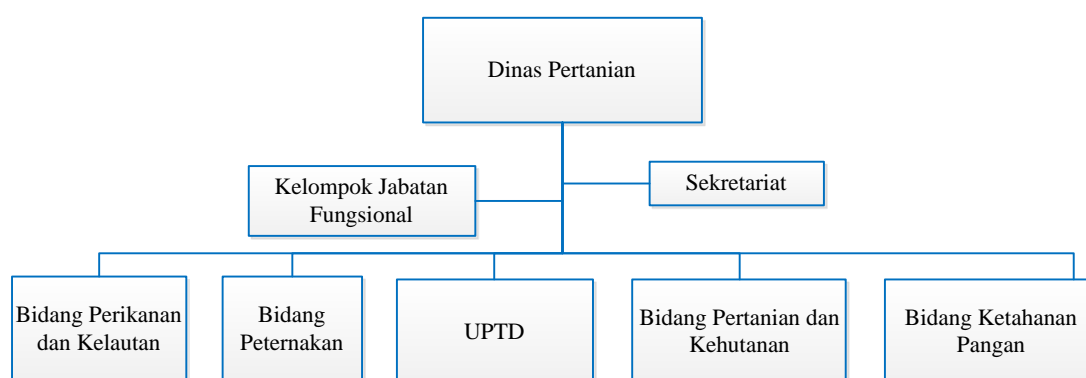
1. Pengembangan kemitraan dan kewirausahaan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan;
4. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan;
5. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan.

Tugas pokok dan fungsi Bidang Kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut akan menjadi salah satu landasan dalam penyusunan indikator kinerja sasaran.

c. Dinas Pertanian (DISPERTAN)

Dinas Pertanian merupakan salah satu instansi milik pemerintah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Dalam sistem pembinaan usaha berkelanjutan, Dinas Pertanian akan melakukan pembinaan dengan sasaran khusus, yaitu usaha di bidang pertanian. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan

inisiator pelaku usaha dari bidang pertanian, serta mewujudkan pencapaian misi kedua Pemerintah Kota Surabaya, yaitu memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha. Dimana, masyarakat yang diberdayakan adalah masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian. Dinas Pertanian dibagi menjadi menjadi 5 bidang seperti pada Gambar 4.4. Bidang yang bertanggung jawab penuh terhadap sistem pembinaan usaha berkelanjutan ini adalah, Bidang Perikanan dan Kelautan, Bidang Peternakan, serta Bidang Pertanian dan Kehutanan.



Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Dinas Pertanian

(Sumber : Badan Organisasi dan Tata Laksana)

Tugas pokok dan fungsi Bidang Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian yang berkaitan dengan Pembinaan Usaha berkelanjutan antara lain :

1. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan;
2. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.
3. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
4. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha dan produksi;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha dan produksi;
6. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang usaha dan produksi;

7. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha dan produksi;

Tugas pokok dan fungsi Bidang Peternakan, Dinas Pertanian yang berkaitan dengan Pembinaan Usaha berkelanjutan antara lain :

1. Pelaksanaan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kota;
2. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kota;
3. Pendaftaran usaha peternakan;
4. Pemberian izin usaha rph/rpu;
5. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kota;
6. Pelaksanaan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kota;
7. Pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota;
8. Pelaksanaan bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran;
9. Pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kota;
10. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha dan produksi peternakan;
11. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha dan produksi peternakan;
12. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang usaha dan produksi peternakan;
13. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha dan produksi peternakan

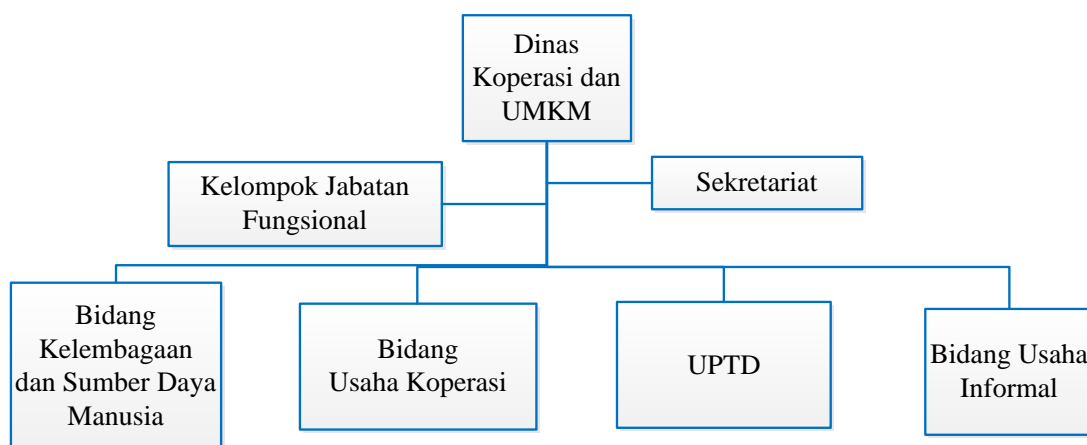
Tugas pokok dan fungsi Bidang Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pertanian yang berkaitan dengan Pembinaan Usaha berkelanjutan antara lain :

1. Pemberian bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis
2. Pemberian bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota
3. Pemberian bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian tersebut akan menjadi salah satu landasan dalam penyusunan indikator kinerja sasaran pelaku usaha sektor pertanian.

d. Dinas Koperasi dan UMKM (DINKOP & UMKM)

Dinas Koperasi dan UMKM merupakan salah satu instansi milik pemerintah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam sistem pembinaan usaha berkelanjutan, Dinas Koperasi dan UMKM berperan dalam pembentukan bentuk usaha sasaran binaan. Seperti yang terlihat pada Gambar 4.5, Dinas Koperasi dan UMKM terbagi menjadi Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Bidang Usaha Koperasi, UPTD, dan Bidang Usaha Informal. Bidang yang bertanggung jawab terhadap sistem pembinaan usaha berkelanjutan adalah Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Bidang Usaha Koperasi, serta Bidang Usaha Informal.



Gambar 4. 4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM

(Sumber : Badan Organisasi dan Tata Laksana)

Tugas pokok dan fungsi Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Dinas Koperasi dan UMKM yang berkaitan dengan Pembinaan Pelaku Usaha berkelanjutan antara lain :

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan sumber daya manusia ;

2. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan sumber daya manusia.

Tugas pokok dan fungsi Bidang Usaha Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM yang berkaitan dengan Pembinaan Pelaku Usaha berkelanjutan antara lain :

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang jasa dan pemasaran ;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang jasa dan pemasaran
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kemitraan dan permodalan ;
4. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kemitraan dan permodalan.

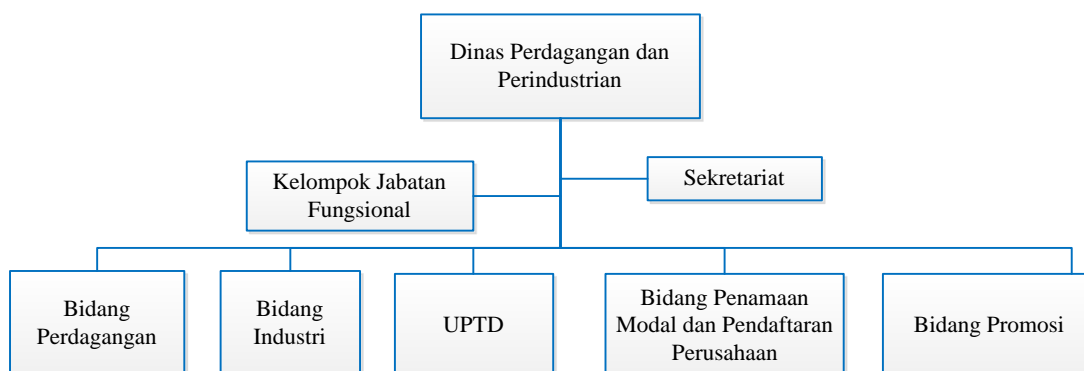
Tugas pokok dan fungsi Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Dinas Koperasi dan UMKM yang berkaitan dengan Pembinaan Pelaku Usaha berkelanjutan antara lain :

1. Penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah di tingkat kota meliputi :
 - Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan, perlindungan, pembinaan dan pengembangan UMKM di tingkat kota produksi, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi.
2. Pemberian fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM di tingkat kota meliputi :
 - Kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, hibah, jenis pembiayaan lain.
3. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan UMKM dalam wilayah kota.
4. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM tersebut akan menjadi salah satu landasan dalam penyusunan indikator kinerja sasaran.

e. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERDAGIN)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjalankan peran dalam memberikan pembinaan pada pelaku usaha agar siap untuk melakukan ekspor. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjadi titik puncak sistem pembinaan berkelanjutan, yang merupakan bentuk nyata perwujudan misi 9, yaitu memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif. Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari 4 Bidang dan 1 UPTD seperti pada



Gambar 4. 5 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

(Sumber : Badan Organisasi dan Tata Laksana)

Tugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berkaitan dengan Pembinaan Pelaku Usaha berkelanjutan antara lain :

1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kota
2. Pelaksanaan fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri;
3. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kota;
4. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri;

Tugas pokok dan fungsi Bidang Industri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berkaitan dengan Pembinaan Pelaku Usaha berkelanjutan antara lain :

1. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kota;
2. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kota;
3. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kota;
4. Pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kota;
5. Pelaksanaan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kota;
6. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kota;
7. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kota;
8. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kota;
9. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kota

Tugas pokok dan fungsi Bidang Promosi dan Pendaftaran Perusahaan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berkaitan dengan Pembinaan Pelaku Usaha berkelanjutan antara lain :

1. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana penunjang perdagangan (jasa pameran/konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
2. Pelaksanaan dan pelaporan sistem *inFormasi* perdagangan skala kota.
3. Promosi produk industri kota.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian tersebut akan menjadi salah satu landasan dalam penyusunan indikator kinerja sasaran.

f. Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (BAPPEKO)

Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang perencanaan

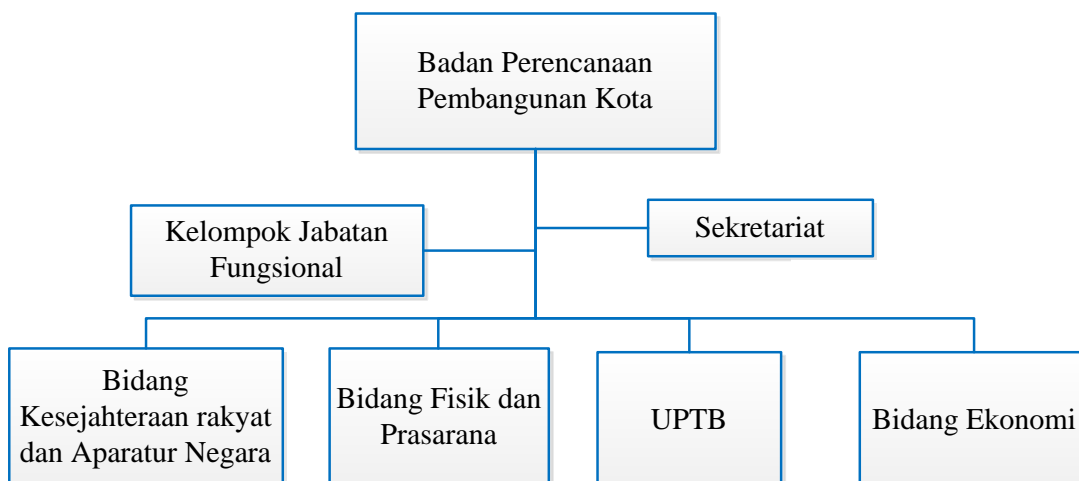
pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan;
4. Pengelolaan ketatausahaan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang :

1. Pekerjaan umum;
2. Perumahan;
3. Penataan ruang;
4. Perencanaan pembangunan;
5. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) terdiri dari beberapa bidang, seperti yang terlihat pada Gambar 4.7. Sedangkan sistem pembinaan berkelanjutan menjadi tanggung jawab Bidang Ekonomi.



Gambar 4. 6 Struktur Organusasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota

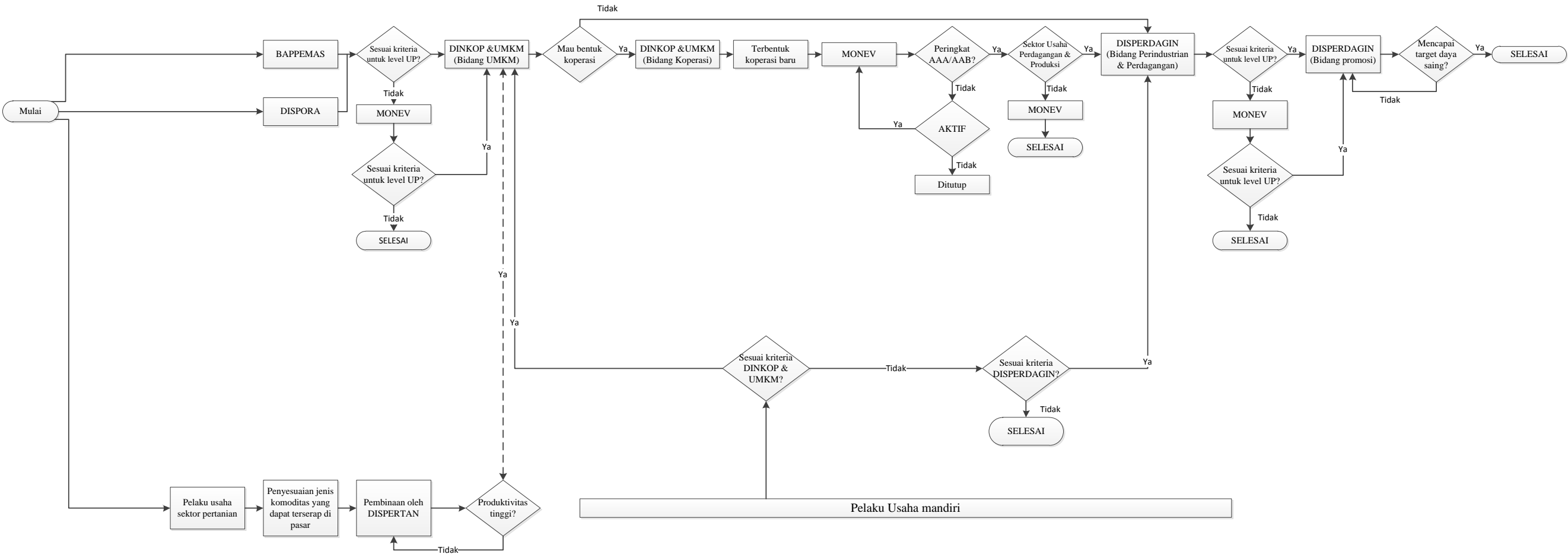
(Sumber : Dinas Organisasi dan Tata Laksana)

Dalam pelaksanaan pembinaan berkelanjutan, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) berperan dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal ini karena sistem pembinaan berkelanjutan merupakan salah satu sistem yang dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO).

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

4.1.2 Alur Pembinaan Usaha Berkelanjutan

Berikut adalah alur pembinaan usaha berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya periode 2016 – 2020 :



Gambar 4. 7 Alur Pembinaan Usaha Berkelanjutan

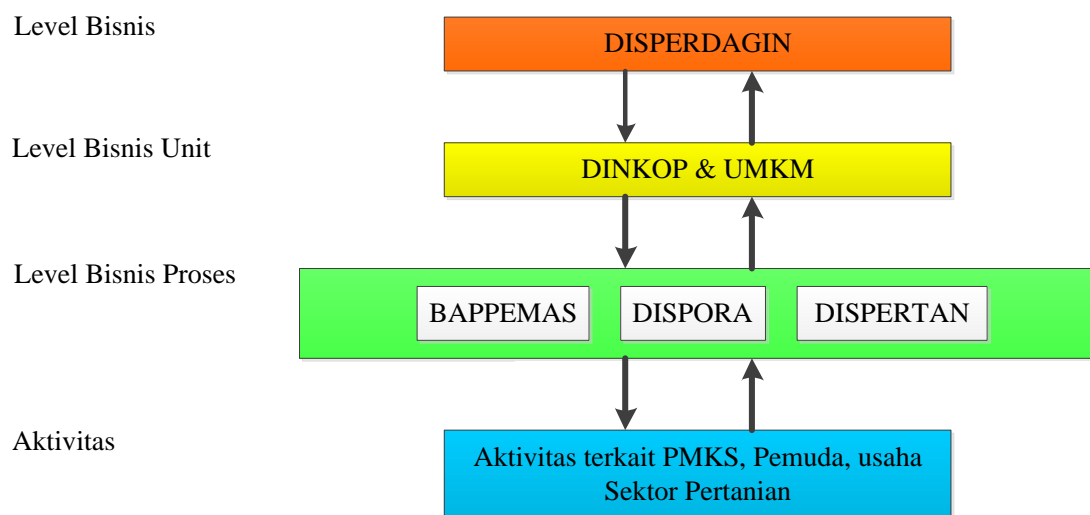
(Halaman ini sengaja dikosongkan)

4.2 Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini dilakukan perancangan sistem pengukuran kinerja berdasarkan *framework Integrated Performance Measurement System (IPMS)*.

4.2.1 Identifikasi Level Bisnis

Integrated Performance Measurement System (IPMS) membagi level sistem menjadi 4 level sebagai berikut :



Gambar 4. 8 Level Sistem Pembinaan Usaha Berkelanjutan

Level Bisnis (*Business Corporate*) : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjadi level tertinggi dalam sistem pembinaan berkelanjutan karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah instansi puncak yang bertanggung jawab dalam memantapkan pelaku usaha binaan untuk memiliki daya saing unggul sehingga menjadi pelaku usaha mandiri, dalam hal ini adalah mampu melakukan ekspor.

Level Bisnis Unit (*Unit Business*) : Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan UMKM menjadi level bisnis unit karena Dinas Koperasi dan UMKM bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan lanjutan setelah dilakukan pembinaan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian. Dinas Koperasi dan UMKM berperan untuk

menyiapkan bentuk usaha yang sesuai dengan usaha – usaha yang sedang dibina, serta kemampuan manajerial agar siap untuk mendapatkan pembinaan akhir dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Level Bisnis Proses (*Process Business*) :

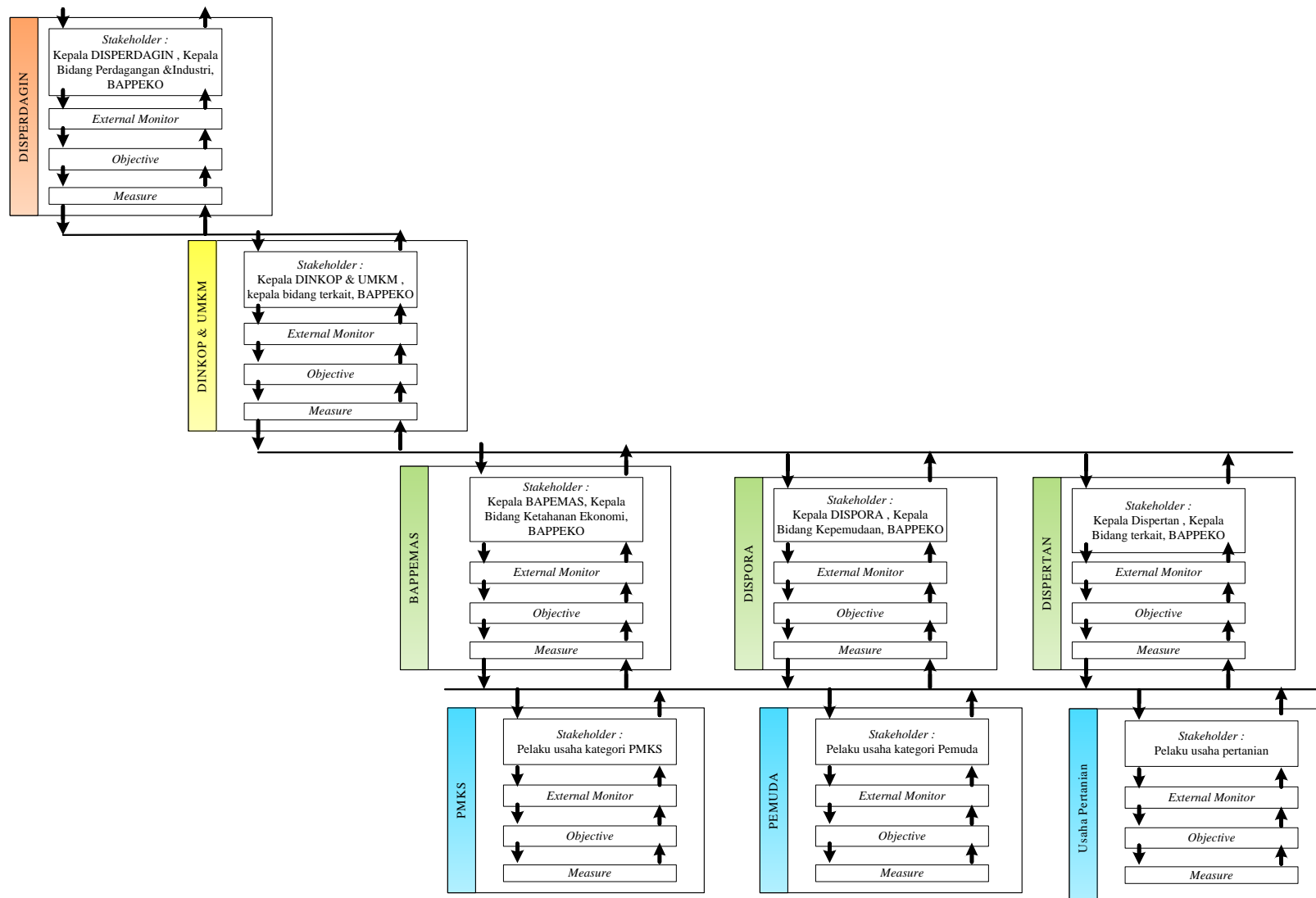
Pada level bisnis proses, terdiri dari proses pembinaan yang dilakukan oleh masing – masing instansi di setiap sektor. Pembinaan diberikan dalam berbagai bentuk, seperti pelatihan, pendampingan, dan lain – lain.

- **Badan Pemberdayaan Masyarakat**
Badan Pemberdayaan Masyarakat bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan dasar sehingga masyarakat kategori PMKS mampu melakukan usaha.
- **Dinas Pemuda dan Olahraga**
Dinas Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dari kategori pemuda.
- **Dinas Pertanian**
Dinas Pertanian bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dari sektor pertanian.

Aktivitas : Aktivitas terkait PMKS, pemuda, dan sektor pertanian

Aktivitas dalam sistem pembinaan berkelanjutan ini meliputi seluruh kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan pembinaan usaha berkelanjutan yang dilakukan terhadap PMKS, pemuda, dan pelaku di sektor pertanian.

Berikut adalah rancangan pengukuran kinerja sistem pembinaan usaha berkelanjutan dengan *framework Integrated PerFormance Measurement System* (IPMS) :



Gambar 4. 9 Framework Pengukuran Kinerja Pembinaan Berkelanjutan dengan Metode IPMS

4.2.2 Identifikasi *Stakeholder* dan *Stakeholder Requirement*

Tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi *stakeholder* berdasarkan level sistem yang telah dijelaskan sebelumnya. Identifikasi *stakeholder* dilakukan pada setiap level, agar dapat menangkap seluruh pihak – pihak yang terlibat pada pembinaan berkelanjutan.

Tabel 4. 1 *Stakeholder* Sistem Pembinaan Usaha Berkelanjutan Level Bisnis dan Bisnis Unit

Level Bisnis (<i>Business Corporate</i>) : Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
<i>Stakeholder</i>	Tugas / Peran dalam Pembinaan Berkelanjutan
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian
Kepala Bidang Industri & Kepala Bidang Perdagangan	Memastikan seluruh program – program yang berkaitan dengan pembinaan berkelanjutan terlaksana
Staff Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pendamping dan fasilitator dalam pelaksanaan program – program terkait pembinaan berkelanjutan
Badan Perencanaan Pembangunan Kota	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan usaha keberlanjutan
Level Bisnis Unit (<i>Unit Business</i>) : Dinas Koperasi dan UMKM	
<i>Stakeholder</i>	Tugas / Peran dalam Pembinaan Berkelanjutan
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM	Perumusan kebijakan di bidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Bidang Usaha Koperasi, serta Bidang Usaha InFormal	Penanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan usaha dalam pembinaan pelaku usaha terkait kelembagaan
Staff Dinas Koperasi dan UMKM	Pendamping / fasilitator pelaku usaha dalam menjalankan bisnis
Badan Perencanaan Pembangunan Kota	Pemantau dan evaluator pelaksanaan pembinaan usaha keberlanjutan

Tabel 4. 2 *Stakeholder* Sistem Pembinaan Usaha Berkelanjutan Level Bisnis Proses

Level Bisnis Proses (<i>Process Business</i>) : Badan Pemberdayaan Masyarakat	
<i>Stakeholder</i>	Tugas / Peran dalam Pembinaan Berkelanjutan
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Berencana	Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi	Penanggung jawab seluruh program/kegiatan bidang ketahanan ekonomi yang berkaitan dengan pembinaan berkelanjutan
Staff Bidang Ketahanan Ekonomi	Pendamping dalam pelaksanaan program/kegiatan bidang ketahanan ekonomi yang berkaitan dengan pembinaan berkelanjutan
Badan Perencanaan Pembangunan Kota	Pemantau dan evaluator pelaksanaan pembinaan usaha keberlanjutan
Level Bisnis Proses (<i>Process Business</i>) : .Dinas Pemuda dan Olahraga	
<i>Stakeholder</i>	Tugas / Peran dalam Pembinaan Usaha Berkelanjutan
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Perumusan kebijakan di bidang Pemuda dan Olahraga
Kepala Bidang Kepemudaan	Penanggung jawab seluruh program/kegiatan bidang pemuda yang berkaitan dengan pembinaan usaha berkelanjutan
Staff Bidang Kepemudaan	Pendamping dalam pelaksanaan program/kegiatan bidang pemuda yang berkaitan dengan pembinaan usaha berkelanjutan
Badan Perencanaan Pembangunan Kota	Pemantau dan evaluator pelaksanaan pembinaan usaha keberlanjutan

Tabel 4. 3 *Stakeholder* Sistem Pembinaan Usaha Berkelanjutan Level Bisnis Proses (Lanjutan)

Level Bisnis Proses (<i>Process Business</i>) : .Dinas Pertanian	
<i>Stakeholder</i>	Tugas / Peran dalam Pembinaan Usaha Berkelanjutan
Kepala Dinas Pertanian	Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian
Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan, Bidang Peternakan, serta Bidang Pertanian dan Kehutanan.	Penanggung jawab seluruh program/kegiatan Bidang Perikanan dan Kelautan, Bidang Peternakan, serta Bidang Pertanian dan Kehutanan yang berkaitan dengan pembinaan usaha berkelanjutan
Badan Perencanaan Pembangunan Kota	Pemantau dan evaluator pelaksanaan pembinaan usaha keberlanjutan

Tabel 4. 4 *Stakeholder* Sistem Pembinaan Usaha Berkelanjutan Level Aktivitas

Aktivitas : Aktivitas terkait PMKS, pemuda, dan sektor pertanian	
<i>Stakeholder</i>	Tugas / Peran dalam Pembinaan Usaha Berkelanjutan
Pemilik usaha kategori PMKS	Sasaran Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembinaan usaha berkelanjutan
Pemilik usaha kategori pemuda	Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan usaha berkelanjutan
Pemilik usaha sektor pertanian	Sasaran Dinas Pertanian dalam pembinaan usaha berkelanjutan

Setelah diidentifikasi *stakeholder* yang terlibat pada seluruh level, selanjutnya ditentukan *key stakeholder* pada sistem pembinaan berkelanjutan. Pemilihan *key stakeholder* didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain wawasan terkait kebijakan dan peraturan, pengalaman di program/kegiatan terkait, serta peran dan

fungsi dalam pelaksanaan program/kegiatan terkait. Berikut adalah *key stakeholder* pada sistem pembinaan usaha berkelanjutan:

- Bidang Ekonomi dan Bidang Kesejahteraan Rakyat dibawah Badan Perencanaan Pembangunan Kota.
- Kepala Bidang Industri, Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Bidang Promosi dan Pendaftaran Perusahaan dibawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Kepala Bidang Usaha Koperasi, dan Kepala Bidang Usaha Informal dibawah Dinas Koperasi dan UMKM.
- Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan, Kepala Bidang Peternakan, Kepala Bidang Pertanian dan Kehutanan di bawah Dinas Pertanian.
- Kepala Bidang Kepemudaan dibawah Dinas Pemuda dan Olahraga
- Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi dibawah Badan Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya akan dilakukan identifikasi *stakeholder requirement*, *stakeholder requirement* didapatkan dengan melakukan diskusi dan *interview* dengan *key stakeholder* yang telah ditentukan. Kecuali Bidang Ekonomi dibawah Badan Perencanaan Pembangunan Kota. Pada perancangan sistem pengukuran kinerja, Bidang Ekonomi dibawah Badan Perencanaan Pembangunan Kota tidak terlibat langsung dalam penyusunan rancangan indikator, namun Bidang Ekonomi hanya akan melakukan validasi terhadap indikator – indikator yang diinginkan oleh *stakeholder* kunci pada masing-masing dinas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa indikator yang dirancang oleh *stakeholder* kunci di setiap dinas, tidak melenceng dari tujuan awal perancangan sistem pengukuran kinerja pada sistem pembinaan usaha berkelanjutan. Identifikasi *stakeholder requirement* dilakukan hanya pada *key stakeholder* karena *key stakeholder* adalah pihak yang paling banyak melakukan intervensi terhadap sasaran yang akan diukur kinerjanya. Berikut adalah *stakeholder requirement* yang didapatkan dengan *interview* dan diskusi dengan *key stakeholder* :

Tabel 4. 5 Stakeholder Requirement Badan Pemberdayaan Masyarakat

No	<i>Stakeholder Requirement</i> Badan Pemberdayaan Masyarakat
1	Pelaku mampu melakukan proses produksi dengan baik
2	Adanya usaha produktif yang kontinyu
3	Penerapan teknologi dalam proses bisnis
4	Masyarakat kategori non PMKS Berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal
5	Mampu mendapatkan akses sumber pemodalan
6	Pelaku usaha mengikuti kegiatan pelatihan/pembinaan keterampilan
7	Pelaku usaha mampu menjalin <i>networking</i>

Tabel 4. 6 Stakeholder Requirement Dinas Pemuda dan Olahraga

No	<i>Stakeholder Requirement</i> Dinas Pemuda dan Olahraga
1	Calon pelaku usaha memiliki minat dan keinginan yang kuat untuk menjalankan kegiatan usaha
2	Melakukan proses produksi secara kontinyu
3	Mampu menciptakan produk yang menarik
4	Pelaku usaha mengikuti kegiatan pelatihan/pembinaan
5	Pelaku usaha mampu mendapatkan akses sumber pemodalan
6	Mengetahui kemampuan pelaku usaha dalam mendapatkan pendanaan
7	Telah memiliki standarisasi produk

Tabel 4. 7 Stakeholder Requirement Dinas Pertanian

No	Stakeholder Requirement Dinas Pertanian
1	Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam proses bisnis
2	Peningkatan produksi (hasil hutan, perikanan, panen, dll)
3	Adanya standarisasi mutu material (bibit, benih ikan, pupuk, dll)
4	Adanya standarisasi mutu produk
5	Hasil produk bersertifikat
6	Partisipasi dalam kegiatan pameran pertanian
7	Melakukan pemasaran hasil produksi
8	Pelaku usaha mengikuti pembinaan dari Dinas Pertanian
9	Memiliki kemampuan / keterampilan dalam bidang pertanian
10	Kemampuan mendapatkan modal usaha
11	Kemampuan menjalin kemitraan internal dan eksternal

Tabel 4. 8 Stakeholder Requirement Dinas Koperasi dan UMKM

No	Stakeholder Requirement Dinas Koperasi dan UMKM
1	Pelaku usaha telah masuk ke salah satu kategori jenis usaha
2	Adanya laporan keuangan sederhana
3	Pelaku usaha berinisiasi mengurus legalitas usaha
4	Melakukan peningkatan pangsa pasar dalam negeri
5	Memiliki strategi pemasaran
6	Memiliki standarisasi produk
7	Adanya peningkatan produksi
8	Pelaku usaha mampu mendapatkan akses sumber pemodalan
9	Terlibat dalam pameran
10	Memiliki mitra kerja
11	Mengikuti program pembinaan
12	Adanya sistem manajemen usaha yang baik
13	Adanya peningkatan keuntungan usaha dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat

Tabel 4. 9 Stakeholder Requirement Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Stakeholder Requirement Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1	Melakukan peningkatan produksi
2	Skala pemasaran luas
3	Memiliki produk yang unik dan inovatif
6	Pegawai mengikuti pelatihan & pembinaan
7	Usaha memiliki sumber pendanaan yang pasti
8	Memiliki ketrampilan administrasi dan akuntansi
9	Adanya pencatatan keuangan yang jelas dan lengkap
10	Adanya penggunaan teknologi dalam proses produksi dan pasca produksi
11	Memiliki supplier
12	Adanya mitra kerja
13	Aktif di jaringan nasional dan Internasional
14	Adanya hubungan yang baik dengan konsumen
15	Adanya standarisasi produk
16	Adanya legalitas usaha
17	Adanya kemudahan akses inFormasi terkait usaha
18	Kemampuan komunikasi pegawai

Seluruh *stakeholder requirement* pada masing-masing dinas terkait selanjutnya dicek kembali untuk menghindari adanya *stakeholder requirement* yang sama.

4.2.3 Set Objective

Setelah didapatkan *stakeholder requirement*, selanjutnya dilakukan transformasi *stakeholder requirement* menjadi *objective*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh *stakeholder* yang harus dicapai oleh pelaku usaha. Berikut adalah *objective* untuk seluruh *stakeholder requirement* :

Tabel 4. 10 Stakeholder Requirement Badan Pemberdayaan Masyarakat

No	Stakeholder Requirement Badan Pemberdayaan Masyarakat	Objective
1	Pelaku mampu melakukan proses produksi dengan baik	Menjamin keberlanjutan usaha
2	Adanya usaha produktif yang kontinyu	
3	Penerapan teknologi dalam proses bisnis	Menjamin proses produksi berjalan baik dan lancar
4	Masyarakat kategori non PMKS Berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal	Untuk meningkatkan kondisi ekonomi
5	Mampu mendapatkan akses sumber pemodalan	Mengetahui kemampuan pelaku usaha dalam mendapatkan pendanaan
6	Pelaku usaha mengikuti kegiatan pelatihan/pembinaan keterampilan	Untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pelaku usaha
7	Pelaku usaha mampu menjalin <i>networking</i>	Untuk memperluas pemasaran dan penjualan produk

Tabel 4. 11 Stakeholder Requirement Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Stakeholder Requirement Dinas Pemuda dan Olahraga	Objective
1	Calon pelaku usaha memiliki minat dan keinginan yang kuat untuk menjalankan kegiatan usaha	Untuk memenuhi permintaan konsumen dan memastikan keberlanjutan usaha
2	Melakukan proses produksi secara kontinyu	

Tabel 4. 11 Stakeholder Requirement Dinas Pemuda dan Olahraga (Lanjutan)

No	Stakeholder Requirement Dinas Pemuda dan Olahraga	Objective
3	Mampu menciptakan produk yang menarik	Terciptanya produk inovatif yang dapat memenangkan kompetisi pasar yang ada
4	Pelaku usaha mengikuti kegiatan pelatihan/pembinaan	untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha
5	Pelaku usaha mampu mendapatkan akses sumber pemodalan	mengetahui kemampuan pelaku usaha dalam mendapatkan pendanaan
6	Telah memiliki standarisasi produk	Untuk memastikan kualitas produk dan meningkatkan pelayanan

Tabel 4. 12 Stakeholder Requirement Dinas Pertanian

No	Stakeholder Requirement Dinas Pertanian	Objective
1	Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam proses bisnis	Untuk meningkatkan produktivitas
2	Peningkatan produksi (hasil hutan, perikanan, panen, dll)	Untuk meningkatkan pendapatan
3	Adanya standarisasi mutu material (bibit, benih ikan, pupuk, dll)	
4	Adanya standarisasi mutu produk	Untuk meningkatkan pendapatan dan menjaga kepuasan konsumen
5	Hasil produk bersertifikat	Mendukung ketahanan pangan
6	Partisipasi dalam kegiatan pameran pertanian	Untuk memperluas pemasaran dan penjualan produk
7	Melakukan pemasaran hasil produksi	
8	Pelaku usaha mengikuti pembinaan dari Dinas Pertanian	Untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja

Tabel 4. 12 Stakeholder Requirement Dinas Pertanian (Lanjutan)

No	Stakeholder Requirement Dinas Pertanian	Objective
9	Memiliki kemampuan / keterampilan dalam bidang pertanian	Menunjang kontinuitas usaha
10	Kemampuan mendapatkan modal usaha	Mengetahui kemampuan pelaku usaha dalam mendapatkan permodalan
11	Kemampuan menjalin kemitraan internal dan eksternal	Membangun relasi dan meningkatkan produktivitas usaha

Tabel 4. 13 Stakeholder Requirement Dinas Koperasi dan UMKM

No	Stakeholder Requirement Dinas Koperasi & UMKM	Objective
1	Pelaku usaha telah masuk ke salah satu kategori jenis usaha	Untuk memudahkan dalam klasifikasi usaha untuk pembinaan
2	Adanya laporan keuangan sederhana	Untuk memudahkan dalam mendapatkan pemodalan
3	Pelaku usaha berinisiasi mengurus legalitas usaha	
4	Melakukan peningkatan pangsa pasar dalam negeri	Untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan
5	Memiliki strategi pemasaran	Untuk memperluas wilayah pemasaran
6	Memiliki standarisasi produk	Pemenuhan kepuasan pelanggan
7	Adanya peningkatan produksi	Untuk melakukan peningkatan kapasitas produksi
8	Pelaku usaha mampu mendapatkan akses sumber pemodalan	Mengetahui kemampuan pelaku usaha dalam mendapatkan pendanaan

Tabel 4. 13 Stakeholder Requirement Dinas Koperasi dan UMKM (Lanjutan)

No	Stakeholder Requirement Dinas Koperasi & UMKM	Objective
9	Terlibat dalam pameran	Menjadi wadah untuk membandingkan usaha dengan usaha sejenis
		Untuk Promosi usaha
10	Memiliki mitra kerja	Mendukung produktivitas usaha
11	Mengikuti program pembinaan	Untuk meningkatkan kompetensi/kualitas kinerja pelaku usaha dan pegawai
12	Adanya sistem manajemen usaha yang baik	Pencapaian tujuan usaha secara maksimal
13	Adanya peningkatan keuntungan usaha dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Penyerapan tenaga kerja lokal
		Peningkatan rata-rata omset dan profit usaha

Tabel 4. 14 Stakeholder Requirement Dinas Perdagangan & Perindustrian

No	Stakeholder Requirement Dinas Perdagangan & Perindustrian	Objective
1	Melakukan peningkatan produksi	Untuk meningkatkan kapasitas produksi
		Untuk peningkatan penjualan dan keuntungan
2	Skala pemasaran luas	Untuk memperluas wilayah pemasaran
3	Memiliki produk yang unik dan inovatif	Untuk menjawab kebutuhan konsumen
6	Pegawai mengikuti pelatihan & pembinaan	Untuk meningkatkan kemampuan pegawai
7	Usaha memiliki sumber pendanaan yang pasti	Untuk mengetahui kemampuan manajemen finansial pelaku usaha

**Tabel 4.14 Stakeholder Requirement Dinas Perdagangan & Perindustrian
(Lanjutan)**

No	Stakeholder Requirement Dinas Perdagangan & Perindustrian	Objective
8	Memiliki ketrampilan administrasi dan akuntansi	Untuk mengetahui kemampuan pelaku usaha mendapatkan pendanaan
9	Adanya pencatatan keuangan yang jelas dan lengkap	
10	Adanya penggunaan teknologi dalam proses produksi dan pasca produksi	Untuk menjaga proses produksi berjalan stabil
		Untuk minimalisir adanya waste produksi
11	Memiliki supplier	Untuk menjaga stabilitas proses produksi
12	Adanya mitra kerja	Membangun relasi dan memasarkan produk
13	Aktif di jaringan nasional dan Internasional	
14	Adanya hubungan yang baik dengan konsumen	Meningkatkan kepuasan konsumen
15	Adanya standarisasi produk	Untuk memudahkan dalam memperoleh pemodalan serta meningkatkan penjualan
16	Adanya legalitas usaha	
17	Adanya kemudahan akses inFormasi terkait usaha	Memperluas pemasaran produk dan meningkatkan penjualan
18	Kemampuan komunikasi pegawai	

4.2.4 Penetapan *Performance Indicators*

Setelah mendapatkan *objective*, proses selanjutnya adalah mengidentifikasi indikator kinerja untuk mengukur pencapaian masing-masing *objective*. Indikator kinerja diperoleh melalui kajian literatur dan *brainstorming* dengan ahli, yaitu *key stakeholder*.

Selanjutnya, indikator kinerja yang telah didapatkan, dikategorikan menjadi kriteria yang lebih umum. Adapun kriteria tersebut, didapatkan dari *framework* Input – Proses – Output . Sehingga pada hasil akhir, akan didapatkan indikator kinerja pelaku usaha pada masing – masing instansi sebagai berikut :

a. Badan Pemberdayaan Masyarakat

Berikut adalah indikator kinerja pelaku usaha pada sistem pembinaan usaha berkelanjutan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat :

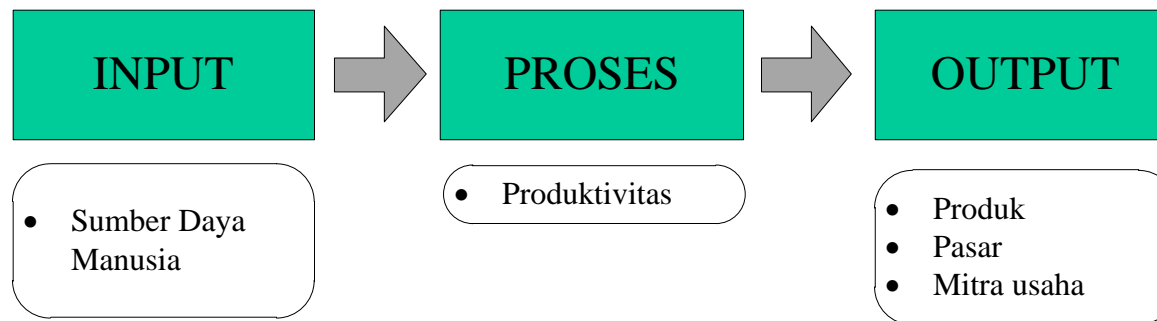
Tabel 4. 15 Identifikasi Indikator Kinerja Pelaku Usaha Kategori PMKS

No	Stakeholder Requirement	Objective	Performance indicator
1	Pelaku mampu melakukan proses produksi dengan baik	Menjamin keberlanjutan usaha	Kegiatan produksi dilakukan secara rutin setiap bulan
2	Adanya usaha produktif yang kontinyu		Adanya kemasan produk
			Adanya pembagian pekerjaan antar tenaga kerja
3	Penerapan teknologi dalam proses bisnis	Menjamin proses produksi berjalan baik dan lancar	Adanya penggunaan teknologi sederhana(manual/semi otomatis) dalam proses produksi
4	Masyarakat kategori non PMKS Berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal	Meningkatkan kondisi ekonomi	Tercapai/tidaknya <i>Break Even Point</i>
5	Mampu mendapatkan akses sumber pemodalan	Mengetahui kemampuan pelaku usaha dalam mendapatkan pendanaan	Adanya pendapatan yang kontinyu
			Pernah/belum pernah mendapatkan sumber pendanaan dari lembaga pendanaan
			Jumlah sumber pendanaan diluar modal sendiri

Tabel 4. 15 Identifikasi Indikator Kinerja Pelaku Usaha Kategori PMKS (Lanjutan)

No	Stakeholder Requirement	Objective	Performance indicator
6	Pelaku usaha mengikuti kegiatan pelatihan/pembinaan keterampilan	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan pelaku usaha	Jumlah pelatihan yang pernah diikuti
7	Pelaku usaha mampu menjalin <i>networking</i>	Memperluas pemasaran dan penjualan produk	Pernah/tidak pernah mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan hasil usaha ekonomi makro
			Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Indikator kinerja tersebut dikategorikan berdasarkan *framework Input - proses – output*. Klasifikasi kriteria pada i didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta ruang lingkup peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam Sistem pembinaan usaha berkelanjutan.



Gambar 4. 10 Framework Input - Proses - Output Indikator PMKS

Tabel 4. 16 Indikator Pelaku Usaha Kategori PMKS

Kriteria	Kode	Indikator
Sumber Daya Manusia	B1	jumlah pelatihan yang pernah diikuti
	B2	jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan hasil usaha ekonomi makro yang pernah diikuti
Produktivitas	B3	Ada / tidaknya kegiatan produksi dilakukan secara rutin setiap bulan
	B4	Adanya pembagian pekerjaan antar tenaga kerja
	B5	Adanya penggunaan teknologi sederhana(manual/semi otomatis/otomatis) dalam proses produksi
Produk	B6	Adanya kemasan produk
Pasar	B7	tercapai/tidaknya <i>Break Even Point</i>
	B8	Adanya pendapatan yang kontinyu
Mitra kerja	B9	Pernah/belum pernah mendapatkan sumber pendanaan dari lembaga pendanaan
	B10	jumlah sumber pendanaan diluar modal sendiri
	B11	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengukur kinerja pelaku usaha kategori PMKS yang telah mendapatkan pembinaan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat. Hasil pengukuran kinerja, dapat digunakan untuk mengetahui pencapaian kinerja pelaku usaha kategori PMKS, serta menentukan apakah layak untuk mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM atau tidak.

b. Dinas Pemuda dan Olahraga

Berikut adalah indikator kinerja pelaku usaha pada sistem pembinaan usaha berkelanjutan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga :

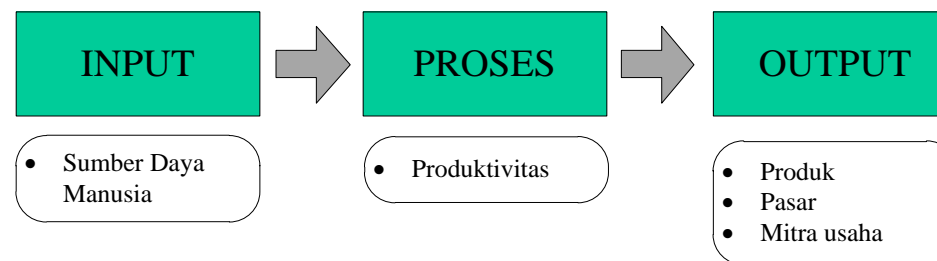
Tabel 4. 17 Identifikasi Indikator Kinerja Pelaku Usaha Kategori Pemuda

<i>Stakeholder requirement</i>	<i>Objective</i>	<i>Indikator</i>
Calon pelaku usaha memiliki minat dan keinginan yang kuat untuk menjalankan kegiatan usaha	Memenuhi permintaan konsumen dan memastikan keberlanjutan usaha	Jumlah tenaga kerja
Melakukan proses produksi secara kontinyu		Adanya kegiatan produksi secara kontinyu selama 3 bulan
Mampu menciptakan produk yang menarik	Terciptanya produk inovatif yang dapat memenangkan kompetisi pasar yang ada	Adanya produk baru
Pelaku usaha mengikuti kegiatan pelatihan/pembinaan	Meningkatkan kompetensi pelaku usaha	Jumlah pelatihan yang pernah diikuti
		Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan
Pelaku usaha mampu mendapatkan akses sumber pemodalan	Mengetahui kemampuan pelaku usaha dalam mendapatkan pendanaan	Pernah/belum pernah mendapatkan sumber pendanaan dari lembaga pendanaan
		Pertumbuhan modal kerja
		Jumlah sumber pendanaan diluar modal sendiri

Tabel 4. 17 Identifikasi Indikator Kinerja Pelaku Usaha Kategori Pemuda (Lanjutan)

<i>Stakeholder requirement</i>	<i>Objective</i>	<i>Indikator</i>
Telah memiliki standarisasi produk	Memastikan kualitas produk dan meningkatkan pelayanan	Adanya kemasan produk
		Produk memiliki merk
Pelaku usaha mampu melakukan pemasaran dengan media online dan offline	Meningkatkan penjualan dan keuntungan	Adanya peningkatan pendapatan
	Memperluas wilayah pemasaran	Adanya website/fanpage sebagai media informasi produk
Terlibat dalam pameran	Menjadi wadah untuk membandingkan usaha dengan usaha sejenis	Jumlah pameran yang pernah diikuti
	Metode promosi usaha	Sebaran geografis pemasaran produk

Indikator kinerja tersebut dikategorikan berdasarkan *framework* Input - proses – output. Klasifikasi kriteria pada *framework* input – proses –output didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta ruang lingkup peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Sistem pembinaan usaha berkelanjutan



Gambar 4. 11 Framework Input - Proses - Output Pelaku Usaha Kategori Pemuda

Tabel 4. 18 Indikator Pelaku Usaha Kategori Pemuda

Kriteria	Kode	Indikator
Sumber Daya Manusia	P1	Jumlah tenaga kerja
	P2	Jumlah pelatihan yang pernah diikuti
	P3	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan
Produktivitas	P4	Adanya kegiatan produksi secara kontinyu selama 3 bulan
Produk	P5	Ada/tidaknya produk baru
	P6	Adanya kemasan produk
	P7	Produk memiliki nama dagang
Pasar	P8	Adanya pendapatan yang kontinyu
	P9	Adanya website/fanpage sebagai media in <i>Formasi</i> produk
	P10	Jumlah pameran yang pernah diikuti
	P11	Sebaran geografis pemasaran produk
Mitra Usaha	P12	Pernah/belum pernah mendapatkan sumber pendanaan dari lembaga pendanaan
	P13	Pertumbuhan modal kerja
	P14	Jumlah sumber pendanaan diluar modal sendiri

Indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengukur kinerja pelaku usaha kategori pemuda yang telah mendapatkan pembinaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Hasil pengukuran kinerja, dapat digunakan untuk mengetahui pencapaian kinerja pelaku usaha kategori pemuda serta menentukan apakah layak untuk mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM atau tidak.

c. Dinas Pertanian

Berikut adalah indikator kinerja pelaku usaha sektor pertanian pada sistem pembinaan usaha berkelanjutan Dinas Pertanian :

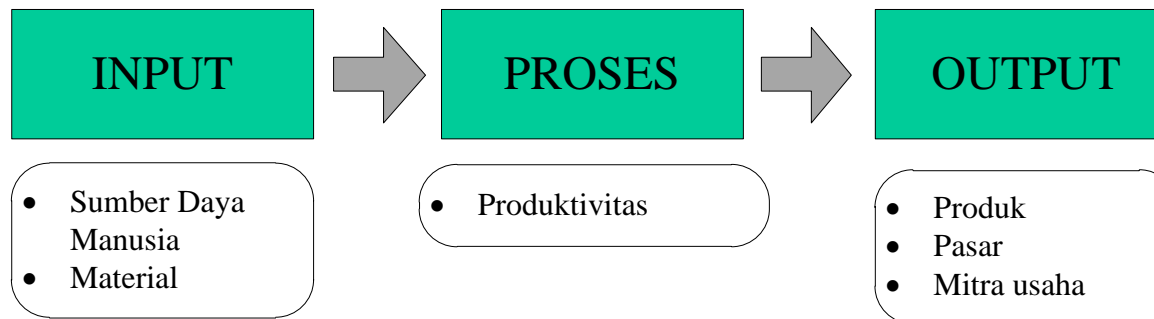
Tabel 4. 19 Identifikasi Indikator Kinerja Pelaku Usaha Sektor Pertanian

No	Stakeholder Requirement	Objective	Indikator
1	Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam proses bisnis	Meningkatkan produktivitas	Adanya penerapan metode baru dalam proses bisnis
2	Peningkatan produksi (hasil hutan, perikanan, panen, dll)	Meningkatkan pendapatan	Proporsi penggunaan bibit unggul dibanding bibit biasa
3	Adanya standarisasi mutu material (bibit, benih ikan, pupuk, dll)		
4	Adanya standarisasi mutu produk	Meningkatkan pendapatan dan menjaga kepuasan konsumen	Jumlah sertifikat produk yang dimiliki
5	Hasil produk bersertifikat	Mendukung ketahanan pangan	Adanya peningkatan produksi
6	Partisipasi dalam kegiatan pameran pertanian	Memperluas pemasaran dan penjualan produk	Tergabung dalam kelompok tani
7	Melakukan pemasaran hasil produksi		lingkup pemasaran lokal / regional
8	Pelaku usaha mengikuti pembinaan dari Dinas Pertanian	Meningkatkan kemampuan tenaga kerja	jumlah pelatihan yang diikuti
9	Memiliki kemampuan / keterampilan dalam bidang pertanian	Menunjang kontinuitas usaha	Adanya/tidak keberlanjutan setelah panen

Tabel 4. 19 Identifikasi Indikator Kinerja Pelaku Usaha Sektor Pertanian (Lanjutan)

No	Stakeholder Requirement	Objective	Indikator
10	Kemampuan mendapatkan modal usaha	Mengetahui kemampuan pelaku usaha dalam mendapatkan permodalan	adanya sumber pendanaan dari lembaga keuangan
11	Kemampuan menjalin kemitraan internal dan eksternal	Membangun relasi dan meningkatkan produktivitas usaha	ada/tidak supplier tetap

Indikator kinerja tersebut dikategorikan berdasarkan *framework* Input - proses – output. Klasifikasi kriteria pada *framework* input – proses –output didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta ruang lingkup peran Dinas Pertanian dalam Sistem pembinaan usaha berkelanjutan.



Gambar 4. 12 Framework Input - Proses - Output Indikator Usaha Pertanian

Tabel 4. 20 Indikator Pelaku Usaha Kategori Pertanian

Kriteria	Kode	Indikator
Sumber Daya Manusia	T1	jumlah pelatihan yang diikuti
Material	T2	ada/tidak supplier tetap
	T3	Proporsi penggunaan bibit unggul dibanding bibit biasa
Produktivitas	T4	Adanya penerapan metode baru dalam proses budidaya
	T5	Adanya/tidak keberlanjutan setelah panen
	T6	Adanya peningkatan produksi
Produk	T7	Jumlah sertifikat produk yang dimiliki
Pasar	T8	Luas ruang lingkup area penjualan hasil panen
Mitra usaha	T9	adanya sumber pendanaan dari lembaga keuangan
	T10	Tergabung dalam kelompok tani

Indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengukur kinerja pelaku usaha dari sektor pertanian yang telah mendapatkan pembinaan dari Dinas Pertanian. Hasil pengukuran kinerja, dapat digunakan untuk mengetahui pencapaian kinerja pelaku usaha dari sektor pertanian, serta menentukan apakah layak untuk mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM atau tidak.

d. Dinas Koperasi dan UMKM

Berikut adalah indikator kinerja pelaku usaha pada sistem pembinaan usaha berkelanjutan oleh Dinas Koperasi dan UMKM :

Tabel 4. 21 Identifikasi Indikator Kinerja Pelaku Usaha

No	Stakeholder Requirement	Objective	Indikator
1	Pelaku usaha telah masuk ke salah satu kategori jenis usaha	Memudahkan dalam klasifikasi usaha untuk pembinaan	Status badan hukum usaha
2	Adanya laporan keuangan sederhana	Memudahkan dalam mendapatkan pemodalan	Ada/tidak pencatatan keuangan sederhana
3	Pelaku usaha berinisiasi mengurus legalitas usaha		Jumlah ijin usaha yang dimiliki
4	Melakukan peningkatan pangsa pasar dalam negeri	Meningkatkan penjualan dan keuntungan	Ada/tidak pertumbuhan konsumen
5	Memiliki strategi pemasaran	Memperluas wilayah pemasaran	Adanya target pasar dan strategi pemasaran yang jelas
			Ruang lingkup wilayah pemasaran
6	Memiliki standarisasi produk	Pemenuhan kepuasan pelanggan	Adanya merek dagang
			Produk sudah memiliki kemasan

Tabel 4. 21 Identifikasi Indikator Kinerja Pelaku Usaha (Lanjutan)

No	Stakeholder Requirement	Objective	Indikator
7	Adanya peningkatan produksi	Melakukan peningkatan kapasitas produksi	Ada / tidak jenis produk baru
			Peningkatan kapasitas produksi
			Adanya peningkatan omzet
			Jumlah hari kerja 20 hari/bulan
8	Pelaku usaha mampu mendapatkan akses sumber pemodalan	Mengetahui kemampuan pelaku usaha dalam mendapatkan pendanaan	Jumlah sumber pendanaan diluar modal sendiri
			Proporsi hutang dibanding modal sendiri
9	Terlibat dalam pameran	Menjadi wadah untuk membandingkan usaha dengan usaha sejenis	Jumlah pameran yang pernah diikuti
		Metode Promosi usaha	Lingkup pameran yang pernah diikuti
10	Memiliki mitra kerja	Mendukung produktivitas usaha	Ada/tidaknya supplier tetap
	Mengikuti program pembinaan	Meningkatkan kompetensi/kualitas kinerja pelaku usaha dan pegawai	Jumlah pelatihan yang pernah diikuti
			Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan

Tabel 4. 21 Identifikasi Indikator Kinerja Pelaku Usaha (Lanjutan)

No	<i>Stakeholder Requirement</i>	<i>Objective</i>	Indikator
12	Adanya peningkatan keuntungan usaha dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Menyerap tenaga kerja lokal	Jumlah tenaga kerja
		Meningkatkan rata-rata omset dan profit usaha	Persentase kenaikan jumlah tenaga kerja

Indikator kinerja tersebut dikategorikan berdasarkan *framework* Input - proses – output. Klasifikasi kriteria pada *framework* input – proses –output didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta ruang lingkup peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Sistem pembinaan usaha berkelanjutan



Gambar 4. 13 *Framework* Input - Proses - Output Pelaku Usaha di Bawah Pembinaan Dinkop & UMKM

Tabel 4. 22 Indikator Pelaku Usaha di Bawah Pembinaan Dinkop & UMKM

Kriteria	Kode	Indikator
Material	K1	Ada/tidaknya <i>supplier</i> tetap
Sumber Daya Manusia	K2	Jumlah tenaga kerja
	K3	Persentase kenaikan jumlah tenaga kerja
	K4	Jumlah pelatihan yang pernah diikuti
	K5	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan
Modal usaha	K6	Jumlah sumber pendanaan diluar modal sendiri
	K7	Proporsi hutang dibanding modal sendiri
Sistem & kebijakan usaha	K8	Jumlah hari kerja 20 hari/bulan
Produktivitas	K9	Peningkatan kapasitas produksi
	K10	Adanya peningkatan omzet

**Tabel 4. 22 Indikator Pelaku Usaha di Bawah Pembinaan Dinkop & UMKM
(Lanjutan)**

Kriteria	Kode	Indikator
Produk	K11	Produk sudah memiliki kemasan yang paten
	K12	Ada / tidak varian produk baru
	K13	Adanya merek dagang
Pasar	K14	Adanya target pasar dan strategi pemasaran yang jelas
	K15	Ruang lingkup wilayah pemasaran
	K16	Jumlah pameran yang pernah diikuti
	K17	Lingkup pameran yang pernah diikuti
	K18	Ada/tidak pertumbuhan konsumen
Administrasi	K19	Ada/tidaknya status badan hukum usaha
	K20	Ada/tidak pencatatan keuangan sederhana
	K21	Jumlah ijin usaha yang dimiliki

Indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengukur kinerja pelaku usaha kategori PMKS, sektor pertanian, dan pemuda telah mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Hasil pengukuran dapat menunjukkan pencapaian kinerja pelaku usaha terhadap pembinaan yang telah didapatkan. Selanjutnya akan dilakukan pembinaan pada level selanjutnya oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

e. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Berikut adalah indikator kinerja pelaku usaha pada sistem pembinaan usaha berkelanjutan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian:

Tabel 4. 23 Identifikasi Indikator Kinerja Pelaku Usaha

<i>No</i>	<i>Stakeholder Requirement</i>	<i>Objective</i>	<i>Indikator</i>
1	Melakukan peningkatan produksi	Meningkatkan kapasitas produksi	Ada/Tidaknya peningkatan aset (alat produksi)
			Adanya peningkatan produksi
			Produktivitas produksi
		Meningkatkan penjualan dan keuntungan	Pertumbuhan omzet
2	Skala pemasaran luas	Memperluas wilayah pemasaran	Adanya jasa pengiriman
3	Memiliki produk yang unik dan inovatif	Menjawab kebutuhan konsumen	Peningkatan jumlah konsumen
			Adanya layanan penyelesaian pengaduan konsumen
			Adanya inovasi desain produk dan kemasan
			Jumlah pelatihan yang pernah diikuti
4	Pegawai mengikuti pelatihan & pembinaan	Meningkatkan kemampuan pegawai	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan
			Adanya sumber pendanaan yang tetap

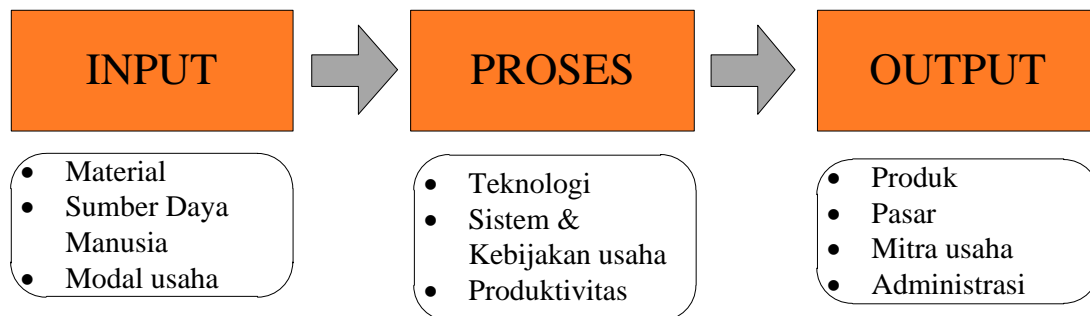
Tabel 4. 23 Identifikasi Indikator Kinerja Pelaku Usaha (Lanjutan)

<i>No</i>	<i>Stakeholder Requirement</i>	<i>Objective</i>	<i>Indikator</i>
5	Usaha memiliki sumber pendanaan yang pasti	Mengetahui kemampuan manajemen finansial pelaku usaha	Kelengkapan pencatatan keuangan
6	Adanya pencatatan keuangan yang jelas dan lengkap		Zero Non-PerForming Loan
7	Memiliki ketrampilan administrasi dan akuntansi	Mengetahui kemampuan pelaku usaha mendapatkan pendanaan	Adanya peningkatan modal usaha
8	Adanya penggunaan teknologi dalam proses produksi dan pasca produksi	Menjaga proses produksi berjalan stabil	Jumlah alat teknologi semi otomatis/otomatis dan ramah lingkungan
		Minimalisir adanya waste produksi	Adanya pengolahan limbah produksi
9	Memiliki supplier	Menjaga stabilitas proses produksi	Jumlah supplier tetap
10	Adanya mitra kerja	Membangun relasi dan memasarkan produk	Tergabung dalam komunitas usaha nasional dan internasional
11	Aktif di jaringan nasional dan Internasional		
12	Adanya hubungan yang baik dengan konsumen	Meningkatkan kepuasan konsumen	Adanya konsumen tetap
			Melakukan penjualan <i>Business to Business</i>

Tabel 4. 23 Identifikasi Indikator Kinerja Pelaku Usaha (Lanjutan)

<i>No</i>	<i>Stakeholder Requirement</i>	<i>Objective</i>	<i>Indikator</i>
13	Adanya standarisasi produk	Memudahkan dalam memperoleh pemodalan serta meningkatkan penjualan	Jumlah izin usaha yang dimiliki
14	Adanya legalitas usaha		Ada / tidaknya Status badan hukum usaha
15	Adanya kemudahan akses inFormasi terkait usaha	Memperluas pemasaran produk dan meningkatkan penjualan	Kelengkapan sertifikasi produk
16	Kemampuan komunikasi pegawai		Lingkup pemasaran regional dan internasional
			Jumlah tenaga kerja dengan pendidikan terakhir SMA/SMK

Indikator kinerja tersebut dikategorikan berdasarkan *framework* Input - proses – output. Klasifikasi kriteria pada *framework* input – proses –output didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta ruang lingkup peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Sistem pembinaan usaha berkelanjutan.



Gambar 4. 14 *Framework* Input - Proses - Output Pelaku Usaha dibawah Binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 4. 24 Indikator Pelaku Usaha dibawah Binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kriteria	Kode	Indikator
Material	I1	Proporsi supplier tetap
Sumber Daya Manusia	I2	Jumlah tenaga kerja dengan pendidikan terakhir SMA/SMK
	I3	Jumlah pelatihan yang pernah diikuti
	I4	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan
Modal usaha	I5	Adanya peningkatan modal usaha
	I6	Adanya sumber pendanaan yang tetap
Teknologi	I7	Ada/Tidaknya peningkatan aset (alat produksi)
	I8	Jumlah alat teknologi semi otomatis/otomatis dan ramah lingkungan

Tabel 4. 24 Indikator Pelaku Usaha dibawah Binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Lanjutan)

Kriteria	Kode	Indikator
Sistem dan kebijakan usaha	I9	Adanya jasa pengiriman
	I10	Adanya layanan penyelesaian pengaduan konsumen
	I11	Adanya pengolahan limbah produksi
Produktivitas	I12	Produktivitas produksi
	I13	Adanya peningkatan produksi
	I14	Zero Non-PerForming Loan
Produk	I15	Kelengkapan sertifikasi produk
	I16	Adanya inovasi desain produk dan kemasan
	I17	Pertumbuhan omzet
Pasar	I18	Peningkatan jumlah konsumen
	I19	Lingkup pemasaran regional dan internasional
	I20	Adanya penjualan <i>Business to Business</i>
Mitra Usaha	I21	Tergabung dalam komunitas usaha nasional dan internasional
Administrasi	I22	Kelengkapan pencatatan keuangan
	I23	Jumlah ijin usaha yang dimiliki
	I24	Status badan hukum usaha

Indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengukur kinerja pelaku usaha kategori pemuda yang telah mendapatkan pembinaan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sehingga dapat diketahui sejauh mana pencapaian pelaku usaha setelah mendapatkan pembinaan berkelanjutan dari berbagai instansi.

4.2.5 External Monitor

External Monitor dilakukan untuk membandingkan (*benchmarking*) kemampuan sistem pengukuran kinerja sektor sasaran dalam memenuhi keinginan *stakeholder* dengan sistem pengukuran kinerja lain yang sejenis dalam pemenuhan keinginan *stakeholder*. *Benchmarking* seharusnya dilakukan pada sistem dengan program dan sasaran sejenis untuk setiap level. Pada level bisnis proses dan bisnis unit, tahap external monitor digantikan dengan melakukan studi literatur pada saat penyusunan indikator. Hal ini karena saat ini belum adanya sistem pengukuran kinerja untuk sistem yang sejenis dengan pembinaan usaha berkelanjutan. Sedangkan pada level bisnis, *benchmarking* dilakukan terhadap penyusunan indikator daya saing UMKM yang dilakukan oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Hal ini karena indikator daya saing UMKM yang disusun oleh BAPPENAS memiliki output dan tujuan yang sama dengan pembinaan usaha berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, yaitu UMKM yang mandiri dan berdaya saing. *Benchmarking* dilakukan melalui data sekunder, seperti Laporan Kajian Penyusunan Indikator Daya Saing UMKM, Laporan Kajian Analisis Komponen Strategis Daya Saing UMKM, dan Laporan Kajian Analisis Kelembagaan dan Fasilitasi untuk Peningkatan Daya Saing UMKM di Daerah. Dalam *framework* IPMS, *External Monitor* dilakukan terhadap Stakeholder requirement. Namun, tidak adanya data pembanding yang dapat dijadikan sebagai *benchmark*, sehingga *benchmark* dilakukan terhadap indikator. Berdasarkan hasil perbandingan kebutuhan *stakeholder*, didapatkan hasil perbandingan sebagai berikut :

Tabel 4. 25 Hasil Perbandingan dengan Variabel Kinerja BAPPENAS

Indikator	BAPPENAS	DISPERDAGIN
Meluncurkan produk baru	√	√
Menerapkan metode baru dalam produksi	√	√
Penggunaan teknologi modern	√	√
Pangsa R&D	√	
Orientasi pasar output	√	√

**Tabel 4. 25 Hasil Perbandingan dengan Variabel Kinerja BAPPENAS
(Lanjutan)**

Indikator	BAPPENAS	DISPERDAGIN
Kualitas produk yang dihasilkan	√	√
Pangsa pasar output	√	√
Karakter pasar output	√	√
Biaya pemasaran	√	
Keuntungan / profit	√	√
Pertumbuhan output	√	√
Kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan	√	
Akses ke modal	√	√
Kualitas SDM/ Pendidikan & pengalaman	√	√
Kualitas pemilik/manajer	√	
Biaya <i>overhead</i>	√	
Efisiensi/produktivitas	√	√
Ekspor	√	√
Kepuasan konsumen	√	√
Kepuasan pekerja	√	
Jasa - jasa terkait produk	√	√
Waktu	√	√
Kerjasama	√	√
Organisasi	√	√

Berdasarkan hasil perbandingan, didapatkan bahwa terdapat beberapa indikator yang tidak terdapat pada indikator kinerja pelaku usaha di Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan untuk setiap indikator yang dibandingkan.

- Meluncurkan produk baru

Pada Sistem pengukuran kinerja pelaku usaha dalam pembinaan berkelanjutan, yang setara dengan indikator ini adalah indikator inovasi desain produk dan kemasan, serta indikator Ada/tidak varian produk baru. Dimana, yang didefinisikan sebagai produk baru bukan produk yang benar-

benar baru namun inovasi produk yang sudah ada (varian produk), dapat dikategorikan sebagai produk baru.

- Menerapkan metode baru dalam produksi

Indikator yang setara dengan indikator ini adalah adanya inovasi desain yang diikuti peningkatan asset produksi, serta pengelolaan limbah produksi.

- Penggunaan teknologi modern

Indikator yang setara dengan indikator ini adalah peningkatan peralatan/teknologi produksi.

- Pangsa R & D

Indikator ini tidak muncul sebagai indikator kinerja pelaku usaha karena pelaku usaha kecil di Surabaya belum mampu untuk melakukan riset pengembangan produk.

- Orientasi pasar output

Indikator yang setara dengan indikator ini adalah indikator peningkatan jumlah konsumen, yang mengindikasikan bahwa pelaku usaha memiliki memiliki target pasar terhadap produknya.

- Kualitas produk yang dihasilkan

Indikator tersebut disetarakan dengan indikator jumlah sertifikasi produk. Hal ini karena sertifikasi produk mampu merepresentasikan kualitas produk.

- Pangsa pasar output

Indikator tersebut setara dengan indikator peningkatan omzet, serta peningkatan jumlah konsumen.

- Karakter pasar output

Indikator tersebut setara dengan indikator lingkup pemasaran, serta indikator penjualan *Business to business*.

- Biaya Pemasaran

Indikator biaya pemasaran tidak muncul pada indikator kinerja pelaku usaha Pemerintah Kota Surabaya karena menjadi entitas yang sangat detail untuk diperhatikan. Sedangkan fokus dari pembinaan berkelanjutan bukanlah pada entitas tersebut.

- Keuntungan / profit
Indikator tersebut, setara dengan indikator peningkatan produksi, serta indikator peningkatan profit usaha.
- Pertumbuhan output
Indikator tersebut setara dengan indikator peningkatan produksi.
Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan
Indikator tersebut tidak muncul pada indikator kinerja pelaku usaha pembinaan Pemerintah Kota Surabaya karena tidak adanya ukuran pasti yang mampu mengukur hal tersebut.
- Akses ke modal
Indikator tersebut setara dengan peningkatan modal usaha, serta indikator adanya sumber pendanaan yang tetap
Kualitas SDM/Pendidikan dan pengalaman
Indikator tersebut setara dengan indikator jumlah tenaga kerja dengan pendidikan terakhir SMA/SMK, indikator jumlah pelatihan yang pernah diikuti, serta indikator jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan.
- Kualitas pemilik/manajer
Indikator tersebut tidak muncul pada indikator kinerja pelaku usaha pembinaan Pemerintah Kota Surabaya karena pihak Pemerintah Kota Surabaya tidak mempertimbangkan kualitas pemilik usaha, namun lebih fokus pada tenaga kerja.
- Biaya *overhead*
Indikator tersebut tidak muncul pada indikator kinerja pelaku usaha pembinaan Pemerintah Kota Surabaya karena biaya yang diperhatikan pada indikator pelaku usaha pembinaan Pemerintah Kota Surabaya tidak fokus pada overhead, namun lebih ke biaya modal kerja.
- Efisiensi / produktivitas
Indikator tersebut setara dengan indikator produktivitas produksi.
- Ekspor
Indikator tersebut setara dengan indikator lingkup pemasaran internasional, serta indikator tergabung dengan komunitas internasional.

- Kepuasan konsumen

Indikator tersebut didukung dengan indikator adanya jasa pengiriman, serta indikator adanya layanan penyelesaian pengaduan konsumen.

- Kepuasan pekerja

Indikator tersebut tidak diperhatikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pihak Pemerintah Kota Surabaya lebih fokus ke peningkatan kemampuan dan kapabilitas pekerja.

- Jasa – jasa terkait produk

Indikator tersebut setara dengan indikator adanya jasa pengiriman.

- Waktu

Indikator tersebut didukung oleh indikator penggunaan teknologi semi otomatis / otomatis dalam proses produksi. Dengan penggunaan teknologi yang lebih modern, maka waktu produksi lebih singkat. Juga melalui indikator tenaga kerja yang berpengalaman(sudah terlatih) sehingga mempercepat waktu pelayanan.

- Kerjasama

Indikator tersebut setara dengan indikator adanya supplier tetap, juga indikator tergabung dalam komunitas usaha nasional dan internasional.

- Organisasi

Indikator tersebut setara dengan indikator status badan hukum usaha. Indikator status badan hukum usaha mampu merepresentasikan kondisi organisasi usaha.

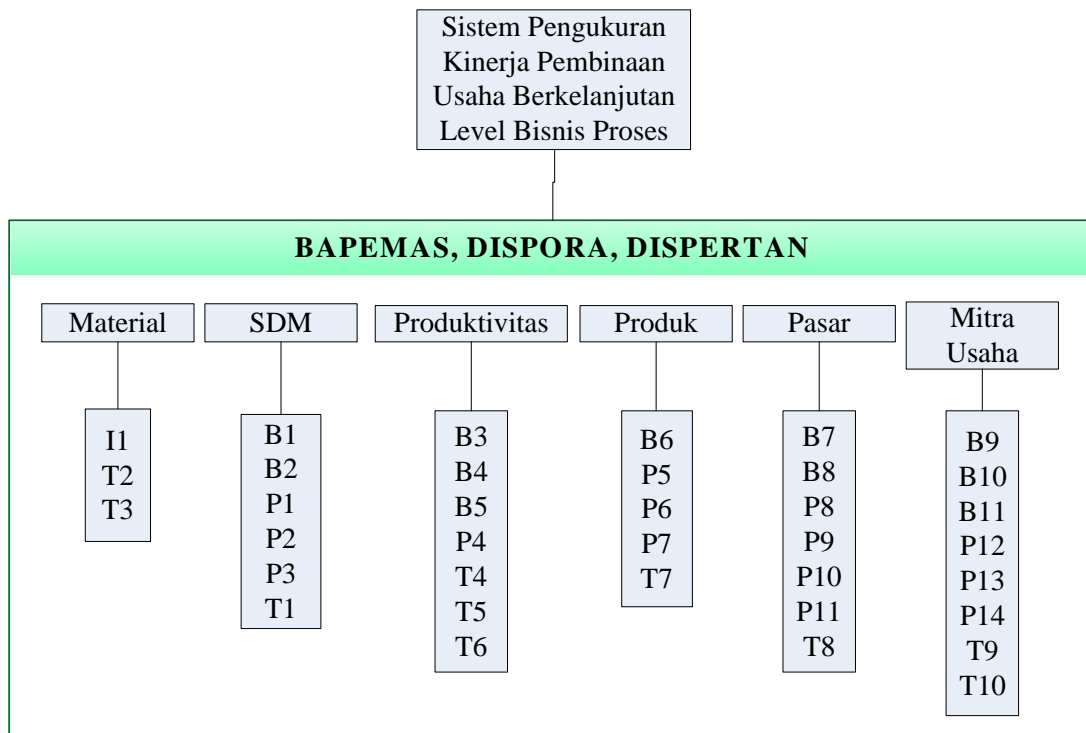
Hasil perbandingan tersebut tidak mempengaruhi indikator kinerja final pelaku usaha dalam pembinaan berkelanjutan Pemerintah Kota Surabaya. Namun hanya sebagai saran untuk perbaikan selanjutnya. Hal ini karena indikator kinerja pelaku usaha pembinaan berkelanjutan dirancang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari pembinaan berkelanjutan. selain itu, hasil perbandingan juga untuk mengetahui apakah rancangan pengukuran kinerja yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan awal perancangan atau tidak.

Selain perbandingan pada Tabel 4.9, terdapat beberapa aspek yang dapat diadaptasi dari penyusunan indikator UKM oleh BAPPENAS. Dalam penyusunan

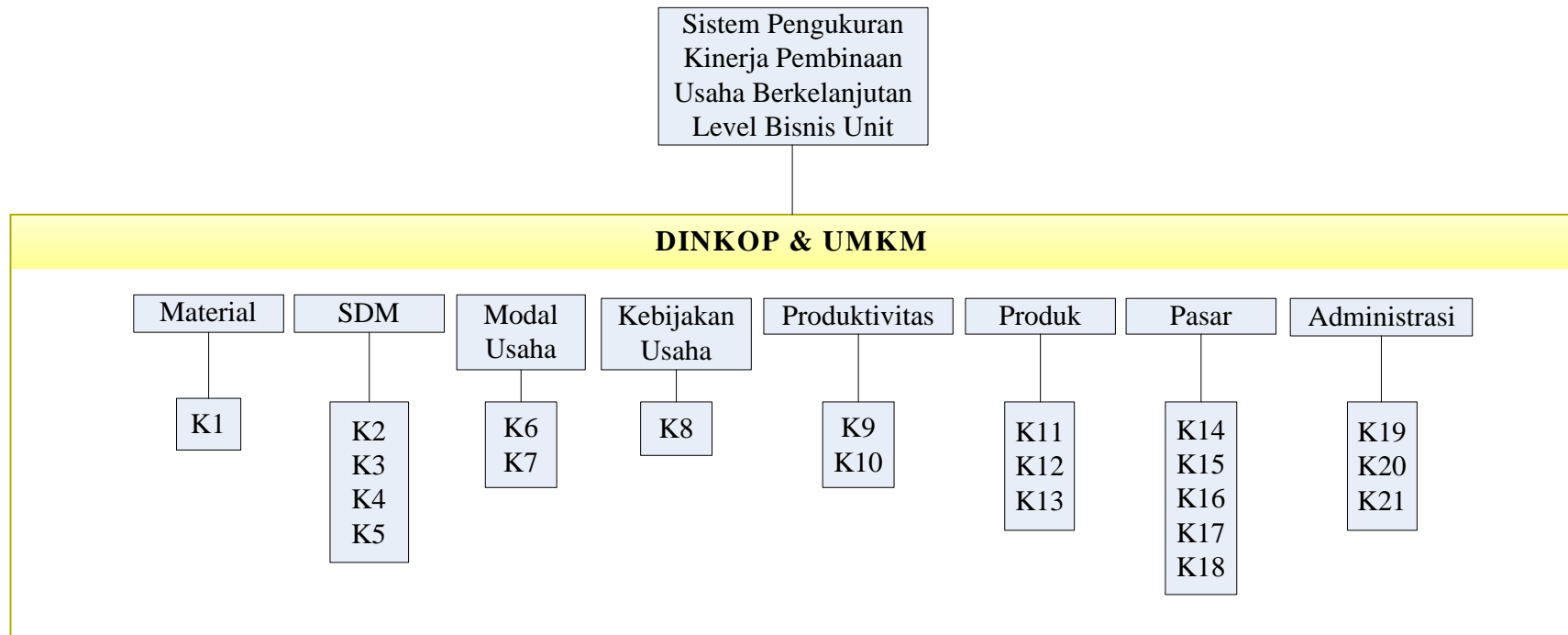
indikator daya saing UKM, BAPPENAS telah menetapkan indikator kunci untuk mencapai UMKM yang berdaya saing, yaitu produktivitas, pertumbuhan output, dan pangsa pasar. Sedangkan pembinaan usaha berkelanjutan belum menetapkan variabel kunci. Sehingga dalam perancangan sistem pengukuran kinerja untuk pembinaan usaha berkelanjutan, *key stakeholder* diarahkan untuk menentukan variabel kunci sehingga rancangan indikator kinerja yang dibuat dapat lebih spesifik dan tepat sasaran.

4.2.6 Validasi *Performance Indicators*

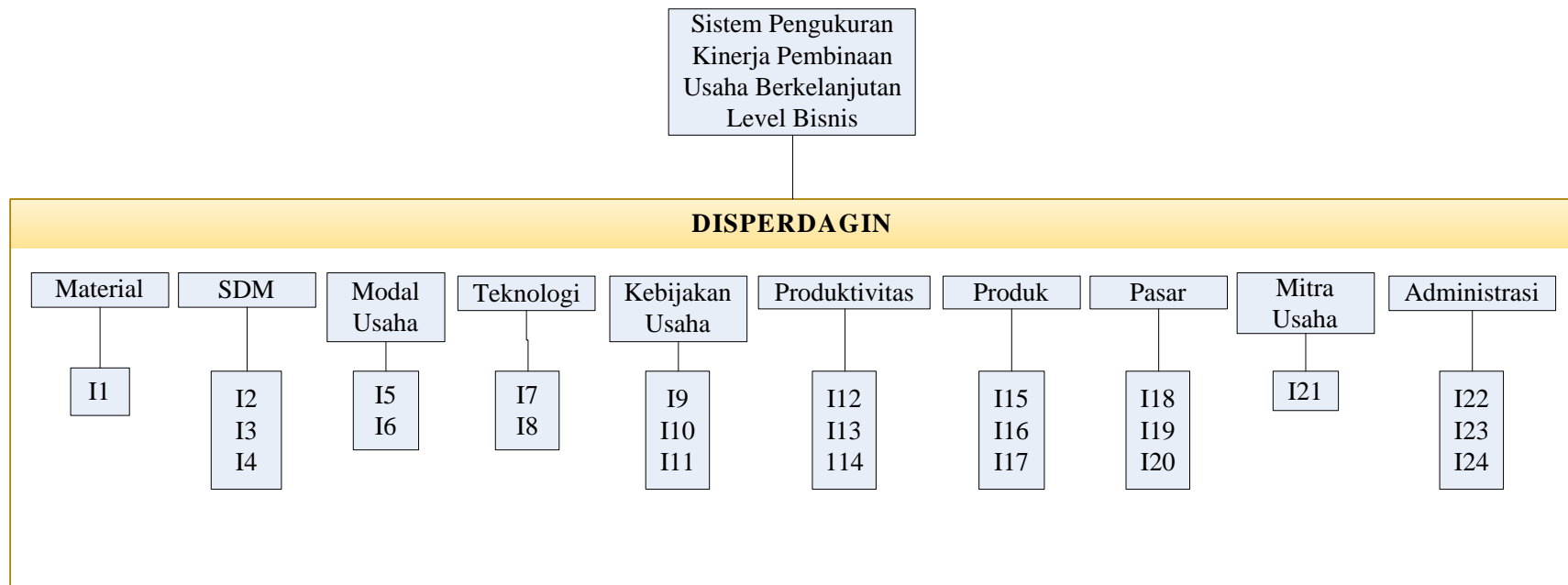
Tahap selanjutnya adalah validasi terhadap hasil rancangan pengukuran kinerja yang telah didapatkan dari hasil diskusi dengan *key stakeholder* pada setiap instansi yang terlibat. Validasi dilakukan dengan cara diskusi untuk mengetahui kesesuaian *stakeholder requirement* dan tujuan dilakukannya pembinaan usaha berkelanjutan. Validasi dilakukan setelah disusun dalam bentuk hirarki Sistem Pengukuran Kinerja dengan level teratas pengukuran kinerja sistem pembinaan usaha berkelanjutan, level dibawahnya adalah kriteria kinerja sistem pembinaan usaha berkelanjutan, dan level yang paling bawah adalah indikator kinerja. Proses validasi dilakukan dengan cara mengembalikan hirarki yang telah dibuat kepada pengambil keputusan sistem dan *expert* di sistem pembinaan usaha berkelanjutan untuk memberikan penilaian apakah indikator kinerja dan hirarki pada Gambar 4.15, 4.16, 4.17 sudah sesuai atau tidak. Proses Validasi dilakukan oleh staff Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Kota, staff Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Kota, serta Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Kota. Berdasarkan proses validasi yang dilakukan, ternyata indikator kinerja yang tersusun dinyatakan valid berdasarkan pendekatan tujuan dari masing – masing stakeholder dalam sistem pembinaan usaha berkelanjutan.



Gambar 4. 15 Hirarki Pengukuran Kinerja pada Level Bisnis Proses



Gambar 4. 16 Hirarki Pengukuran Kinerja pada Level Bisnis Unit



Gambar 4. 17 Hirarki Pengukuran Kinerja pada Level Bisnis

4.2.7 Pembobotan dengan AHP

Setelah diperoleh indikator-indikator kinerja sistem pembinaan usaha berkelanjutan, maka langkah berikutnya adalah menentukan bobot dari masing-masing indikator kinerja berdasarkan hirarki kinerja yang terbentuk dengan menggunakan pendekatan *Analitic Hierarchy Process*(AHP). Alat yang digunakan untuk mengetahui bobot adalah berupa kuisisioner perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Proses perbandingan dilakukan melalui diskusi dan kuisisioner yang diisi oleh *expert*, yaitu 5 orang staff Badan Perencanaan Pembangunan Kota, yang disebut Mondalev. *Expert* merupakan staff Badan Perencanaan Pembangunan Kota yang bertanggung jawab penuh terhadap perancangan sistem pembinaan usaha berkelanjutan. Selanjutnya, hasil pengisian kuisisioner akan diolah menggunakan software *Expert Choice* untuk menghasilkan sebuah nilai tunggal. Proses pengisian perbandingan berpasangan harus memperhatikan tingkat *inconsistency*. *Inconsistency* harus dibawah 0,1 yang artinya semakin rendah tingkat *inconsistency*, maka hasil perbandingan antar elemen akan semakin konsisten. Detail / bukti hasil pembobotan disertakan pada Lampiran 2.

Pembobotan yang pertama dilakukan adalah pembobotan terhadap antar kriteria. Berikut adalah contoh pengisian bobot antar kriteria pada Badan Pemberdayaan Masyarakat :

Setelah dilakukan pembobotan tiap – tiap kriteria, selanjutnya dilakukan pembobotan indikator kinerja pada masing – masing kriteria. Berikut adalah rekap hasil pembobotan keseluruhan :



Gambar 4. 18 Hasil Pembobotan Antar Kriteria pada BAPEMAS

1 Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS)

Berikut adalah hasil rekap pembobotan antar kriteria dan antar indikator Badan Pemberdayaan Masyarakat :

Tabel 4. 26 Pembobotan Kriteria dan Indikator BAPEMAS

KRITERIA	BOBOT	KODE	INDIKATOR	BOBOT	BOBOT GLOBAL
Sumber Daya Manusia	0.413	B1	jumlah pelatihan yang pernah diikuti	0.143	0.059059
		B2	jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan hasil usaha ekonomi makro yang pernah diikuti	0.857	0.353941
Produktivitas	0.398	B3	Ada / tidaknya kegiatan produksi dilakukan secara rutin setiap bulan	0.088	0.035024
		B4	Adanya pembagian pekerjaan antar tenaga kerja	0.669	0.266262
		B5	Adanya penggunaan teknologi sederhana(manual/semi otomatis/otomatis) dalam proses produksi	0.2344	0.093291

Tabel 4. 26 Pembobotan Kriteria dan Indikator BAPEMAS (Lanjutan)

KRITERIA	BOBOT	KODE	INDIKATOR	BOBOT	BOBOT GLOBAL
Produk	0.078		Adanya kemasan produk	1	0.078
Pasar	0.057	B7	tercapai/tidaknya <i>Break Even Point</i>	0.2	0.0114
		B8	Adanya pendapatan yang kontinyu	0.8	0.0456
Mitra kerja	0.055	B9	Pernah/belum pernah mendapatkan sumber pendanaan dari lembaga pendanaan	0.149	0.008195
		B10	jumlah sumber pendanaan diluar modal sendiri	0.474	0.02607
		B11	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	0.376	0.02068
TOTAL					1

2 Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA)

Berikut adalah hasil rekap pembobotan antar kriteria dan antar indikator Dinas Pemuda dan Olahraga.

Tabel 4. 27 Pembobotan Kriteria dan Indikator DISPORA

KRITERIA	BOBOT	KODE	INDIKATOR	BOBOT	BOBOT GLOBAL
Sumber Daya Manusia	0.413	P1	Jumlah tenaga kerja	0.084	0.034692
		P2	Jumlah pelatihan yang pernah diikuti	0.472	0.194936
		P3	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	0.444	0.183372
Produktivitas	0.398	P4	Adanya kegiatan produksi secara kontinyu selama 3 bulan	1	0.398
Produk	0.078	P5	Ada/tidaknya produk baru	0.073	0.005694
		P6	Adanya kemasan produk	0.4427	0.034531
		P7	Produk memiliki nama dagang	0.5	0.039
Pasar	0.057	P8	Adanya pendapatan yang kontinyu	0.066	0.003762
		P9	Adanya website/fanpage sebagai media inFormasi produk	0.328	0.018696
		P10	Jumlah pameran yang pernah diikuti	0.279	0.015903
		P11	Sebaran geografis pemasaran produk	0.328	0.018696

Tabel 4. 27 Pembobotan Kriteria dan Indikator DISPORA (Lanjutan)

KRITERIA	BOBOT	KODE	INDIKATOR	BOBOT	BOBOT GLOBAL
Mitra Usaha	0.055	P12	Pernah/belum pernah mendapatkan sumber pendanaan dari lembaga pendanaan	0.125	0.006875
		P13	Pertumbuhan modal kerja	0.15	0.00825
		P14	Jumlah sumber pendanaan diluar modal sendiri	0.725	0.039875
TOTAL					1

3 Dinas Pertanian (DISPERTAN)

Berikut adalah hasil rekap pembobotan antar kriteria dan antar indikator Dinas Pertanian :

Tabel 4. 28 Pembobotan Kriteria dan Indikator DISPERTAN

KRITERIA	BOBOT	KODE	INDIKATOR	BOBOT	BOBOT GLOBAL
Sumber Daya Manusia	0.339	T1	jumlah pelatihan yang diikuti	1	0.339
Material	0.046	T2	ada/tidak supplier tetap	0.111	0.005106
		T3	Proporsi penggunaan bibit unggul dibanding bibit biasa	0.889	0.040894

Tabel 4. 28 Pembobotan Kriteria dan Indikator DISPERTAN (Lanjutan)

KRITERIA	BOBOT	KODE	INDIKATOR	BOBOT	BOBOT GLOBAL
Produktivitas	0.125	T4	Adanya penerapan metode baru dalam proses budidaya	0.8	0.1
		T5	Adanya/tidak keberlanjutan setelah panen	0.1	0.0125
		T6	Adanya peningkatan produksi	0.1	0.0125
Produk	0.031	T7	Jumlah sertifikat produk yang dimiliki	1	0.031
Pasar	0.373	T8	Luas ruang lingkup area penjualan hasil panen	1	0.373
Mitra usaha	0.087	T9	adanya sumber pendanaan dari lembaga keuangan	0.875	0.076125
		T10	Tergabung dalam kelompok tani	0.125	0.010875
TOTAL					1

4 Dinas Koperasi dan UMKM (DINKOP&UMKM)

Berikut adalah hasil rekap pembobotan antar kriteria dan antar indikator Dinas Koperasi dan UMKM :

Tabel 4. 29 Pembobotan Kriteria dan Indikator Dinas Koperasi dan UMKM

KRITERIA	BOBOT	KODE	INDIKATOR	BOBOT	BOBOT GLOBAL
Material	0.068	K1	Ada/tidaknya <i>supplier</i> tetap	1	0.068
Sumber Daya Manusia	0.19	K2	Jumlah tenaga kerja	0.091	0.01729
		K3	persentase kenaikan jumlah tenaga kerja	0.091	0.01729
		K4	jumlah pelatihan yang pernah diikuti	0.266	0.05054
		K5	jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	0.552	0.10488
Modal usaha	0.19	K6	Jumlah sumber pendanaan diluar modal sendiri	0.5	0.095
		K7	Proporsi hutang dibanding modal sendiri	0.5	0.095
Sistem & kebijakan usaha	0.026	K8	Jumlah hari kerja 20 hari/bulan	1	0.026
Produktivitas	0.158	K9	peningkatan kapasitas produksi	0.5	0.079
		K10	adanya perningkatan omzet	0.5	0.079
Produk	0.152	K11	produk sudah memiliki kemasan yang paten	0.167	0.025384
		K12	Ada / tidak varian produk baru	0.667	0.101384
		K13	adanya merek dagang	0.167	0.025384

Tabel 4.29 Pembobotan Kriteria dan Indikator Dinas Koperasi dan UMKM (Lanjutan)

KRITERIA	BOBOT	KODE	INDIKATOR	BOBOT	BOBOT GLOBAL
Pasar	0.173	K14	Adanya target pasar dan strategi pemasaran yang jelas	0.416	0.071968
		K15	Ruang lingkup wilayah pemasaran	0.131	0.022663
		K16	Jumlah pameran yang pernah diikuti	0.131	0.022663
		K17	lingkup pameran yang pernah diikuti	0.131	0.022663
		K18	ada/tidak pertumbuhan konsumen	0.191	0.033043
Administrasi	0.043	K19	Ada/tidaknya status badan hukum usaha	0.333	0.014319
		K20	Ada/tidak pencatatan keuangan sederhana	0.333	0.014319
		K21	jumlah ijin usaha yang dimiliki	0.333	0.014319
TOTAL					1

5 Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERDAGIN)

Berikut adalah hasil rekap pembobotan antar kriteria dan antar indikator Dinas Perdagangan dan Perindustrian :

Tabel 4. 30 Pembobotan Kriteria dan Indikator Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KRITERIA	BOBOT	KODE	INDIKATOR	BOBOT	BOBOT GLOBAL
----------	-------	------	-----------	-------	--------------

KRITERIA	BOBOT	KODE	INDIKATOR	BOBOT	BOBOT GLOBAL
Material	0.03	I1	Proporsi supplier tetap	1	0.03
Sumber Daya Manusia	0.167	I2	Jumlah tenaga kerja dengan pendidikan terakhir SMA/SMK	0.55	0.09185
		I3	Jumlah pelatihan yang pernah diikuti	0.24	0.04008
		I4	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	0.21	0.03507
Modal usaha	0.083	I5	Adanya peningkatan modal usaha	0.2	0.0166
		I6	Adanya sumber pendanaan yang tetap	0.8	0.0664
Teknologi	0.125	I7	Ada/Tidaknya peningkatan aset	0.75	0.09375
		I8	Jumlah alat teknologi semi otomatis/otomatis dan ramah lingkungan	0.25	0.03125
Sistem dan kebijakan usaha	0.049	I9	Adanya jasa pengiriman	0.443	0.021707
		I10	Adanya layanan penyelesaian pengaduan konsumen	0.169	0.008281
		I11	Adanya pengolahan limbah produksi	0.387	0.018963
Produktivitas	0.119	I12	Produktivitas produksi	0.661	0.078659
		I13	Adanya peningkatan produksi	0.208	0.024752
		I14	Zero Non-Performing Loan	0.131	0.015589
Produk	0.131	I15	Kelengkapan sertifikasi produk	0.444	0.058164
		I16	Adanya inovasi desain produk dan kemasan	0.111	0.014541

Tabel 4. 30 Pembobotan Kriteria dan Indikator Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Lanjutan)

KRITERIA	BOBOT	KODE	INDIKATOR	BOBOT	BOBOT GLOBAL
		I18	Pertumbuhan omzet	0.444	0.058164
Pasar	0.179	I19	Peningkatan jumlah konsumen	0.661	0.118319
		I20	Lingkup pemasaran regional dan internasional	0.208	0.037232
		I21	Adanya penjualan <i>Business to Business</i>	0.131	0.023449
Mitra Usaha	0.044	I22	Tergabung dalam komunitas usaha nasional dan internasional	1	0.044
Administrasi	0.073	I23	Kelengkapan pencatatan keuangan	0.659	0.048107
		I24	Jumlah ijin usaha yang dimiliki	0.156	0.011388
		I25	Status badan hukum usaha	0.185	0.013505
TOTAL					1

4.2.8 Performance Indicator Properties

Setelah didapatkan indikator yang valid untuk masing – masing pelaku usaha di setiap instansi, selanjutnya dibuat *Performance Indicators Properties*. *Performance Indicators Properties* dibuat bertujuan untuk memperjelas *Performance Indicator* dengan informasi – informasi pendukung yang terdiri dari :

1. Indikator
2. Target
3. Tujuan
4. Formula pengukuran
5. Satuan
6. Frekuensi Pengukuran
7. Frekuensi *Review*
8. Pihak yang mengukur
9. Sumber data
10. Pemilik KPI

11. Sifat Target

Indikator properties untuk setiap indikator dapat dilihat pada Lampiran 2.

4.2.9 Scoring System

Penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan pencapaian kinerja aktual dengan target kinerja. Penentuan sistem penilaian (*scoring system*) didasarkan pada metode *Greater is better*, *Lower is better*, *Must be zero* atau *Must be one*.

Perhitungan skor pencapaian kinerja masing-masing indikator dihasilkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- *Greater is better* menunjukkan semakin tinggi pencapaian/score, maka indikasinya semakin baik

$$Score = \frac{Aktual}{Target}$$

- *Lower is better* menunjukkan semakin rendah pencapaian/score, maka indikasinya semakin baik

$$Score = \left(2 - \frac{Aktual}{Target} \right)$$

- *Must be zero*, score = 1 jika aktual = 0 atau score = 0 jika aktual \neq 0
- *Must be one*, score = 1 jika aktual = 1 atau score = 0 jika aktual \neq 1

Score masing-masing indikator kemudian dikalikan dengan *Vector Weight* (Bobot Vektor) masing-masing indikator menjadi *Weighted Score* (Skor Terbobot).

$$Weighted Score = Score \times Vector Weight$$

4.2.10 Traffic Light System

Setelah mendapat *score* pencapaian kinerja, hasil pencapaian dikategorikan kedalam *Traffic Light System*. *Traffic Light System* berfungsi sebagai tanda apakah skor dari suatu indikator kinerja memerlukan suatu perbaikan atau tidak. Indikator *Traffic Light System* ini direpresentasikan dengan tiga warna yaitu merah, kuning, dan hijau. Batas *score* penetapan warna didapatkan dari hasil diskusi dengan pakar Pengukuran Kinerja, pihak *exper*, serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010 – 2015 sebagai referensi. Batas-batas yang ditetapkan adalah:

- Warna merah menandakan bahwa pencapaian kinerja pelaku usaha tidak mencapai target atau masih di bawah target. Batas *score*: 0 – 0.65
- Warna kuning memberikan indikasi bahwa pencapaian kinerja pelaku usaha perlu ditingkatkan lagi dan harus terus dilakukan pemantauan. Batas *score*: 0.66 – 0.8
- Warna hijau menandakan bahwa pencapaian kinerja pelaku usaha telah memenuhi target. Batas *score*: 0.8 – 1

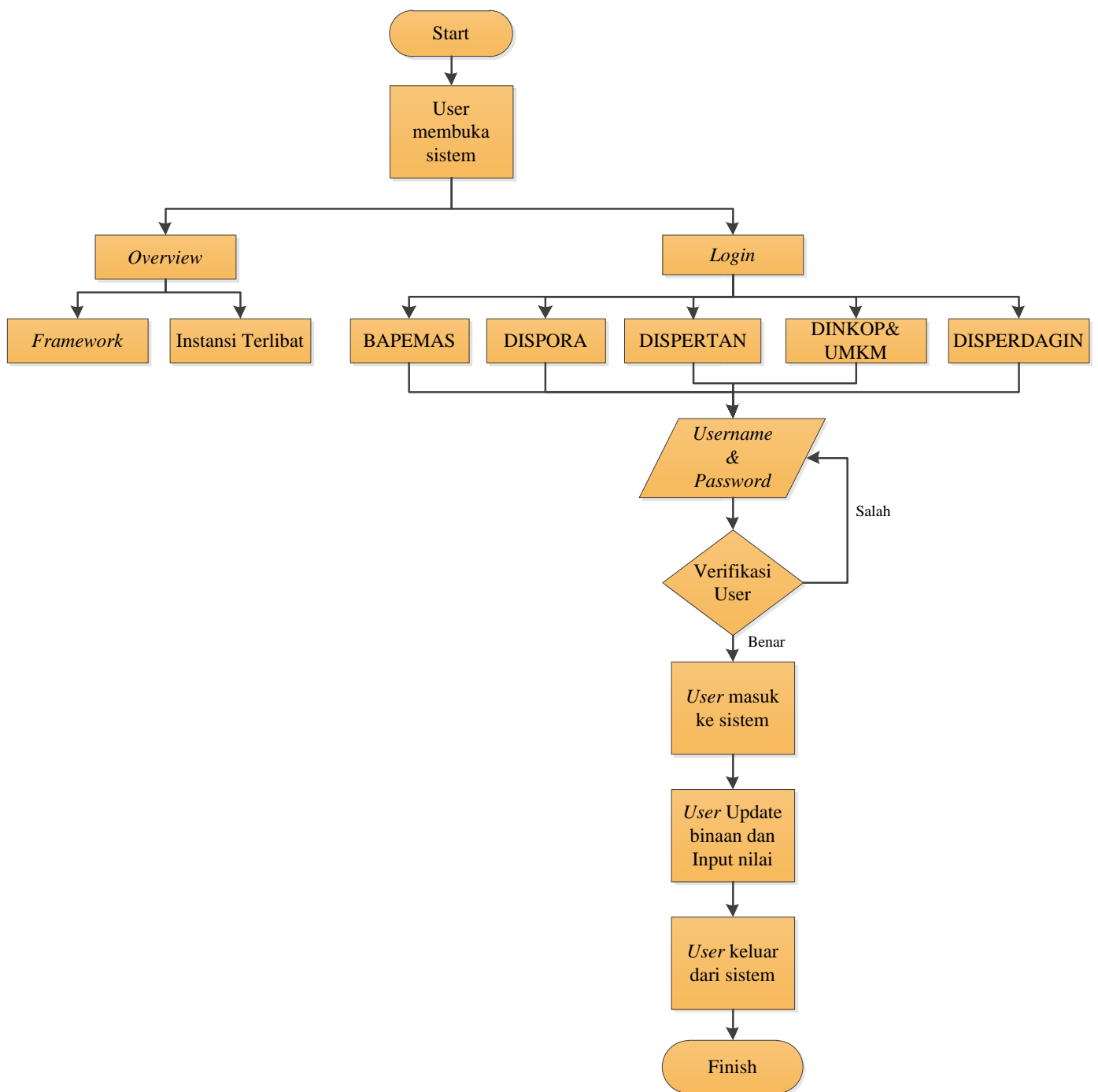
Batas yang ditetapkan berlaku untuk seluruh level. Adapun penentuan status pelaku usaha adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 31 Ketentuan Status Pelaku Usaha

Instansi Terkait	Pencapaian	Status
BAPEMAS	Merah	Tidak Lanjut
	Kuning	Tidak Lanjut
	Hijau	Lanjut
DISPORA	Merah	Tidak Lanjut
	Kuning	Tidak Lanjut
	Hijau	Lanjut
DISPERTAN	Merah	Tidak Lanjut
	Kuning	Tidak Lanjut
	Hijau	Lanjut
DINKOP&UMKM	Merah	Tidak Lanjut
	Kuning	Lanjut
	Hijau	Lanjut
DISPERDAGIN	Merah	Tidak Lanjut
	Kuning	Lulus
	Hijau	Lulus

4.3 Pembuatan *Spreadsheet Modelling*

Setelah dilakukan perancangan pengukuran kinerja, langkah selanjutnya yaitu merancang *Spreadsheet Modelling* pengukuran kinerja pelaku usaha dalam pembinaan berkelanjutan menggunakan *software Microsoft Excel*. *Spreadsheet Modelling* ini memberikan kemudahan bagi pihak – pihak yang terlibat pada masing – masing instansi untuk melakukan penilaian terhadap pelaku usaha yang berada dibawah binaannya, *Spreadsheet Modelling* memuat *overview* pembinaan berkelanjutan, konsep pengukuran pelaku usaha dalam pembinaan berkelanjutan, serta penilaian untuk tiap pelaku usaha menggunakan indikator yang telah dirancang sebelumnya. *Spreadsheet Modelling* dapat diakses oleh pelaku usaha dan *User* setiap instansi yang terlibat dengan *Username* dan *Password* yang telah ditentukan. Segala data – data yang telah diolah sebelumnya menjadi dasar dan input dalam perancangan *spreadsheet modelling* pengukuran kinerja pelaku usaha. Berikut adalah *flowchart spreadsheet modeling* untuk *User* dan pelaku usaha :



Gambar 4. 19 *Flowchart SpreadSheet Modelling*

SpreadSheet Modelling sistem pengukuran kinerja pelaku usaha terdiri dari 36 *Sheet* dengan rincian sebagai berikut :

- **HOME (*Sheet 1*)**

Terdiri dari dua menu, yaitu ***Overview*** dan ***Login***. Untuk membuka menu *overview* dan *login*, digunakan perintah *click* dengan kode program sebagai berikut

```
Private Sub CommandButton2_Click()  
Sheet9.Activate  
End Sub
```

```
Private Sub OVERVIEW_Click()  
Sheet8.Activate  
End Sub
```

- **OVERVIEW (*Sheet 8*)**

Terdiri dari dua menu, yaitu ***Framework*** dan ***Instansi terlibat***. Untuk membuka menu *framewrok* dan *Instansi terlibat*, digunakan perintah *click* dengan kode program sebagai berikut:

```
Private Sub CommandButton1_Click()  
Sheet10.Activate  
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton2_Click()  
Sheet16.Activate  
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton3_Click()  
Sheet1.Activate  
End Sub
```

CommandButton1 adalah icon menu *Framework*; *CommandButton2* adalah menu *Instansi Terlibat*; dan *CommandButton3* adalah icon menu *Back to Home*.

- **FRAMEWORK (*Sheet 10*)**

Memberikan in*Formasi* terkait konsep pengukuran kinerja yang digunakan dalam perancangan pengukuran kinerja pelaku usaha pada pembinaan berkelanjutan. Pada menu ini, pengguna dapat memilih untuk kembali ke *Overview* dengan *click* *Back to Overview*.

```
Private Sub CommandButton1_Click()  
Sheet8.Activate  
End Sub
```

- **INSTANSI TERKAIT (Sheet 16)**

Memberikan inFormasi mengenai instansi yang terlibat dalam pengukuran pelaku usaha, dan peran fungsi setiap instansi pada pembinaan berkelanjutan. Pada menu ini, pengguna dapat memilih untuk kembali ke Overview dengan *click* Back to Overview

```
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheet8.Activate
End Sub
```

- **LOGIN (Sheet 9)**

Menu *Login* dapat dijalankan dengan melakukan perintah *click* tombol *LOGIN* pada HOME(Sheet 1), dan tampilan akan berpindah ke *LOGIN* (Sheet9). Pada *LOGIN* (Sheet 9) terdapat 5 pilihan menu *login* untuk setiap instansi, yaitu BAPEMAS, DISPORA, DISPERTAN, DINKOP & UMKM, DISPERDAGIN. Untuk menuju menu *login* setiap instansi, dapat dilakukan dengan melakukan perintah *click* pada tombol sesuai instansi *User*.

```
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheet11.Activate
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton2_Click()
Sheet12.Activate
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton3_Click()
Sheet13.Activate
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton4_Click()
Sheet14.Activate
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton5_Click()
Sheet15.Activate
End Sub
```

CommandButton1 menunjukkan tombol untuk BAPEMAS, *CommandButton2* menunjukkan tombol untuk DISPORA, *CommandButton3* menunjukkan tombol untuk DISPERTAN, *CommandButton4* menunjukkan tombol untuk DINKOP & UMKM, SERTA *CommandButton5* menunjukkan tombol untuk

DISPERDAGIN. Dengan melakukan perintah *click* pada tombol yang telah dipaparkan, maka tampilan akan menuju pada *Sheet LOGIN* sesuai instansi yang dimaksud.

- **LOGIN BAPEMAS (Sheet 11)**

Pada *Sheet* ini terdapat entitas *Username* dan *Password* yang harus diisi dengan tepat dan melakukan perintah *click* pada tombol **Login**, sehingga tampilan akan secara otomatis menuju pada *Sheet Menu Login BAPEMAS*. Database *Username* dan *Password* akan dipaparkan pada Data *Login* BAPEMAS (*Sheet* 17). Jika *Username* dan *Password* tidak sesuai akan muncul *MessageBox* berisi “*Username* atau *Password* salah”. Kondisi tersebut didapatkan dengan kode program sebagai berikut :

```
Private Sub CommandButton1_Click()  
Dim c As Integer  
For c = 1 To 3  
    If Cells(8, 7) = Sheet17.Cells(1 + c, 3) And Cells(10, 7) = Sheet17.Cells(1 + c, 4) Then  
        Cells(8, 10) = "a"  
        Sheet30.Activate  
        Cells(8, 7) = ""  
        Cells(10, 7) = ""  
  
    Else  
        End If  
    Next  
    If Sheet11.Cells(8, 10) = "" Then  
        MsgBox ("Username atau Password salah")  
    End If  
End Sub
```

Selain menu *Login*, pada *Sheet LOGIN* BAPEMAS *User* juga dapat memilih menu Home untuk kembali ke *Sheet HOME* (*Sheet* 1), dengan kode program sebagai berikut :

```
Private Sub CommandButton2_Click()  
Sheet1.Activate  
End Sub
```

- **Data Login BAPEMAS (Sheet 17)**

Data *Login* BAPEMAS memberikan inFormasi mengenai database *Username* dan *Password* untuk *User* BAPEMAS. Berikut adalah database *User* BAPEMAS:

Nama Pendamping	Username	Password
RADIT	BAPEMAS1	123
AHMAD	BAPEMAS2	345
DANI	BAPEMAS3	567

- **Menu Login BAPEMAS (Sheet 30)**

Pada *Sheet Menu Login BAPEMAS (Sheet 30)* terdapat tiga pilihan menu, yaitu *Update Data Binaan*, *Input Penilaian*, dan *Logout*. Dengan melakukan perintah *click*, tampilan akan menuju pada *Sheet* yang dimaksud. Berikut adalah kode program yang digunakan :

```
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheet28.Activate
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton2_Click()
Sheet4.Activate
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton3_Click()
Sheet1.Activate
End Sub
```

CommandButton1 menunjukkan tombol *Update Data Binaan*; *CommandButton2* menunjukkan tombol *Input Penilaian*; *CommandButton3* menunjukkan tombol *Logout*.

- **Update Binaan BAPEMAS (Sheet 28)**

Pada *Sheet Update Binaan BAPEMAS* terdapat entitas Nama usaha, alamat, *Contact Person*, dan *Dibina Sejak* yang harus diisi. Untuk melakukan input data dapat dilakukan dengan memberi perintah *click* pada Menu *Submit*. Berikut kode program yang digunakan :

```

Dim x As Integer
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheet18.Cells(2 + x, 1) = x + 1
Sheet18.Cells(2 + x, 2) = Cells(9, 7)
Sheet4.Cells(1, 9) = Cells(9, 7)
Sheet18.Cells(2 + x, 3) = "BAPEMAS" & (x + 1)
Sheet18.Cells(2 + x, 4) = Cells(11, 7)
Sheet18.Cells(2 + x, 5) = Cells(13, 7)
Sheet18.Cells(2 + x, 6) = Cells(15, 7)
Sheet18.Cells(2 + x, 7) = ""

x = x + 1
Sheet18.Activate
Cells(9, 7) = ""
Cells(11, 7) = ""
Cells(13, 7) = ""
Cells(15, 7) = ""

'Cells(9, 6) = x
End Sub

```

Selain Menu Submit, pada *Sheet Update* Binaan BAPEMAS *User* juga dapat memilih Menu Back to Menu untuk kembali ke *Sheet Menu Login* BAPEMAS (*Sheet 30*), dengan kode program sebagai berikut :

```

Private Sub CommandButton2_Click()
Sheet30.Activate
End Sub

```

- **Binaan BAPEMAS (*Sheet 18*)**

Sheet Binaan BAPEMAS memberikan inFormasi mengenai hasil rekapan dari data yang di-inputkan oleh *User* pada *Sheet Update* Data Binaan BAPEMAS.

No	Nama Usaha	Kode Usaha	Alamat	Contact Person	Dibina sejak	Status	Score Akhir

Pada *Sheet* Binaan BAPEMAS juga terdapat menu Input Penilaian dan *Logout*. Menu input penilaian dapat ditampilkan dengan *click* pada tombol Menu Input Penilaian.

```
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheet4.Activate
End Sub
```

Menu *Logout* dapat ditampilkan dengan *click* pada tombol *Logout*.

```
Private Sub CommandButton2_Click()
Sheet1.Activate
End Sub
```

- **INPUT BAPEMAS (Sheet 4)**

Sheet Input BAPEMAS merupakan *Sheet* yang berisi indikator – indikator yang akan digunakan untuk menilai pelaku usaha. Pada *Sheet* ini telah dilengkapi dengan *Formulasi* perhitungan, sehingga *User* hanya perlu menginput nilai pencapaian kinerja pelaku usaha pada setiap indikator. Dan untuk mengetahui hasil kalkulasi, *User* harus *click* tombol Submit. Sedangkan hasil *score* akhir dan status dari pelaku usaha akan ditampilkan pada *Sheet* Binaan BAPEMAS(*Sheet* 18). Kode program yang digunakan adalah sebagai berikut :

```
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheet18.Cells(2 + x, 7) = Sheet4.Cells(16, 11)
Sheet18.Cells(2 + x, 8) = Sheet4.Cells(15, 11)

Sheet18.Activate
Cells(1, 9) = ""

For i = 3 To 14
Cells(i, 9) = ""
Next i
End Sub
```

Sheet 18.Cells(2 + x, 7) menunjukkan Status Pelaku Usaha ditampilkan pada *Sheet* 18 Cell baris ke-2 dan seterusnya, dan kolom ke 7.

Sheet 18.Cells(2 + x, 8) menunjukkan *Score* Pelaku Usaha ditampilkan pada *Sheet* 18 Cell baris ke-2 dan seterusnya, dan kolom ke 8.

- **LOGIN DISPORA (Sheet 12)**

Pada *Sheet* ini terdapat entitas *Username* dan *Password* yang harus diisi dengan tepat dan melakukan perintah *click* pada tombol **Login**, sehingga tampilan akan secara otomatis menuju pada *Sheet* **Menu Login DISPORA**. *Database*

Username dan *Password* akan dipaparkan pada Data *Login* DISPORA (*Sheet* 19). Jika *Username* dan *Password* tidak sesuai akan muncul *MessageBox* berisi “*Username* atau *Password* salah”. Kondisi tersebut didapatkan dengan kode program sebagai berikut :

```
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim c As Integer
For c = 1 To 3
    If Cells(8, 7) = Sheet19.Cells(1 + c, 3) And Cells(10, 7) = Sheet19.Cells(1 + c, 4) Then
        Cells(8, 10) = "a"
        Sheet31.Activate
        Cells(8, 7) = ""
        Cells(10, 7) = ""
    Else
        End If
    Next
    If Sheet12.Cells(8, 10) = "" Then
MsgBox ("Username atau Password salah")
End If
End Sub

Private Sub CommandButton2_Click()
Sheet1.Activate
End Sub
```

Selain menu *Login*, pada *Sheet LOGIN* DISPORA *User* juga dapat memilih menu Home untuk kembali ke *Sheet* HOME (*Sheet* 1), dengan kode program sebagai berikut :

```
Private Sub CommandButton2_Click()
Sheet1.Activate
End Sub
```

- **Data *Login* DISPORA (*Sheet* 19)**

Data *Login* DISPORA memberikan inFormasi mengenai *database Username* dan *Password* untuk *User* DISPORA. Berikut adalah *database User* DISPORA:

Nama Pendamping	<i>Username</i>	<i>Password</i>
KOKO	DISPORA1	123
LENO	DISPORA2	345
ROMI	DISPORA3	567

- **Menu *Login* DISPORA (*Sheet* 31)**

Pada *Sheet* Menu *Login* DISPORA (*Sheet* 31) terdapat tiga pilihan menu, yaitu *Update* Data Binaan, *Input* Penilaian, dan *Logout*. Dengan melakukan perintah *click*, tampilan akan menuju pada *Sheet* yang dimaksud. Berikut adalah kode program yang digunakan :

```
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheet32.Activate
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton2_Click()
Sheet5.Activate
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton3_Click()
Sheet1.Activate
End Sub
```

CommandButton1 menunjukkan tombol *Update Data Binaan*; *CommandButton2* menunjukkan tombol *Input Penilaian*; *CommandButton3* menunjukkan tombol *Logout*.

- **Update Binaan DISPORA (Sheet 32)**

Pada *Sheet Update Binaan DISPORA* terdapat entitas Nama usaha, alamat, *Contact Person*, dan *Dibina Sejak* yang harus diisi. Untuk melakukan input data dapat dilakukan dengan memberi perintah *click* pada Menu *Submit*. Berikut kode program yang digunakan :

```
Dim x As Integer
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheet20.Cells(2 + x, 1) = x + 1
Sheet20.Cells(2 + x, 2) = Cells(9, 7)
Sheet5.Cells(1, 9) = Cells(9, 7)
Sheet20.Cells(2 + x, 3) = "DISPORA" & (x + 1)
Sheet20.Cells(2 + x, 4) = Cells(11, 7)
Sheet20.Cells(2 + x, 5) = Cells(13, 7)
Sheet20.Cells(2 + x, 6) = Cells(15, 7)
Sheet20.Cells(2 + x, 7) = ""

x = x + 1
Sheet20.Activate
Cells(9, 7) = ""
Cells(11, 7) = ""
Cells(13, 7) = ""
Cells(15, 7) = ""

'Cells(9, 6) = x
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton2_Click()
Sheet31.Activate

End Sub
```

Selain Menu Submit, pada *Sheet Update* Binaan DISPORA *User* juga dapat memilih Menu Back to Menu untuk kembali ke *Sheet Menu Login* DISPORA (*Sheet 31*), dengan kode program sebagai berikut :

```
Private Sub CommandButton2_Click()
Sheet31.Activate

End Sub
```

- **Binaan DISPORA (*Sheet 20*)**

Sheet Binaan DISPORA memberikan inFormasi mengenai hasil rekapan dari data yang di-inputkan oleh *User* pada *Sheet Update* Data Binaan DISPORA.

No	Nama Usaha	Kode Usaha	Alamat	Contact Person	Dibina sejak	Status	Score Akhir

Pada *Sheet* Binaan DISPORA juga terdapat menu Input Penilaian dan *Logout*. Menu input penilaian dapat ditampilkan dengan *click* pada tombol Menu Input Penilaian.

```
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheet5.Activate
End Sub
```

Menu *Logout* dapat ditampilkan dengan *click* pada tombol *Logout*.

```
Private Sub CommandButton2_Click()
Sheet1.Activate
End Sub
```

- **Input DISPORA (*Sheet 5*)**

Sheet Input DISPORA merupakan *Sheet* yang berisi indikator – indikator yang akan digunakan untuk menilai pelaku usaha. Pada *Sheet* ini telah dilengkapi dengan *Formulasi* perhitungan, sehingga *User* hanya perlu menginput nilai pencapaian kinerja pelaku usaha pada setiap indikator. Dan untuk mengetahui hasil kalkulasi, *User* harus *click* tombol Submit. Sedangkan hasil *score* akhir

dan status dari pelaku usaha akan ditampilkan pada *Sheet* Binaan DISPORA(*Sheet* 20). Kode program yang digunakan adalah sebagai berikut :

```
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheet20.Cells(2 + x, 7) = Sheet5.Cells(21, 11)
Sheet20.Cells(2 + x, 8) = Sheet5.Cells(20, 11)

Sheet20.Activate
Cells(1, 9) = ""

For i = 3 To 19
Cells(i, 9) = ""
Next i
End Sub
```

Sheet 20.Cells(2 + x, 7) menunjukkan Status Pelaku Usaha ditampilkan pada *Sheet* 20 Cell baris ke-2 dan seterusnya, dan kolom ke 7.

Sheet 20.Cells(2 + x, 8) menunjukkan *Score* Pelaku Usaha ditampilkan pada *Sheet* 20 Cell baris ke-2 dan seterusnya, dan kolom ke 8.

- **LOGIN DISPERTAN (*Sheet* 13)**

Pada *Sheet* ini terdapat entitas *Username* dan *Password* yang harus diisi dengan tepat dan melakukan perintah *click* pada tombol *Login*, sehingga tampilan akan secara otomatis menuju pada *Sheet* Menu *Login* DISPERTAN. *Database Username* dan *Password* akan dipaparkan pada Data *Login* DISPERTAN (*Sheet* 22). Jika *Username* dan *Password* tidak sesuai akan muncul *MessageBox* berisi “*Username* atau *Password* salah”. Kondisi tersebut didapatkan dengan kode program sebagai berikut :

```
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim c As Integer
For c = 1 To 3
If Cells(8, 7) = Sheet25.Cells(1 + c, 3) And Cells(10, 7) = Sheet25.Cells(1 + c, 4) Then
Cells(8, 10) = "a"
Sheet26.Activate
Cells(8, 7) = ""
Cells(10, 7) = ""
Else
End If
Next
If Sheet15.Cells(8, 10) = "" Then
MsgBox ("Username atau Password salah")
End If
End Sub
```

Selain menu *Login*, pada *Sheet* LOGIN DISPERTAN *User* juga dapat memilih menu Home untuk kembali ke *Sheet* HOME (*Sheet* 1), dengan kode program sebagai berikut :

```
Private Sub CommandButton2_Click()
Sheet1.Activate
End Sub
```

- **Data Login DISPERTAN (Sheet 22)**

Data *Login* DISPERTAN memberikan inFormasi mengenai *database* *Username* dan *Password* untuk *User* DISPERTAN. Berikut adalah *database* *User* DISPERTAN:

Nama Pendamping	Username	Password
RAHMAT	DISPERTAN1	123
FANDI	DISPERTAN2	345
NURMAN	DISPERTAN3	567

- **Menu Login DISPERTAN (Sheet 33)**

Pada *Sheet* Menu *Login* DISPERTAN (*Sheet* 33) terdapat tiga pilihan menu, yaitu *Update* Data Binaan, *Input* Penilaian, dan *Logout*. Dengan melakukan perintah *click*, tampilan akan menuju pada *Sheet* yang dimaksud. Berikut adalah kode program yang digunakan :

```
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheet34.Activate
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton2_Click()
Sheet7.Activate
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton3_Click()
Sheet1.Activate
End Sub
```

CommandButton1 menunjukkan tombol *Update* Data Binaan; *CommandButton2* menunjukkan tombol *Input* Penilaian; *CommandButton3* menunjukkan tombol *Logout*.

- **Update Binaan DISPERTAN (Sheet 34)**

Pada *Sheet* *Update* Binaan DISPERTAN terdapat entitas Nama usaha, alamat, Contact Person, dan Dibina Sejak yang harus diisi. Untuk melakukan input data

dapat dilakukan dengan memberi perintah *click* pada Menu Submit. Berikut kode program yang digunakan :

```
Dim x As Integer
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheet21.Cells(2 + x, 1) = x + 1
Sheet21.Cells(2 + x, 2) = Cells(9, 7)
Sheet7.Cells(1, 9) = Cells(9, 7)
Sheet21.Cells(2 + x, 3) = "DISPERTAN" & (x + 1)
Sheet21.Cells(2 + x, 4) = Cells(11, 7)
Sheet21.Cells(2 + x, 5) = Cells(13, 7)
Sheet21.Cells(2 + x, 6) = Cells(15, 7)
Sheet21.Cells(2 + x, 7) = ""

x = x + 1
Sheet21.Activate
Cells(9, 7) = ""
Cells(11, 7) = ""
Cells(13, 7) = ""
Cells(15, 7) = ""

'Cells(9, 6) = x
End Sub

Private Sub CommandButton2_Click()
Sheet33.Activate

End Sub
```

Selain Menu Submit, pada *Sheet Update* Binaan DISPERTAN *User* juga dapat memilih Menu Back to Menu untuk kembali ke *Sheet Menu Login* DISPERTAN (*Sheet 33*), dengan kode program sebagai berikut :

```
Private Sub CommandButton2_Click()
Sheet33.Activate

End Sub
```

- **Binaan DISPERTAN (*Sheet 21*)**

Sheet Binaan DISPERTAN memberikan inFormasi mengenai hasil rekapan dari data yang di-inputkan oleh *User* pada *Sheet Update* Data Binaan DISPERTAN:

No	Nama Usaha	Kode Usaha	Alamat	Contact Person	Dibina sejak	Status	Score Akhir

Pada *Sheet* Binaan DISPERTAN juga terdapat menu Input Penilaian dan *Logout*. Menu input penilaian dapat ditampilkan dengan *click* pada tombol Menu Input Penilaian.

```
Private Sub CommandButton1_Click()
    Sheet7.Activate
End Sub
```

Menu *Logout* dapat ditampilkan dengan *click* pada tombol *Logout*.

```
Private Sub CommandButton2_Click()
    Sheet1.Activate
End Sub
```

- **Input DISPERTAN (*Sheet* 7)**

Sheet Input DISPERTAN merupakan *Sheet* yang berisi indikator – indikator yang akan digunakan untuk menilai pelaku usaha. Pada *Sheet* ini telah dilengkapi dengan *Formulasi* perhitungan, sehingga *User* hanya perlu menginput nilai pencapaian kinerja pelaku usaha pada setiap indikator. Dan untuk mengetahui hasil kalkulasi, *User* harus *click* tombol Submit. Sedangkan hasil *score* akhir dan status dari pelaku usaha akan ditampilkan pada *Sheet* Binaan DISPERTAN(*Sheet* 21). Kode program yang digunakan adalah sebagai berikut:

```
Private Sub CommandButton1_Click()
    Sheet21.Cells(2 + x, 7) = Sheet7.Cells(19, 11)
    Sheet21.Cells(2 + x, 8) = Sheet7.Cells(18, 11)

    Sheet21.Activate
    Cells(1, 9) = ""

    For i = 3 To 4
        Cells(i, 9) = ""
    Next i
    For i = 6 To 9
        Cells(i, 9) = ""
    Next i
    For i = 11 To 17
        Cells(i, 9) = ""
    Next i
End Sub
```

Sheet 21.Cells(2 + x, 7) menunjukkan Status Pelaku Usaha ditampilkan pada *Sheet* 21 Cell baris ke-2 dan seterusnya, dan kolom ke 7.

Sheet 21.Cells(2 + x, 8) menunjukkan *Score* Pelaku Usaha ditampilkan pada *Sheet 21* Cell baris ke-2 dan seterusnya, dan kolom ke 8

- **LOGIN DINKOP & UMKM (Sheet 14)**

Pada *Sheet* ini terdapat entitas *Username* dan *Password* yang harus diisi dengan tepat dan melakukan perintah *click* pada tombol *Login*, sehingga tampilan akan secara otomatis menuju pada *Sheet* Menu *Login* DINKOP & UMKM. *Database Username* dan *Password* akan dipaparkan pada Data *Login* DINKOP & UMKM (*Sheet 23*). Jika *Username* dan *Password* tidak sesuai akan muncul *MessageBox* berisi “*Username* atau *Password* salah”. Kondisi tersebut didapatkan dengan kode program sebagai berikut :

```
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim c As Integer
For c = 1 To 3
    If Cells(8, 7) = Sheet23.Cells(1 + c, 3) And Cells(10, 7) = Sheet23.Cells(1 + c, 4) Then
        Cells(8, 10) = "a"
        Sheet29.Activate
        Cells(8, 7) = ""
        Cells(10, 7) = ""
    Else
        End If
    Next
    If Sheet14.Cells(8, 10) = "" Then
        MsgBox ("Username atau Password salah")
    End If
End Sub
```

Selain menu *Login*, pada *Sheet LOGIN* DINKOP& UMKM *User* juga dapat memilih menu *Home* untuk kembali ke *Sheet* HOME (*Sheet 1*), dengan kode program sebagai berikut :

```
Private Sub CommandButton2_Click()
Sheet1.Activate
End Sub
```

- **Data Login DINKOP & UMKM (Sheet 23)**

Data *Login* DINKOP & UMKM memberikan inFormasi mengenai *database Username* dan *Password* untuk *User* DINKOP & UMKM. Berikut adalah *database User* DINKOP & UMKM:

Nama Pendamping	Username	Password
RAHMAT	DINKOP1	123
FANDI	DINKOP2	345
NURMAN	DINKOP3	567

- **Menu *Login* DINKOP & UMKM (Sheet 29)**

Pada *Sheet* Menu *Login* DINKOP & UMKM (*Sheet* 29) terdapat tiga pilihan menu, yaitu *Update* Data Binaan, Input Penilaian, dan *Logout*. Dengan melakukan perintah *click*, tampilan akan menuju pada *Sheet* yang dimaksud. Berikut adalah kode program yang digunakan :

```
Private Sub CommandButton1_Click()  
Sheet27.Activate
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton2_Click()  
Sheet3.Activate
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton3_Click()  
Sheet1.Activate
```

```
End Sub
```

CommandButton1 menunjukkan tombol *Update* Data Binaan; *CommandButton2* menunjukkan tombol Input Penilaian; *CommandButton3* menunjukkan tombol *Logout*.

- ***Update* Binaan DINKOP & UMKM (Sheet 27)**

Pada *Sheet Update* Binaan DINKOP & UMKM terdapat entitas Nama usaha, alamat, *Contact Person*, dan Dibina Sejak yang harus diisi. Untuk melakukan input data dapat dilakukan dengan memberi perintah *click* pada Menu Submit. Berikut kode program yang digunakan :

```

Dim x As Integer
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheet24.Cells(2 + x, 1) = x + 1
Sheet24.Cells(2 + x, 2) = Cells(9, 7)
Sheet3.Cells(1, 9) = Cells(9, 7)
Sheet24.Cells(2 + x, 3) = "DINKOP" & (x + 1)
Sheet24.Cells(2 + x, 4) = Cells(11, 7)
Sheet24.Cells(2 + x, 5) = Cells(13, 7)
Sheet24.Cells(2 + x, 6) = Cells(15, 7)
Sheet24.Cells(2 + x, 7) = ""

x = x + 1
Sheet24.Activate
Cells(9, 7) = ""
Cells(11, 7) = ""
Cells(13, 7) = ""
Cells(15, 7) = ""

'Cells(9, 6) = x
End Sub

```

- **Binaan DINKOP & UMKM (Sheet 24)**

Sheet Binaan DINKOP & UMKM, User juga dapat memilih Menu *Update*, Menu Input Penilaian, dan Menu *Logout*. Menu *Update* berfungsi untuk memperbaharui pelaku usaha binaan dari instansi yang membina di level sebelumnya. Menu *Update* didapatkan dengan kode program sebagai berikut :

```

Private Sub CommandButton3_Click()

Dim y As Integer
For u = 2 To 15
    Cells(u, 1) = ""
    Cells(u, 2) = ""
    Cells(u, 3) = ""
    Cells(u, 4) = ""
    Cells(u, 5) = ""
    Cells(u, 6) = ""
    Cells(u, 7) = ""
    Cells(u, 8) = ""
Next u

For i = 2 To 15
    If Sheet21.Cells(i, 7) = "LANJUT" Then
        y = y + 1
        Cells(y + 1, 1) = y
        Cells(y + 1, 2) = Sheet21.Cells(i, 2)
        Cells(y + 1, 3) = Sheet21.Cells(i, 3)
        Cells(y + 1, 4) = Sheet21.Cells(i, 4)
        Cells(y + 1, 5) = Sheet21.Cells(i, 5)
        Cells(y + 1, 6) = Sheet21.Cells(i, 6) + 1
    End If
Next i

For i = 2 To 15
    If Sheet18.Cells(i, 7) = "LANJUT" Then
        y = y + 1
        Cells(y + 1, 1) = y
        Cells(y + 1, 2) = Sheet18.Cells(i, 2)
        Cells(y + 1, 3) = Sheet18.Cells(i, 3)
        Cells(y + 1, 4) = Sheet18.Cells(i, 4)
        Cells(y + 1, 5) = Sheet18.Cells(i, 5)
        Cells(y + 1, 6) = Sheet18.Cells(i, 6) + 1
    End If
Next i

For i = 2 To 15
    If Sheet20.Cells(i, 7) = "LANJUT" Then
        y = y + 1
        Cells(y + 1, 1) = y
        Cells(y + 1, 2) = Sheet20.Cells(i, 2)
        Cells(y + 1, 3) = Sheet20.Cells(i, 3)
        Cells(y + 1, 4) = Sheet20.Cells(i, 4)
        Cells(y + 1, 5) = Sheet20.Cells(i, 5)
        Cells(y + 1, 6) = Sheet20.Cells(i, 6) + 1
    End If
Next i

End Sub

```

Menu Input Penilaian DINKOP&UMKM (*Sheet 3*) didapatkan dengan kode program sebagai berikut :

```
Private Sub CommandButton1_Click()  
Sheet3.Activate  
  
End Sub
```

Menu *Logout* didapatkan dengan kode program sebagai berikut :

```
Private Sub CommandButton2_Click()  
Sheet1.Activate  
  
End Sub
```

- **Input DINKOP & UMKM (*Sheet 3*)**

Sheet Input DINKOP & UMKM merupakan *Sheet* yang berisi indikator – indikator yang akan digunakan untuk menilai pelaku usaha. Pada *Sheet* ini telah dilengkapi dengan *Formulasi* perhitungan, sehingga *User* hanya perlu menginput nilai pencapaian kinerja pelaku usaha pada setiap indikator. Dan untuk mengetahui hasil kalkulasi, *User* harus click tombol Submit. Sedangkan hasil *score* akhir dan status dari pelaku usaha akan ditampilkan pada *Sheet* Binaan DINKOP & UMKM (*Sheet 24*). Kode program yang digunakan adalah sebagai berikut :

```

Private Sub CommandButton1_Click()
Sheet24.Cells(2 + x, 7) = Sheet3.Cells(37, 11)
Sheet24.Cells(2 + x, 8) = Sheet3.Cells(36, 11)

Sheet24.Activate
Cells(1, 9) = ""

For i = 3 To 4
Cells(i, 9) = ""
Next i
For i = 6 To 10
Cells(i, 9) = ""
Next i
For i = 12 To 14
Cells(i, 9) = ""
Next i
For i = 17 To 18
Cells(i, 9) = ""
Next i
For i = 20 To 35
Cells(i, 9) = ""
Next i
Cells(36, 10) = ""
Cells(37, 10) = ""

End Sub

```

Sheet 24.Cells(2 + x, 7) menunjukkan Status Pelaku Usaha ditampilkan pada *Sheet 24* Cell baris ke-2 dan seterusnya, dan kolom ke 7.

Sheet 24.Cells(2 + x, 8) menunjukkan *Score* Pelaku Usaha ditampilkan pada *Sheet 24* Cell baris ke-2 dan seterusnya, dan kolom ke 8.

- **LOGIN DISPERDAGIN (*Sheet 15*)**

Pada *Sheet* ini terdapat entitas *Username* dan *Password* yang harus diisi dengan tepat dan melakukan perintah *click* pada tombol *Login*, sehingga tampilan akan secara otomatis menuju pada *Sheet* Menu *Login* DISPERDAGIN. *Database Username* dan *Password* akan dipaparkan pada Data *Login* DISPERDAGIN (*Sheet 25*). Jika *Username* dan *Password* tidak sesuai akan muncul *MessageBox* berisi “*Username* atau *Password* salah”. Kondisi tersebut didapatkan dengan kode program sebagai berikut :

```

Private Sub CommandButton1_Click()
Dim c As Integer
For c = 1 To 3
    If Cells(8, 7) = Sheet25.Cells(1 + c, 3) And Cells(10, 7) = Sheet25.Cells(1 + c, 4) Then
        Cells(8, 10) = "a"
        Sheet26.Activate
        Cells(8, 7) = ""
        Cells(10, 7) = ""
    Else
        End If
    Next
    If Sheet15.Cells(8, 10) = "" Then
MsgBox ("Username atau Password salah")
    End If
End Sub

```

Selain menu *Login*, pada *Sheet LOGIN DISPERDAGIN User* juga dapat memilih menu Home untuk kembali ke *Sheet HOME (Sheet 1)*, dengan kode program sebagai berikut :

```

Private Sub CommandButton2_Click()
Sheet1.Activate
End Sub

```

- **Data Login DISPERDAGIN (Sheet 25)**

Data *Login DISPERDAGIN* memberikan inFormasi mengenai *database Username dan Password* untuk *User DISPERDAGIN*. Berikut adalah *database User DISPERDAGIN* :

Nama Pendamping	<i>Username</i>	<i>Password</i>
RANDY	DISPERDAGIN1	123
FAHMI	DISPERDAGIN2	345
DONI	DISPERDAGIN3	567

- **Menu Login DISPERDAGIN (Sheet 35)**

Pada *Sheet Menu Login DISPERDAGIN (Sheet 35)* terdapat tiga pilihan menu, yaitu *Update Data Binaan*, *Input Penilaian*, dan *Logout*. Dengan melakukan perintah *click*, tampilan akan menuju pada *Sheet* yang dimaksud. Berikut adalah kode program yang digunakan :


```
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheet27.Activate
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton2_Click()
Sheet3.Activate
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton3_Click()
Sheet1.Activate
End Sub
```

CommandButton1 menunjukkan tombol *Update* Data Binaan;
CommandButton2 menunjukkan tombol Input Penilaian; *CommandButton3*
menunjukkan tombol *Logout*.

- **Update Binaan DISPERDAGIN (Sheet 36)**

Pada *Sheet Update* Binaan DISPERDAGIN terdapat entitas Nama usaha, alamat, Contact Person, dan Dibina Sejak yang harus diisi. *Sheet* ini berfungsi untuk menambahkan pelaku usaha binaan diluar pembinaan berkelanjutan, yaitu pelaku usaha mandiri. Untuk melakukan input data dapat dilakukan dengan memberi perintah *click* pada Menu Submit. Berikut kode program yang digunakan :

```
Dim x As Integer
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheet24.Cells(2 + x, 1) = x + 1
Sheet24.Cells(2 + x, 2) = Cells(9, 7)
Sheet3.Cells(1, 9) = Cells(9, 7)
Sheet24.Cells(2 + x, 3) = "DINKOP" & (x + 1)
Sheet24.Cells(2 + x, 4) = Cells(11, 7)
Sheet24.Cells(2 + x, 5) = Cells(13, 7)
Sheet24.Cells(2 + x, 6) = Cells(15, 7)
Sheet24.Cells(2 + x, 7) = ""

x = x + 1
Sheet24.Activate
Cells(9, 7) = ""
Cells(11, 7) = ""
Cells(13, 7) = ""
Cells(15, 7) = ""

'Cells(9, 6) = x
End Sub
```

- **Binaan DISPERDAGIN (Sheet 26)**

Sheet Binaan DISPERDAGIN, User juga dapat memilih Menu *Update*, Menu Input Penilaian, dan Menu *Logout*. Menu *Update* berfungsi untuk memperbaharui pelaku usaha binaan dari instansi yang membina di level sebelumnya, yaitu DINKOP&UMKM. Menu *Update* didapatkan dengan kode program sebagai berikut :

```
Private Sub CommandButton3_Click()
    'If Not Sheet24.Cells(2, 7) = "Lanjut" Then
    'y = y + 1
    'End If
    Dim y As Integer
    For u = 2 To 15
        Cells(u, 1) = ""
        Cells(u, 2) = ""
        Cells(u, 3) = ""
        Cells(u, 4) = ""
        Cells(u, 5) = ""
    Next u

    For i = 2 To 15
        If Sheet24.Cells(i, 7) = "Lanjut" Then
            y = y + 1
            Cells(y + 1, 1) = y
            Cells(y + 1, 2) = Sheet24.Cells(i, 2)
            Cells(y + 1, 3) = Sheet24.Cells(i, 3)
            Cells(y + 1, 4) = Sheet24.Cells(i, 4)
            Cells(y + 1, 5) = Sheet24.Cells(i, 5)

            End If
        Next i

        'Cells(9, 2) = y
    End Sub
```

Menu Input Penilaian DISPERDAGIN (Sheet 2) didapatkan dengan kode program sebagai berikut :

```
Private Sub CommandButton1_Click()
    Sheet2.Activate
End Sub
```

Menu *Logout* didapatkan dengan kode program sebagai berikut :

```
Private Sub CommandButton2_Click()
    Sheet1.Activate

End Sub
```

Berikut adalah tampilan hasil rekapan dari data yang di-inputkan oleh *User* pada *Sheet Update* Data Binaan DISPERDAGIN, serta hasil Menu *Update* dari DINKOP & UMKM:

No	Nama Usaha	Kode Usaha	Alamat	Contact Person	Dibina sejak	Status	Score Akhir

- **Input DISPERDAGIN (*Sheet 2*)**

Sheet Input DISPERDAGIN merupakan *Sheet* yang berisi indikator – indikator yang akan digunakan untuk menilai pelaku usaha. Pada *Sheet* ini telah dilengkapi dengan *Formulasi* perhitungan, sehingga *User* hanya perlu menginput nilai pencapaian kinerja pelaku usaha pada setiap indikator. Dan untuk mengetahui hasil kalkulasi, *User* harus click tombol Submit. Sedangkan hasil *score* akhir dan status dari pelaku usaha akan ditampilkan pada *Sheet* Binaan DISPERDAGIN (*Sheet 26*). Kode program yang digunakan adalah sebagai berikut :

```

Private Sub CommandButton1_Click()
Sheet26.Cells(2 + x, 7) = Sheet2.Cells(43, 11)
Sheet26.Cells(2 + x, 8) = Sheet2.Cells(42, 11)

Sheet26.Activate
Cells(1, 9) = ""

For i = 3 To 9
Cells(i, 9) = ""
Next i
For i = 10 To 17
Cells(i, 9) = ""
Next i
For i = 17 To 20
Cells(i, 9) = ""
Next i
For i = 22 To 26
Cells(i, 9) = ""
Next i
For i = 28 To 29
Cells(i, 9) = ""
Next i
Cells(42, 10) = ""
Cells(43, 10) = ""

End Sub

```

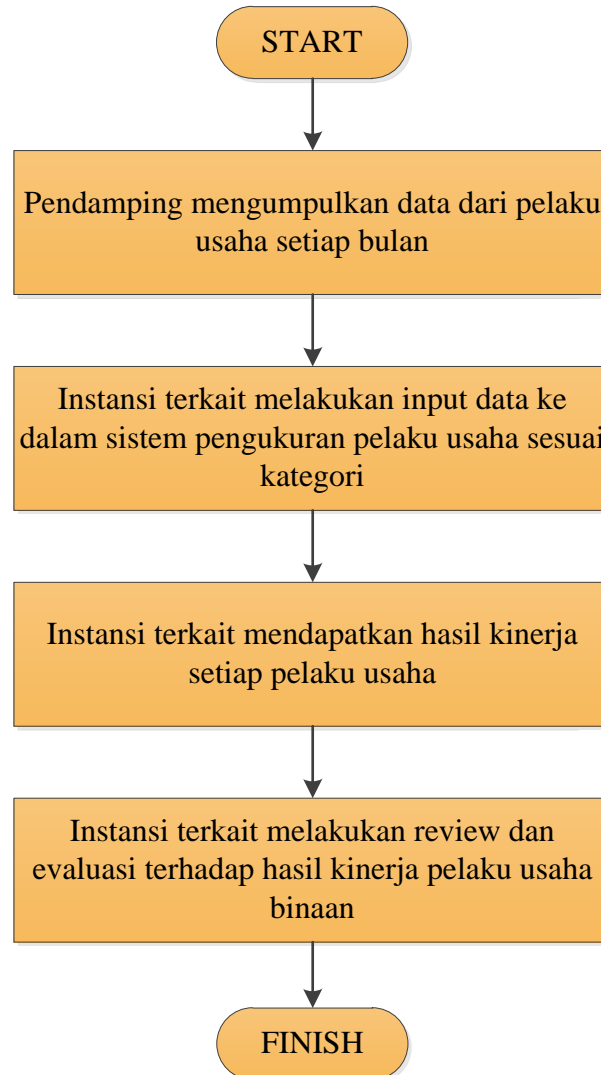
Sheet 26.Cells(2 + x, 7) menunjukkan Status Pelaku Usaha ditampilkan pada *Sheet 26* Cell baris ke-2 dan seterusnya, dan kolom ke 7.

Sheet 26.Cells(2 + x, 8) menunjukkan *Score* Pelaku Usaha ditampilkan pada *Sheet 26* Cell baris ke-2 dan seterusnya, dan kolom ke 8.

4.4 Pembuatan Petunjuk Teknis

Sistem pengukuran kinerja pelaku usaha dalam pembinaan berkelanjutan, melibatkan banyak pihak dalam implementasinya. Selain itu, dalam setiap instansi yang terlibat pasti terjadi pergantian pegawai. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam implementasi, akan dirancang petunjuk teknis implementasi sistem pengukuran kinerja pelaku usaha dalam pembinaan berkelanjutan. Petunjuk teknis ini terdiri dari serangkaian aktivitas yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja pelaku usaha dalam pembinaan berkelanjutan.

Secara umum, petunjuk implementasi pengukuran kinerja digambarkan pada Gambar 4.20



Gambar 4. 20 Alur Penggunaan Sistem pengukuran Kinerja Pelaku Usaha pada Pembinaan Berkelanjutan

Sistem dapat diakses oleh pelaku usaha dan *User* dari masing – masing instansi yang terlibat. Berikut adalah detail langkah – langkah petunjuk teknis implementasi sistem:

1. Pendamping mengumpulkan data dengan menggunakan *Form* yang telah disediakan. Terdapat dua jenis *Form*, yaitu *Form* 1 yang berfungsi untuk melakukan pendataan awal pelaku usaha binaan. Dan *Form* 2 yang digunakan untuk melakukan penilaian pelaku usaha. Ketentuan penggunaan *Form* adalah sebagai berikut :
 - Pendamping BAPEMAS menggunakan *Form* A
 - Pendamping DISPORA menggunakan *Form* B

- Pendamping DISPERTAN menggunakan *Form C*
- Pendamping DINKOP&UMKM menggunakan *Form D*
- Pendamping DISPERDAGIN menggunakan *Form E*

Form dapat dilihat pada Lampiran 3.

2. Pilih **Login** atau **Overview**.

Login hanya bisa dilakukan oleh *User* setiap instansi yang terlibat. Sedangkan pelaku usaha hanya dapat mengakses sistem terbatas hingga menu *overview* saja.

3. **Overview** terdiri dari dua sub-menu yaitu **Framework** dan **Instansi Terlibat**.

Sub-menu **Framework** berfungsi untuk memberikan *inFormasi* mengenai alur pembinaan pelaku usaha berkelanjutan, serta konsep pengukuran kinerja pelaku usaha dalam pembinaan berkelanjutan. *Framework* ditampilkan pada *Sheet 10*. Sub-menu **Instansi Terlibat** berfungsi untuk memberikan *inFormasi* mengenai instansi yang terlibat dalam pembinaan berkelanjutan, serta peranannya dalam melakukan pembinaan berkelanjutan. *Instansi terlibat* ditampilkan pada *Sheet 16*. Seluruh menu dapat diakses dengan click pada menu yang diinginkan.

4. **Login** adalah menu yang hanya bisa diakses oleh *User* *Instansi*, dimana *User* hanya dapat mengakses instansinya saja, dan tidak dapat lintas instansi. *Login* dilakukan dengan mengisi *Username* dan *Password* yang telah dimiliki oleh masing – masing instansi, disesuaikan dengan *User* setiap instansi.

Username dan *Password* yang dimasukkan harus benar, karena jika *Username* dan *Password* salah, maka *User* tidak dapat masuk ke dalam sistem. *Username* dan *Password* untuk setiap instansi dapat dilihat sesuai *Sheet* berikut :

Data *Login* BAPEMAS (*Sheet 17*)

Data *Login* DISPORA (*Sheet 19*)

Data *Login* DISPERTAN (*Sheet 22*)

Data *Login* DINKOP & UMKM (*Sheet 23*)

Data *Login* DISPERDAGIN (*Sheet 25*)

Setelah *Login*, *User* masuk ke **Menu Login Instansi**. Contoh *Login User* BAPEMAS. Data *Username* dan *Password* yang digunakan dapat dilihat pada

Data Login BAPEMAS (Sheet 17). Selanjutnya *User* akan masuk ke Sheet **Menu Login Instansi**.

5. Pada Sheet **Menu Login Instansi**, *User* dapat memilih menu **Update Data Binaan, Input Penilaian** atau **Logout**.
6. **Update Data Binaan** digunakan untuk membuat *database* pelaku usaha binaan instansi. Data yang dimasukkan antara lain, Nama Usaha, Alamat, Pemilik Usaha, Tahun mulai pembinaan. Data yang dimasukkan didapatkan dari pengumpulan data yang telah dilakukan oleh pendamping menggunakan **Form 1**. Data yang diinputkan, akan direkap menjadi *database* **Binaan Instansi**.
7. **Input Penilaian** digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap pelaku usaha yang dibina. Data yang dimasukkan didapatkan dari pengumpulan data yang telah dilakukan oleh pendamping menggunakan *Form 2*, yaitu *Form Penilaian Pelaku Usaha*. *User* menginput data pada kolom “**Actual**”
8. Pada **Sheet Input Penilaian**, *Click Submit* untuk mendapatkan hasil perhitungan pengukuran kinerja pelaku usaha. Hasil pengukuran akan secara otomatis ditampilkan pada Sheet **Binaan Instansi** terkait. Selain **score** akhir hasil pengukuran, juga akan ditampilkan **status** pelaku usaha setelah mendapat pembinaan. Status menunjukkan keputusan apakah pelaku usaha dapat melanjutkan untuk mendapat pembinaan dari instansi selanjutnya ataukah masih tetap harus menjadi sasaran binaan instansi saat ini.
9. **Logout** akan membawa *User* kembali ke menu awal instansi.
10. Pada DINKOP & UMKM serta DISPERDAGIN, terdapat tambahan menu khusus yaitu **Update**. Menu **Update**, berfungsi untuk melakukan pembaharuan informasi *database* binaan. Hal ini karena DINKOP & UMKM bisa mendapatkan input pelaku usaha untuk dibina dari instansi sebelumnya, yaitu BAPEMAS, DISPORA, DAN DISPERTAN. Sedangkan DISPERDAGIN bisa mendapatkan input pelaku usaha untuk dibina dari DINKOP & UMKM. Pelaku usaha yang dapat melanjutkan pembinaan ke level selanjutnya, harus mencapai batas *score* yang telah ditentukan dan berstatus “Lanjut”.
11. Hasil penilaian serta **Update** pelaku usaha binaan, dapat dilihat pada Sheet Binaan Instansi dengan keterangan sebagai berikut:
Binaan BAPEMAS (Sheet 18)

Binaan DISPORA (*Sheet 20*)

Binaan DISPERTAN (*Sheet 21*)

Binaan DINKOP & UMKM (*Sheet 24*)

Binaan DISPERDAGIN (*Sheet 26*)

Hasil pengukuran dapat menunjukkan kinerja pelaku usaha setelah mendapatkan pembinaan. Serta dapat digunakan sebagai input dalam melakukan evaluasi kinerja pelaku usaha serta menjadi bahan dalam melakukan perbaikan pembinaan.

BAB 5

ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai analisis dari tahapan-tahapan dalam proses perancangan pengukuran kinerja pelaku usaha dalam pembinaan berkelanjutan. Analisis dilakukan meliputi analisis pengembangan *framework* pengukuran kinerja, dan analisis *spreadsheet modeling*.

5.1 Analisis *Framework* Pengukuran Kinerja Pelaku Usaha dengan IPMS

Pengukuran kinerja pelaku usaha pada pembinaan berkelanjutan dirancang menggunakan *framework Integrated Performance Measurement System* (IPMS). *framework Integrated Performance Measurement System* (IPMS) digunakan dalam penelitian ini, karena beberapa alasan. Pertama, pada penelitian ini pembinaan pelaku usaha berkelanjutan dilakukan secara berjenjang, yang dapat digambarkan dalam empat level melalui instansi yang mengintervensi sesuai dengan *framework* IPMS. Kedua, sasaran yang diukur terdiri dari tiga kategori yang berbeda, yaitu pelaku usaha kategori PMKS, pelaku usaha kategori pemuda, dan pelaku usaha kategori sektor pertanian yang fokus untuk mencapai daya saing unggul dan mandiri sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga, dibutuhkan *framework* pengukuran kinerja yang mampu mengintegrasikan seluruh elemen yang terlibat secara vertikal dan horizontal. Dalam penelitian ini, elemen secara vertikal adalah instansi yang terlibat dalam pembinaan berkelanjutan yang berjenjang, dan elemen horizontal adalah proses pembinaan dari keempat sasaran, untuk mencapai tujuan penciptaan pelaku usaha yang menjadi intervensi pemerintah yang unggul dan mandiri. Ketiga, yang menjadi landasan bahwa *framework* IPMS sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah sasaran yang diukur yaitu pelaku usaha tidak memiliki visi, misi, dan strategi dalam menjalankan usahanya sehingga dalam perancangan indikator kinerja didasarkan pada *stakeholder requirement* instansi yang mengintervensi. Hal ini sesuai dengan salah satu tahapan dalam *framework* IPMS.

Dengan dilakukan perancangan pengukuran kinerja pelaku usaha dalam pembinaan berkelanjutan, diharapkan mampu mendukung terciptanya pelaku usaha

yang mandiri dan berdaya saing. Hal ini karena beberapa alasan, pertama dengan adanya pengukuran kinerja pelaku usaha ini, seluruh instansi yang terlibat dalam pembinaan berkelanjutan dapat mengetahui dan menilai status pelaku usaha yang sedang mendapatkan pembinaan secara berjenjang. Kedua, instansi yang terlibat juga mampu memonitor dan melakukan evaluasi kinerja pelaku usaha setelah mendapatkan pembinaan. Ketiga, karena pengukuran kinerja pelaku usaha dalam pembinaan berkelanjutan ini dirancang dengan memperhatikan integrasi antar level, maka hasil yang didapatkan dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan akhir dilakukannya pembinaan berkelanjutan.

Untuk dapat mengoptimalkan fungsi rancangan pengukuran kinerja ini, dibutuhkan koordinasi yang baik antara instansi terlibat dengan pelaku usaha. Instansi terlibat harus memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, terkait indikator kinerja yang akan digunakan. Sehingga, pelaku usaha termotivasi untuk terus meningkatkan kinerjanya

Terdapat sepuluh tahapan dalam perancangan pengukuran kinerja dengan *framework* IPMS, yaitu identifikasi level bisnis, identifikasi *stakeholder* dan *stakeholder requirement*, *external monitor*, *set objective*, penetapan *performance indicators*, penyusunan *performance indicator properties*, *scoring system*, dan *traffic light system*. Masing – masing tahapan dijelaskan dalam sub bab berikut :

5.1.1 Identifikasi Level Bisnis

Identifikasi level bisnis dilakukan berdasarkan alur pembinaan berkelanjutan. Level bisnis terdiri dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berperan untuk memastikan bahwa pelaku usaha binaan mampu memiliki kemandirian dan daya saing. Level Bisnis Unit terdiri dari Dinas Koperasi & UMKM yang berperan dalam memberikan pembinaan tingkat lanjut setelah mendapatkan pembinaan dari Badan PEmberdayaan Masyarakat, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pertanian yang berada pada level bisnis unit. Pada level aktivitas, terdiri dari kategori pelaku usaha yang menjadi sasaran binaan yang akan diukur, yaitu pelaku usaha kategori PMKS, pemuda, dan usaha sektor pertanian.

5.1.2 Identifikasi Stakeholder dan Stakeholder Requirement

Identifikasi stakeholder dan stakeholder requirement dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap seluruh stakeholder yang terlibat dalam melakukan pembinaan pada masing – masing kategori pelaku usaha. Selanjutnya, dilakukan pemilihan key stakeholder berdasarkan wawasan terkait kebijakan dan peraturan, pengalaman di program/kegiatan terkait, serta peran dan fungsi dalam pelaksanaan program/kegiatan terkait pembinaan pelaku usaha berkelanjutan. dilakukan pemilihan key stakeholder untuk memastikan bahwa indikator yang nantinya dirancang, akan sesuai dengan tujuan dilakukan pembinaan pelaku usaha berkelanjutan.

Penyusunan stakeholder requirement didasarkan pada key stakeholder yang kemudian juga divalidasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Kota menjadi key stakeholder pada seluruh level karena peranannya sebagai perencana dan evaluator terhadap instansi yang terlibat dalam pembinaan pelaku usaha berkelanjutan.

5.1.3 External Monitor

External Monitor Benchmarking dilakukan terhadap penyusunan indikator daya saing UMKM yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) karena memiliki tujuan dan sasaran yang sama. Dari hasil benchmarking, didapatkan input masukan untuk penyusunan indikator.

5.1.4 Set Objective

Set objective merupakan hasil transformasi dari *stakeholder requirement*. *Set objective* dilakukan untuk mengetahui tujuan yang harus dicapai oleh pelaku usaha di setiap level. Sehingga, dapat diturunkan menjadi indikator. Dalam penentuan objective, terdapat beberapa *stakeholder requirement* yang memiliki *objective* yang sama sehingga dapat digabungkan untuk kemudian diukur kinerjanya dengan indikator yang sama.

5.1.5 Penetapan *Performance Indicators*

Indikator kinerja diperoleh melalui kajian literatur dan *brainstorming* dengan ahli, yaitu *key stakeholder*. Selanjutnya, indikator kinerja yang telah didapatkan, dikategorikan menjadi kriteria yang lebih umum. Adapun kriteria tersebut, didapatkan dari *framework* Input – Proses – Output.

Indikator kinerja dibuat untuk setiap level dan saling terkait antar level. Selain memperhatikan stakeholder requirement, Indikator disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan antar level untuk menjamin ketercapaian tujuan. Sehingga, indikator disusun dari level yang paling atas, yaitu level bisnis dan kemudian diturunkan ke level dibawahnya. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan tingkat kompleksitas, dan ruang lingkup indikator kinerja yang telah disusun. Pelaku usaha harus diukur dengan indikator yang lebih detail pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di level bisnis. Sedangkan pada level bisnis unit, Dinas Koperasi & UMKM ditetapkan indikator yang lebih global, dengan pertimbangan penurunan dari indikator pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini juga berlaku pada level bisnis proses, yang juga memperhatikan indikator pada Dinas Koperasi & UMKM. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa antar level tetap saling terkait sehingga tujuan akhir pembinaan berkelanjutan untuk menciptakan pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing dapat tercapai.

Selain memperhatikan keterkaitan antar level, juga diperhatikan penyusunan indikator pada setiap level. Penyusunan indikator yang didasarkan pada stakeholder requirement harus disesuaikan dengan peran dan fungsi setiap instansi. Hal ini terlihat dari adanya kriteria yang sama di level yang sama, yaitu pada level bisnis proses terdapat kriteria SDM, produktivitas, produk, pasar, dan mitra usaha. Kecuali pada Dinas Pertanian terdapat tambahan kriteria Material karena karakter sasaran pelaku usaha yang diukur pada Dinas Pertanian memang khusus untuk pelaku usaha di sektor pertanian yang mana, salah satu kriteria yang harus diperhatikan adalah material.

5.1.6 Penyusunan *Performance Indicator Properties*

Performance Indicator properties bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan indikator kinerja, sehingga diharapkan pihak lain dapat memahami maksud dan tujuan indikator kinerja tersebut, mengetahui cara mengukur masing-masing indikator, dan juga mengetahui siapa saja pihak yang terlibat di indikator tersebut. *Performance Indicator properties* bertujuan untuk memberikan persepsi yang sama pada seluruh user dari instansi terkait agar tidak terjadi perbedaan interpretasi.

Performance Indicator terdiri dari informasi berikut :

12. Indikator

Ukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelaku usaha

13. Target

Sebuah nilai atau kondisi yang harus dicapai oleh pelaku usaha

14. Tujuan

Informasi mengenai tujuan adanya indikator kinerja

15. Formula pengukuran

Menunjukkan bagaimana cara mengukur pencapaian indikator kinerja

16. Satuan

Informasi mengenai satuan apa yang digunakan dalam menunjukkan hasil pengukuran/ pencapaian kinerja

17. Frekuensi Pengukuran

Memberikan informasi mengenai frekuensi pengukuran indikator dalam satuan waktu

18. Frekuensi Review

Memberikan informasi mengenai frekuensi review/ pembahasan hasil pengukuran indikator dalam satuan waktu

19. Pihak yang mengukur

Memberikan informasi siapa pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pengukuran indikator

20. Sumber data

Memberikan informasi sumber data yang akan digunakan dalam melakukan pengukuran indikator kinerja

21. Pemilik KPI

Memberikan informasi mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator

22. Sifat Target

Memberikan informasi terkait sifat target setiap indikator, yang akan mempengaruhi formula pengukuran indikator.

5.2 Analisis *Spreadsheet Modelling*

Pembahasan mengenai spreadsheet modeling akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis konsep dan *interface*, serta uji coba penggunaan *spreadsheet modeling*.

5.2.1 Analisis Konsep dan Interface Spreadsheet Modelling

Spreadsheet modelling dirancang untuk membantu pihak terkait dalam melakukan pengukuran kinerja pelaku usaha binaan. Dengan *spreadsheet modelling*, data pencapaian yang diinputkan akan terakumulasi secara otomatis dan menghasilkan nilai akhir serta status pelaku usaha.

Berikut adalah hasil perancangan *spreadsheet modelling* untuk sistem pengukuran kinerja pelaku usaha dalam pembinaan berkelanjutan:



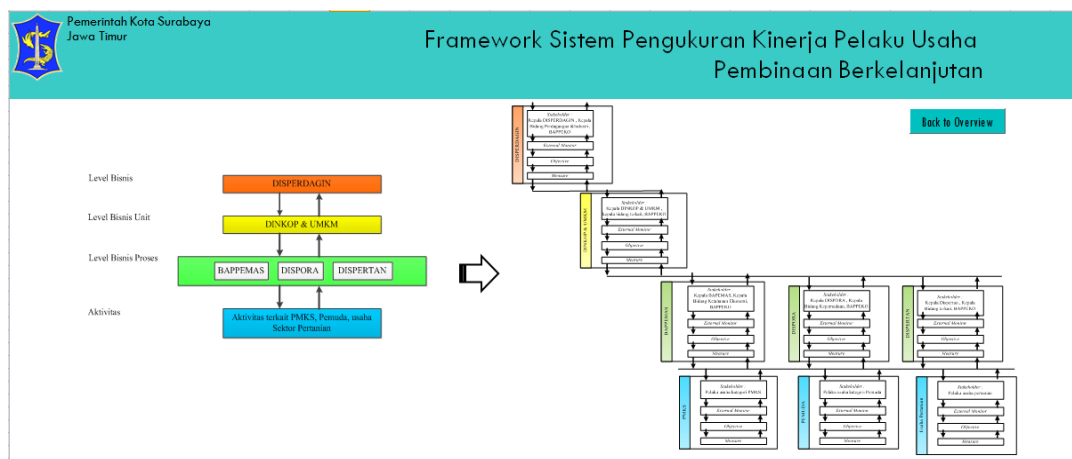
Gambar 5. 1 Tampilan *Home Spreadsheet Modelling*

Pada tampilan awal, *User* dapat memilih untuk *login* atau hanya melihat *overview*. Jika memilih *Overview*, tampilannya akan seperti gambar berikut :

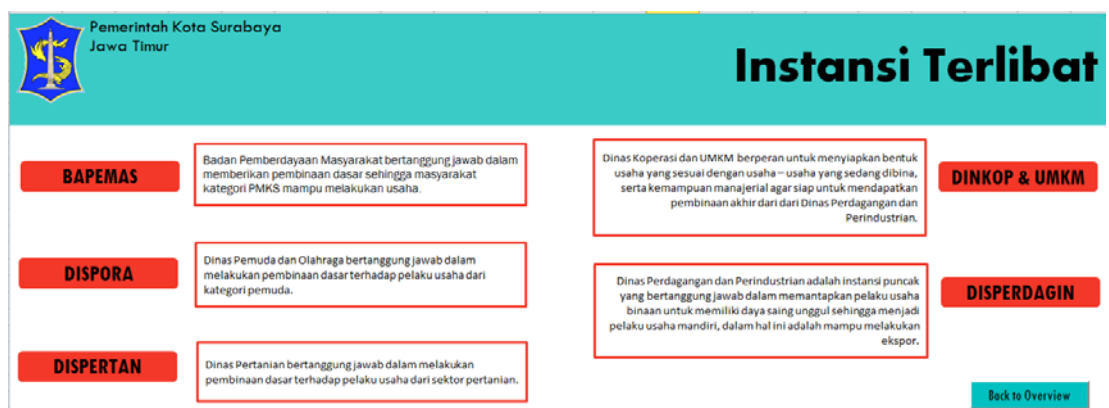


Gambar 5. 2 Tampilan Menu *Overview*

Pada *overview*, terdapat dua pilihan menu yaitu *Framework* dan *Instansi Terlibat*. Gambar 5.3 menunjukkan tampilan *overview* Menu *Framework*. Gambar 5.4 menunjukkan *overview* Menu *Instansi Terlibat*.

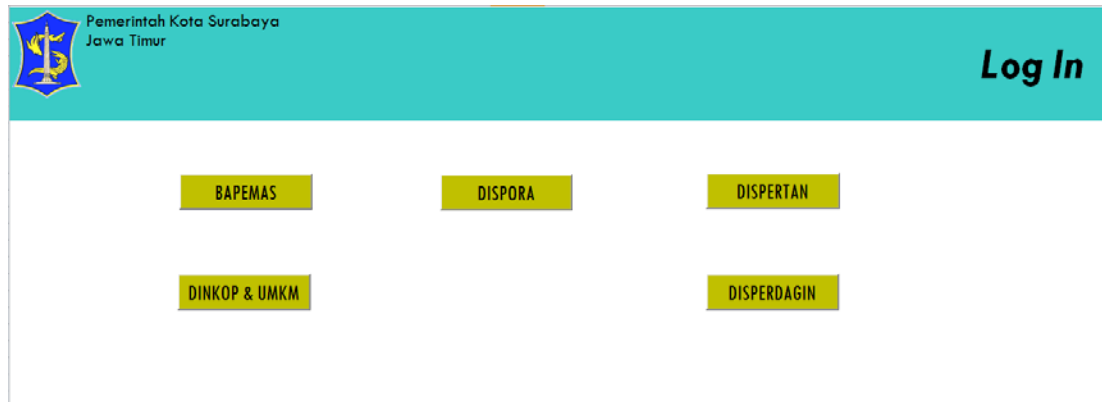


Gambar 5. 3 Tampilan *Framework* IPMS pada *Spreadsheet Modelling*

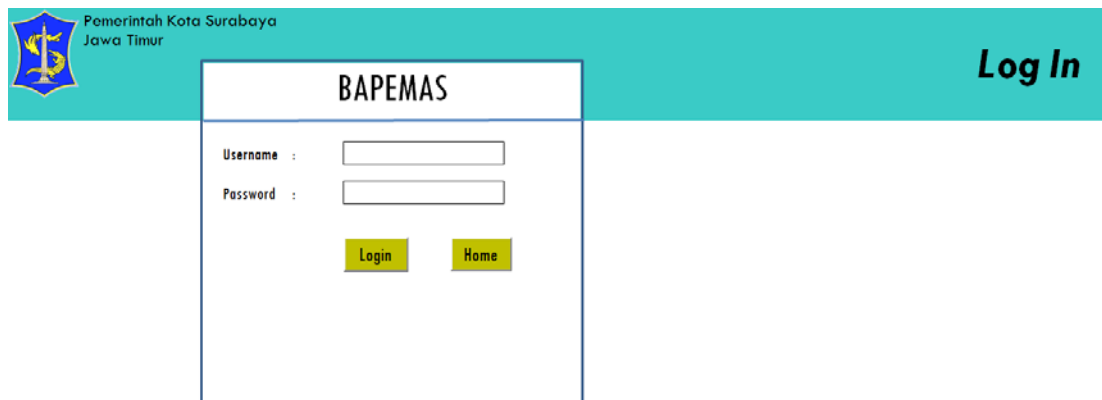


Gambar 5. 4 Tampilan Menu *Instansi Terlibat* pada *Spreadsheet Modelling*

Sedangkan pada menu Login, hanya bisa diakses oleh *User* setiap instansi. *User* harus terlebih dahulu memilih asal instansinya. Selanjutnya, tampilan menu Login ditampilkan pada Gambar 5.6. Untuk dapat mengakses Menu Login, *User* harus menginput *Username* dan *Password* seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.7.

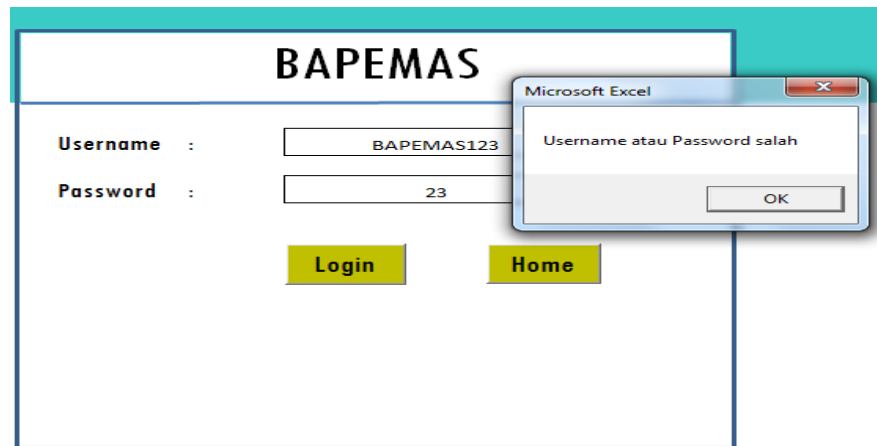


Gambar 5. 5 Tampilan Pilihan Instansi Sebelum Login



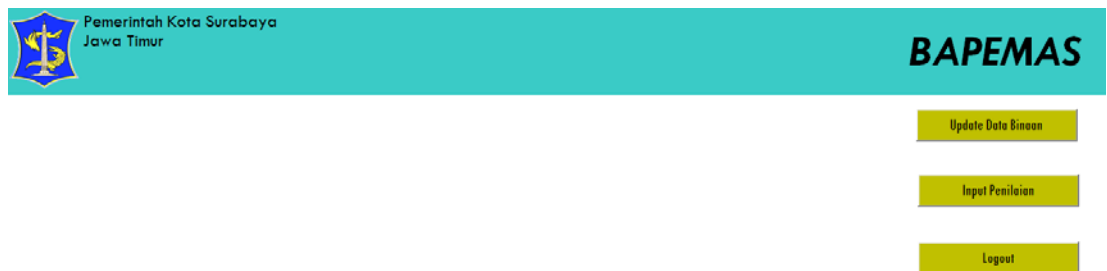
Gambar 5. 6 Contoh Tampilan Menu Login Instansi

Selanjutnya, jika *Username* dan *password* yang diinput oleh *User* tidak tepat akan muncul tampilan sebagai berikut :



Gambar 5. 7 Tampilan Jika *Username* dan *Password* Tidak Sesuai

Jika *Username* dan *Password* sudah tepat, *User* akan masuk ke sistem dan ditampilkan tampilan Gambar 5.8 sebagai berikut :



Gambar 5. 8 Tampilan Menu Instansi Setelah Login

Jika *User* memilih Menu *Update* Data Binaan, *User* akan masuk ke tampilan Gambar 5.9 untuk melakukan *Update* data binaan pelaku usaha. Data yang diinputkan, didapat dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh pendamping dengan *Form* 1.

Pemerintah Kota Surabaya
Jawa Timur

Update Binaan BAPEMAS

Nama Usaha :

Alamat :

Contact Person : *Nama - No Hp

Dibina Sejak : * Tanggal - Bulan - Tahun

Submit
Back to Menu

Gambar 5. 9 Tampilan Menu *Update* Binaan Instansi

Hasil data yang diinputkan, akan secara otomatis memiliki kode khusus dan masuk dalam rekapitulasi dalam Data Binaan instansi seperti yang terlihat pada Gambar 5.10.

No	Nama Usaha	Kode Usaha	Alamat	Contact Person	Dibina sejak	Status	Score Akhir
1	LOUNDRY	BAPEMAS1				LANJUT	0

Input Penilaian

LOGOUT

Gambar 5. 10 Rekapitulasi Database Binaan dan Hasil Pengukuran

KRITERIA	BOBOT	KODE	INDIKATOR	BOBOT	BOBOT GLOBAL	TARGET	SCORING SYSTEM	Pencapaian	score	weighted score
Sumber Daya Manusia	0.413	B1	jumlah pelatihan yang pernah diikuti	0.143	0.059059	1	Higher is better		0.00	0
		B2	jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan hasil usaha ekonomi makro yang pernah diikuti	0.857	0.353941	1	Higher is better		0.00	0
		B3	Ada / tidaknya kegiatan produksi dilakukan secara rutin setiap bulan	0.088	0.035024	1	0 - 1		0.00	0
		B4	Adanya pembagian pekerjaan antar tenaga kerja	0.669	0.266262	1	0 - 1		0.00	0
		B5	Adanya penggunaan teknologi sederhana/manual/semi otomatis/otomatis) dalam proses produksi	0.2344	0.0932912	1	Higher is better		0.00	0
			Keterangan = 3 :Teknologi otomatis, 2: Teknologi semiotomatis, 1: Teknologi manual, 0 :Tidak ada penggunaan teknologi							
Produk	0.078	B6	Adanya kemasan produk	1	0.078	1	0 - 1		0.00	0
		B7	tercapai/tidaknya <i>Break Even Point</i>	0.2	0.0114	1	0 - 1		0.00	0
Pasar	0.057	B8	Adanya pendapatan yang kontinyu	0.8	0.0456	1	0 - 1		0.00	0
		B9	Pemah/belum pernah mendapatkan sumber pendanaan dari lembaga pendanaan	0.149	0.008195	1	0 - 1		0.00	0
		B10	jumlah sumber pendanaan di luar modal sendiri	0.474	0.02607	1	Higher is better		0.00	0
		B11	Tergabung dalam komunitas / tidak tergabung dalam	0.376	0.02068	1	0 - 1		0.00	0
SCORE AKHIR										0.00
STATUS										Tidak Lanjut

Submit

Gambar 5. 11 Tampilan Menu Input Penilaian

Selanjutnya, *User* juga dapat memilih menu Input Penilaian untuk melakukan pengukuran kinerja pelaku usaha. Data yang diinputkan, didapatkan dari pengumpulan data yang dilakukan oleh pendamping melalui *Form 2*. Hasil pengukuran akan secara otomatis ditampilkan pada Database Binaan Instansi.

Karena sistem pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku usaha bersifat berjenjang, maka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan mengenai status pelaku usaha, pada *Spreadsheet Modelling* juga mampu menampilkan pola kenaikan level pelaku usaha dalam pembinaan berjenjang melalui Menu *Update*. Menu *Update* dapat melakukan rekapitulasi otomatis pada Instansi sebelumnya terkait status pelaku usaha. Menu *Update* hanya terdapat pada Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perdagangan dan Perindustriam.

5.2.2 Uji Coba *Spreadsheet Modelling*

Setelah rancangan *spreadsheet modelling* telah dibuat, selanjutnya dilakukan verifikasi sistem. Yaitu dengan melakukan uji coba terhadap *spreadsheet modelling* yang telah dibuat. Uji coba dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan pengukuran kinerja benar – benar dapat digunakan dan sesuai dengan tujuan awal. Pada uji coba ini, dilakukan uji coba pada seluruh level. Berikut adalah tahapan - tahapan yang dilakukan :

BAPEMAS

1. Melakukan *update* data binaan pada BAPEMAS, DISPORA, DISPERTAN.

Pemerintah Kota Surabaya
Jawa Timur

Update Binaan BAPEMAS

Nama Usaha :

Alamat :

Contact Person : *Nama - No Hp

Dibina Sejak : *Tahun

Submit
Back to Menu

Gambar 5. 12 Update Binaan BAPEMAS

2. Melakukan penilaian dengan Input Penilaian pelaku usaha di bawah binaan BAPEMAS

KRITERIA	BOBOT	KODE	INDIKATOR	BOBOT	BOBOT GLOBAL	TARGET	SCORING SYSTEM	Lucky Catering		
								Pencapaian	score	weighted score
Sumber Daya Manusia	0.413	B1	jumlah pelatihan yang pernah diikuti	0.143	0.059059	1	Higher is better	2	1.00	0.059059
		B2	jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan hasil usaha ekonomi makro yang pernah diikuti	0.857	0.353941	1	Higher is better	1	1.00	0.353941
Produktivitas	0.398	B3	Ada / tidaknya kegiatan produksi dilakukan secara rutin setiap bulan	0.088	0.035024	1	0 - 1	ada	1.00	0.035024
		B4	Adanya pembagian pekerjaan antar tenaga kerja	0.669	0.266262	1	0 - 1	tidak ada	0.00	0
		B5	Adanya penggunaan teknologi sederhana(manual/semi otomatis/otomatis) dalam proses produksi	0.2344	0.0932912	1	Higher is better	0	0.00	0
			Keterangan = 3 :Teknologi otomatis, 2: Teknologi semiotomatis, 1: Teknologi manual, 0 :Tidak ada penggunaan teknologi							
Produk	0.078	B6	Adanya kemasan produk	1	0.078	1	0 - 1	ada	1.00	0.078
Pasar	0.057	B7	tercapai/tidaknya <i>Break Even Point</i>	0.2	0.0114	1	0 - 1	tidak ada	0.00	0
		B8	Adanya pendapatan yang kontinyu	0.8	0.0456	1	0 - 1	tidak ada	0.00	0
Mitra kerja	0.055	B9	Pernah/belum pernah mendapatkan sumber pendanaan dari lembaga pendanaan	0.149	0.008195	1	0 - 1	tidak ada	0.00	0
		B10	jumlah sumber pendanaan diluar modal sendiri	0.474	0.02607	1	Higher is better	1	1.00	0.02607
		B11	Tergabung dalam komunitas / tidak tergabung dalam	0.376	0.02068	1	0 - 1	ada	1.00	0.02068

Submit

Gambar 5. 13 Input Penilaian Lucky Catering

3. Hasil input penilaian yang ditampilkan pada Sheen Binaan BAPEMAS

No	Nama Usaha	Kode Usaha	Alamat	Contact Person	Dibina sejak	Status	Score Akhir
1	Lucky Catering	BAPEMAS1	Jl Margomulyo No 23	Bu Nani - 085707495257	2016	Tidak Lanjut	0.573

Berdasarkan hasil input data dari *Update* Data Binaan dan Input Penilaian. Dan diketahui bahwa Lucky Catering tidak bisa melanjutkan pembinaan di level selanjutnya, atau dengan kata lain masih harus tetap menjadi binaan BAPEMAS.

Lucky Catering dapat melanjutkan ke level pembinaan selanjutnya jika score akhir sudah berada pada 0.65 hingga 0.80. Untuk Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pertanian dapat dilihat pada Lampiran 4.

DINKOP & UMKM

Terdapat dua sumber binaan Dinas Koperasi dan UMKM, yaitu yang berasal dari level dibawahnya dan juga pelaku usaha mandiri yang memang langsung menjadi binaan Dinas Koperasi dan UMKM. Tahap pertama yaitu melakukan *update* data binaan terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan melakukan penilaian terhadap pelaku usaha.

Gambar 5. 14 *Update* Binaan Diluar Pembinaan Berkelanjutan (Dari Pelaku Usaha Mandiri)

Kode Usaha	Alamat	Contact Person	Dibina sejak	Status	Score Akhir	
DISPERTAN1	Gunung Sari Barat	Pak Dodo - 08129882462	2017			Update
DISPORA1	Jl. Pucang Raya	Fikar - 0851239870	2017			Input Penilaian
DINKOP1	Jl. Kusuma Bangsa	Reni - 0812234444987	2016			LOGOUT

Gambar 5. 15 *Update* Binaan Pelaku usaha dari Pembinaan Berkelanjutan

								CV BINA BANGSA		
KRITERIA	BOBOT	KODE	INDIKATOR	BOBOT	BOBOT GLOBAL	TARGET	SCORING SYSTEM	Pencapaian	Score	Weighted Score
Material	0.068	K1	Ada/tidaknya <i>supplier</i> tetap	1	0.068	1	0 - 1	ada	1.00	0.068
Sumber Daya Manusia	0.19	K2	Jumlah tenaga kerja	0.091	0.01729	3	Higher is better	1	0.33	0.005763333
		K3	persentase kenaikan jumlah tenaga kerja	0.091	0.01729	30%	Higher is better	0%	0.00	0
			Jumlah karyawan triwulan 1 (2015)		25.00					
			Jumlah karyawan triwulan 2 (2015)		25.00					
		K4	jumlah pelatihan yang pernah diikuti	0.266	0.05054	3	Higher is better	2	0.67	0.033693333
		K5	jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	0.552	0.10488	3	Higher is better	2	0.67	0.06992
Modal usaha	0.19	K6	Jumlah sumber pendanaan diluar modal sendiri	0.5	0.095	1	Higher is better	1	1.00	0.095
		K7	Proporsi hutang dibanding modal sendiri	0.5	0.095	30%	Higher is better	1	1.00	0.095
			Jumlah hutang jumlah modal sendiri		1500000 2000000					
Sistem & kebijakan usaha	0.026	K8	Jumlah hari kerja 20 hari/bulan	1	0.026	1	0 - 1	ya	1.00	0.026
			Ya / Tidak							
Produktivitas	0.158	K9	peningkatan kapasitas produksi	0.5	0.079	30%	Higher is better	0.1	0.33	0.026333333
			Kapasitas produksi quarter 1 (2015)		50					
			Kapasitas produksi quarter 2 (2015)		55					
		K10	adanya peningkatan omzet	0.5	0.079	5%	Higher is better	0.2	1.00	0.079
		Pendapatan Bulan 1				5000000				
		Pendapatan Bulan 2				6000000				
Produk	0.152	K11	Ada/tidak kemasan yang paten	0.167	0.025384	1	0 - 1	ada	1.00	0.025384
		K12	Ada / tidak varian produk baru	0.667	0.101384	1	0 - 1	ada	1.00	0.101384
		K13	adanya merek dagang	0.167	0.025384	1	0 - 1	ada	1.00	0.025384
Pasar	0.173	K14	Adanya target pasar dan strategi pemasaran yang jelas	0.416	0.071968	1	0 - 1	tidak ada	0.00	0
		K15	Ruang lingkup wilayah pemasaran	0.131	0.022663	3	Higher is better	3	1.00	0.022663
			Keterangan = 3: Provinsi, 2: Kota, 1: Kecamatan							
		K16	Jumlah pameran yang pernah diikuti	0.131	0.022663	2	Higher is better	2	1.00	0.022663
		K17	lingkup pameran yang pernah diikuti	0.131	0.022663	3	Higher is better	2	0.67	0.015108667
			Keterangan = 3: Provinsi, 2: Kota, 1: Kecamatan							
		K18	ada/tidak pertumbuhan konsumen	0.191	0.033043	1	0 - 1	ada	1.00	0.033043
Administrasi	0.043	K19	Ada/tidaknya status badan hukum usaha	0.333	0.014319	1	0 - 1	ada	1.00	0.014319
		K20	Pencatatan keuangan sederhana	0.333	0.014319	2	Higher is better	3	1.00	0.014319
			Keterangan = 3: Program, 2: Ms. Excel, 1: Manual, 0: Belum ada							
		K21	jumlah ijin usaha yang dimiliki	0.333	0.014319	1	Higher is better	3	1.00	0.014319

Submit

Gambar 5. 16 Input penilaian Binaan DINKOP & UMKM, CV. BINA BANGSA


No	Nama Usaha	Kode Usaha	Alamat	Contact Person	Dibina sejak	Status	Score Akhir	
1	TANI MAKMUR	DISPERTAN1	Gunung Sari Barat	Pak Dodo - 08129882462	2017			Update
2	Raja Konveksi	DISPORA1	Jl. Pucang Raya	Fikar - 0851239870	2017			Input Penilaian
3	Cv. BINA BANGSA	DINKOP1	Jl. Kusuma Bangsa	Reni - 081223444987	2016	Lanjut	0.79	LOGOUT

Gambar 5. 17 Hasil Input Penilaian CV. BINA BANGSA

Berdasarkan hasil uji coba diatas, didapatkan bahwa dari level bisnis proses hanya pelaku usaha binaan DISPORA dan DISPERTAN, yaitu Raja Konveksi dan Tani Makmur yang dapat melanjutkan ke pembinaan jenjang selanjutnya oleh DINKOP&UMKM. Dalam uji coba, hanya CV BINA BANGSA yang dinilai kinerjanya, dan didapatkan score akhir CV. BINA BANGSA yaitu 0.79 (warna kuning) dan telah memenuhi syarat untuk melanjutkan pembinaan dengan DISPERDAGIN.

DISPERDAGIN

DISPERDAGIN bertanggung jawab untuk melanjutkan pembinaan dari DINKOP&UMKM. Setelah mendapatkan pembinaan dari DISPERDAGIN, diharapkan pelaku usaha mampu berdaya saing dan mandiri.



Pemerintah Kota Surabaya
Jawa Timur

Update Binaan DISPERDAGIN

Nama Usaha : CV. STAR GROUP

Alamat : Jl. Kedung Doro 34

Contact Person : Dede - 08563265265 *Nama - No Hp

Dibina Sejak : 2016 *Tahun

Submit

Back to Menu

Gambar 5. 18 Update Binaan diluar Pembinaan Berkelanjutan (dari Pelaku Usaha Mandiri)

KRITERIA	BOBOT	KODE	INDIKATOR	BOBOT	BOBOT GLOBAL	TARGET	SCORING SYSTEM	CV. STAR GROUP		
								Pencapaian	score	weighted score
Material	0.03	I1	Proporsi supplier tetap	1	0.03	30%	Higher is better	40%	1.00	0.03
			Jumlah material yang harus di supply					5		
			Jumlah supplier tetap					2		
Sumber Daya Manusia	0.167	I2	Jumlah tenaga kerja dengan pendidikan terakhir SMA/SMK	0.55	0.09185	5	Higher is better	5	1.00	0.09185
		I3	Jumlah pelatihan yang pernah diikuti	0.24	0.04008	3	Higher is better	2	0.67	0.02672
		I4	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	0.21	0.03507	5	Higher is better	2	0.40	0.014028
Modal usaha	0.083	I5	Adanya peningkatan modal usaha	0.2	0.0166	5%	Higher is better	50%	1.00	0.0166
			Modal quarter 1 (2015)					5000000		
			Modal quarter 2 (2015)					7500000		
Teknologi	0.125	I6	Adanya sumber pendanaan yang tetap	0.8	0.0664	1	0 - 1	ada	1.00	0.0664
		I7	Ada/Tidaknya peningkatan aset (alat produksi)	0.75	0.09375	1	0 - 1	tidak ada	0.00	0
		I8	Jumlah alat teknologi semi otomatis/otomatis dan ramah lingkungan	0.25	0.03125	1	Higher is better	1	1.00	0.03125
Sistem dan kebijakan usaha	0.049	I9	Adanya jasa pengiriman	0.443	0.021707	1	0 - 1	ada	1.00	0.021707
		I10	Adanya layanan penyelesaian pengaduan konsumen	0.169	0.008281	1	0 - 1	tidak ada	0.00	0
		I11	Adanya pengolahan limbah produksi	0.387	0.018963	1	0 - 1	tidak ada	0.00	0
Produktivitas	0.119	I12	Produktivitas produksi	0.661	0.078659	70%	higher is better	77%	1.00	0.078659
			Kapasitas produksi terpakai					50		
			Kapasitas Produksi sebenarnya					65		
		I13	Adanya peningkatan produksi	0.208	0.024752	30%	Higher is better	0%	0.00	0
			Produksi quarter 1 (2015)					60		
			Produksi quarter 2 (2015)					60		
Produk	0.131	I14	Zero Non-Performing Loan	0.131	0.015589	1	0 - 1	ada	1.00	0.015589
		I15	Kelengkapan sertifikasi produk	0.444	0.058164	5	Higher is better	3	0.60	0.0348984
		I16	Adanya inovasi desain produk dan kemasan	0.111	0.014541	1	0 - 1	ada	1.00	0.014541
		I18	Pertumbuhan omzet	0.444	0.058164	20%	Higher is better	20%	1.00	0.058164
			Pendapatan Bulan 1					7500000		
Pasar	0.179		Pendapatan Bulan 2	0.661	0.118319	50%	Higher is better	9000000	1.00	0.118319
		I19	Peningkatan jumlah konsumen					10%		
			Jumlah konsumen quarter 1					50		
			Jumlah konsumen quarter 2	0.208	0.037232	2	Higher is better	55	1.00	0.04
		I20	Lingkup pemasaran regional dan internasional					2		
			Keterangan : 1=Internasional / 2=Regional / 3=Lokal							
Mitra Usaha	0.044	I21	Ada/Tidak penjualan Business to Business	0.131	0.023449	1	0 - 1	tidak ada	0.00	0
		I22	Tergabung/Tidak dalam komunitas usaha nasional dan internasional	1	0.044	1	0 - 1	tergabung	1.00	0.044
		I23	Kelengkapan pencatatan keuangan	0.659	0.048107	2	Higher is better		1.00	0.048107
			Keterangan : 3 = Ada laporan laba-rugi, 2: Ada laporan omzet, 1 = Ada laporan transaksi keluar masuk, 0 =					2		
		I24	Jumlah ijin usaha yang dimiliki	0.156	0.011388	5	Higher is better	2	0.40	0.0045552
Administrasi	0.073	I25	Status badan hukum usaha	0.185		2	Higher is better		1.00	0
			Keterangan = 3:PT, 2: UD atau CV, 1: Koperasi					4		

Submit

Gambar 5. 19 Input Penilaian Pelaku Usaha Binaan DISPERDAGIN

Hasil *update* pelaku usaha dari pembinaan sebelumnya, dan input penilaian CV. STAR GROUP

No	Nama Usaha	Kode Usaha	Alamat	Contact Person	Dibina Sejak	Status	Score Akhir
1	Cv. BINA BANGSA	DINKOP1	Jl. Kusuma Bangsa	Reni - 081223444987	2016		
2	CV. STAR GROUP	DISPERDAGIN1	Jl. Kedung Doro 36	Dede - 08563265265	2016	Lanjut	0.75

Update
Input Penilaian
LOGOUT

Gambar 5. 20 Database Pelaku Usaha Binaan DISPERDAGIN

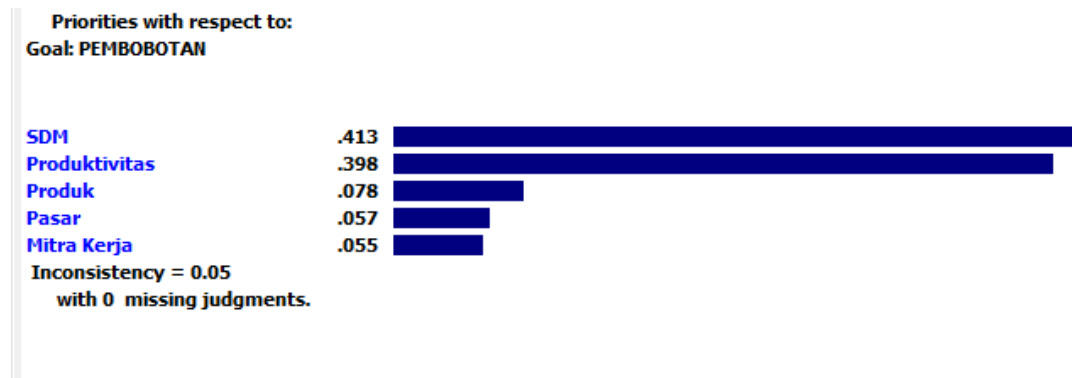
Berdasarkan uji coba, didapatkan bahwa pada CV. STAR GROUP yang merupakan binaan DISPERDAGIN dinyatakan lulus dari pembinaan berkelanjutan dengan score akhir 0.75.

(Halaman sengaja dikosongkan)

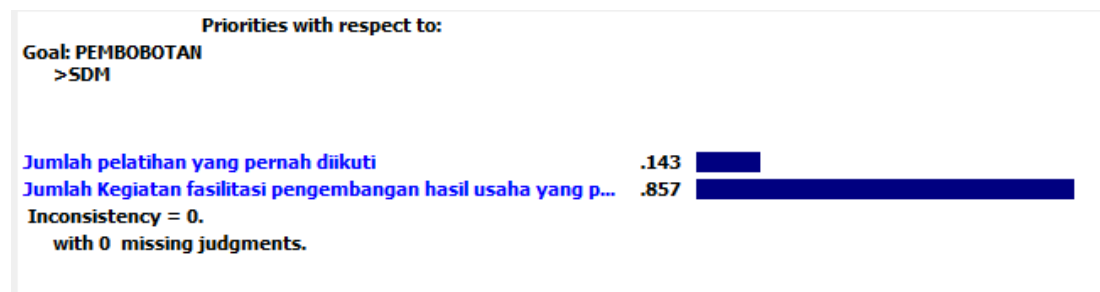
Lampiran 1. Hasil Pembobotan dengan *Expert Choice*

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS)

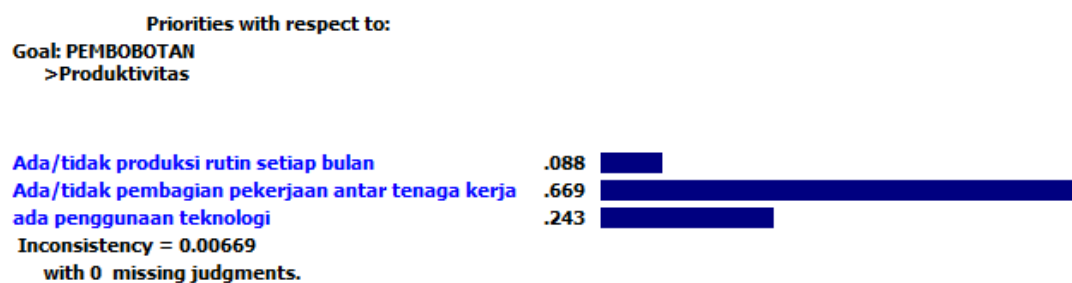
Hasil pembobotan Antar kriteria



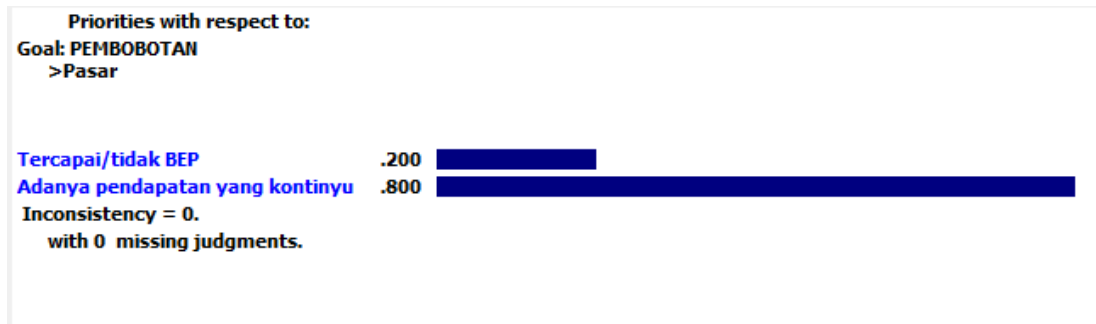
Antar indikator kriteria SDM



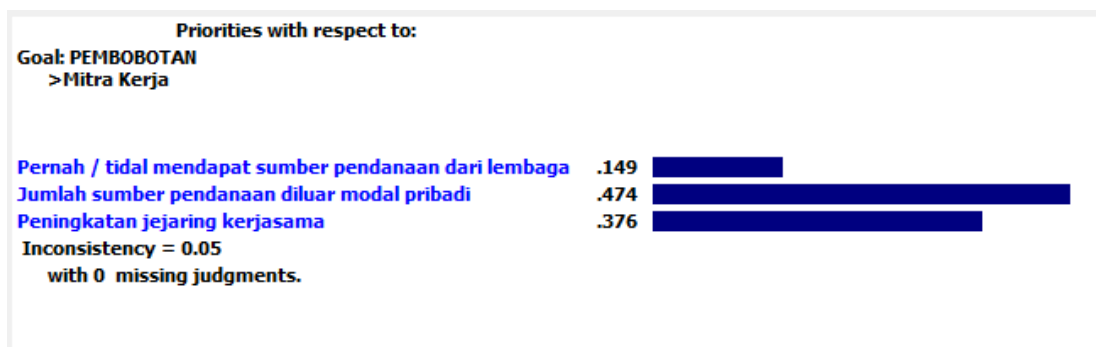
Antar indikator kriteria produktivitas



Antar indikator kriteria pasar

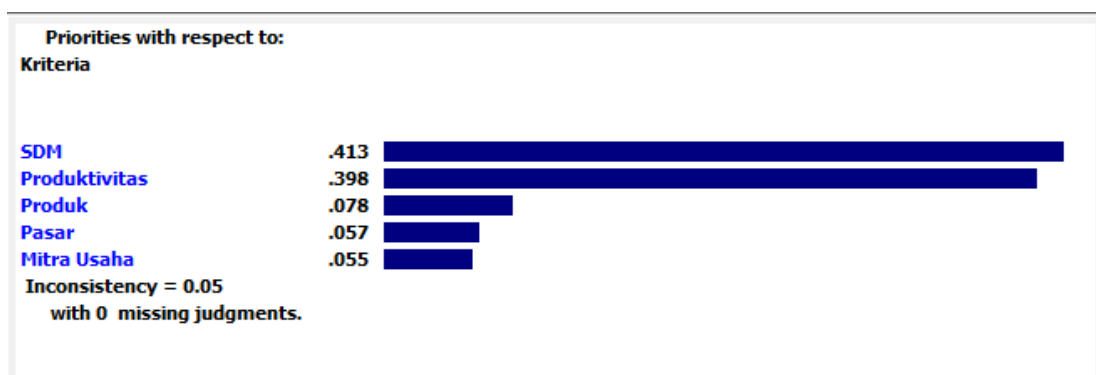


Antar indikator kriteria mitra kerja



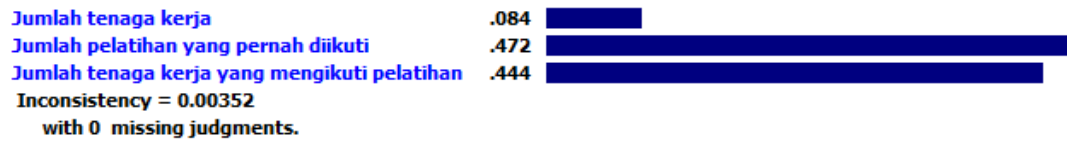
Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA)

Antar kriteria



Antar indikator kriteria SDM

Kriteria
>SDM



Antar indikator kriteria Produk

Priorities with respect to:
Kriteria
>Produk

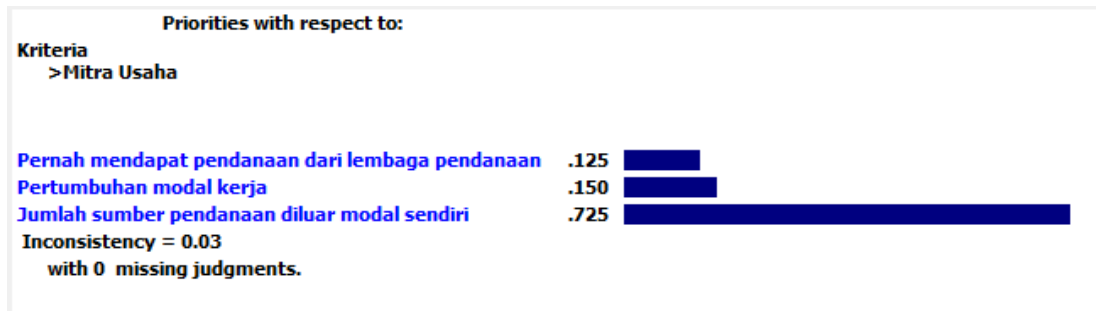


Antar indikator kriteria Pasar

Priorities with respect to:
Kriteria
>Pasar

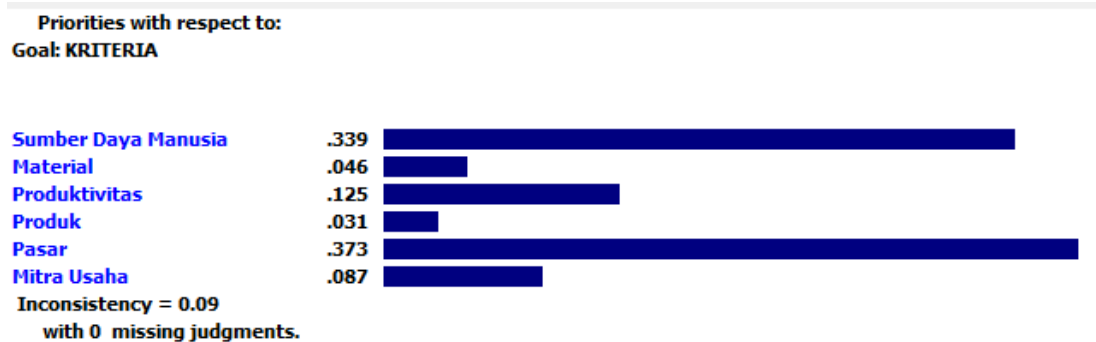


Antar indikator kriteria Mitra usaha

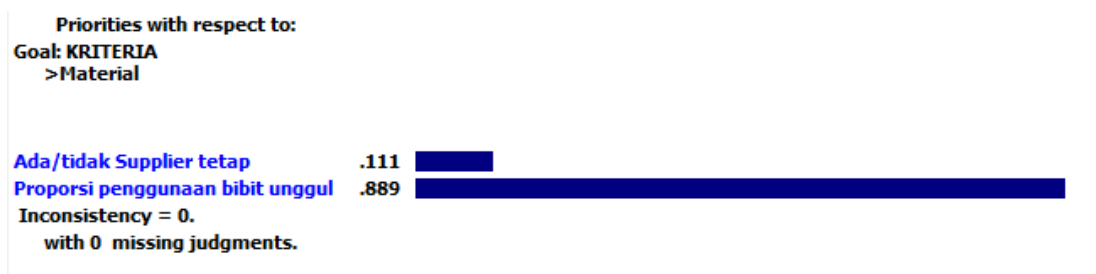


Dinas Pertanian (DISPERTAN)

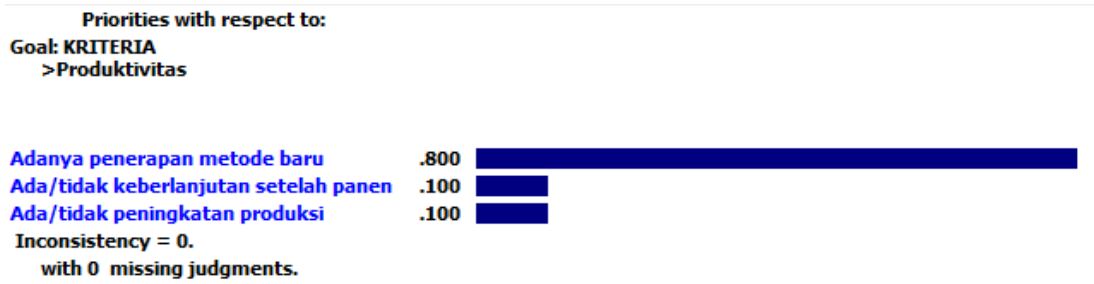
Antar kriteria



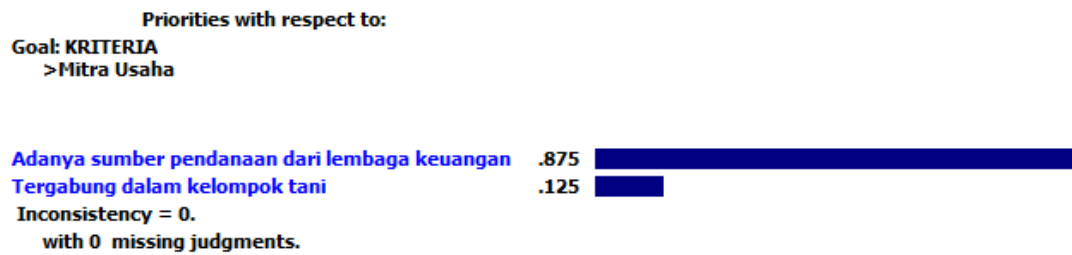
Antar indikator kriteria material



Antar indikator kriteria Produktivitas

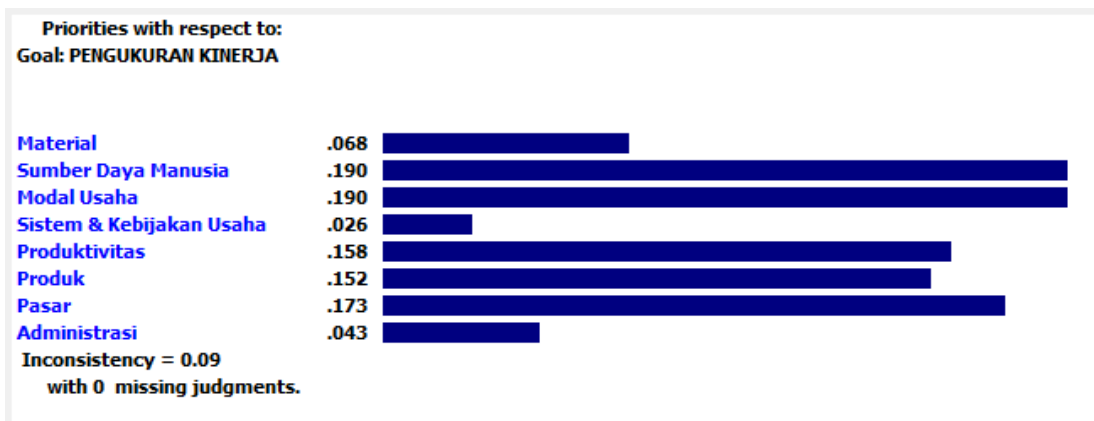


Antar indikator kriteria Mitra usaha



Dinas Koperasi & UMKM (DINKOP&UMKM)

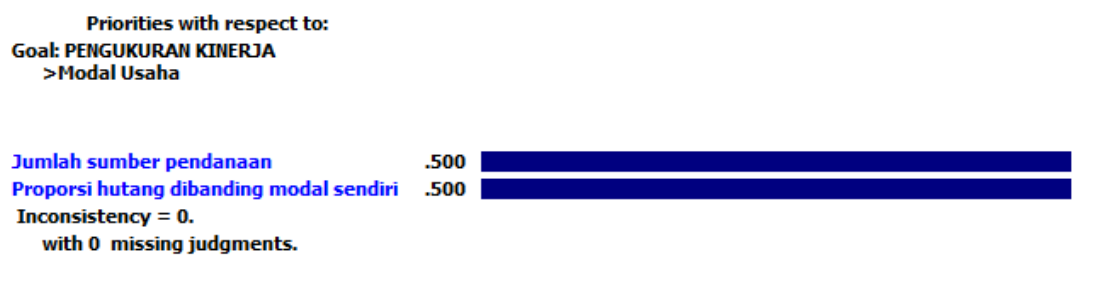
Antar kriteria



Antar indikator kriteria Sumber Daya Manusia



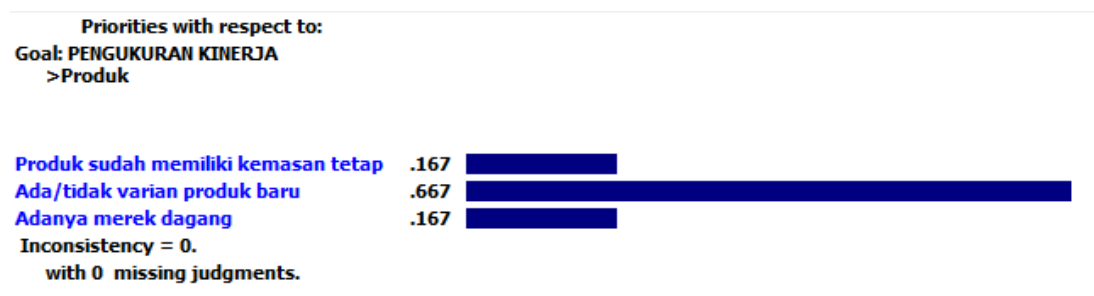
Antar indikator kriteria modal kerja



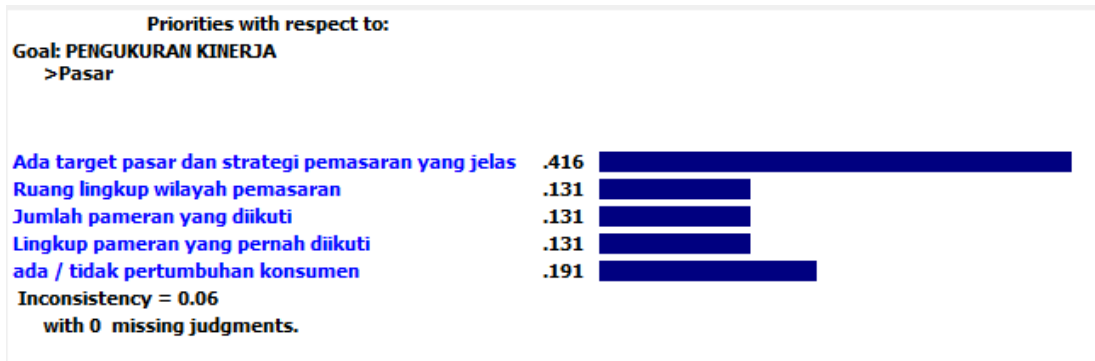
Antar indikator kriteria produktivitas



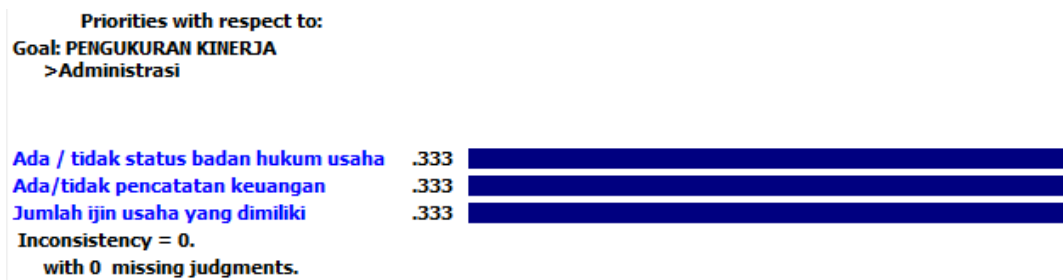
Antar indikator kriteria produk



Antar indikator kriteria pasar

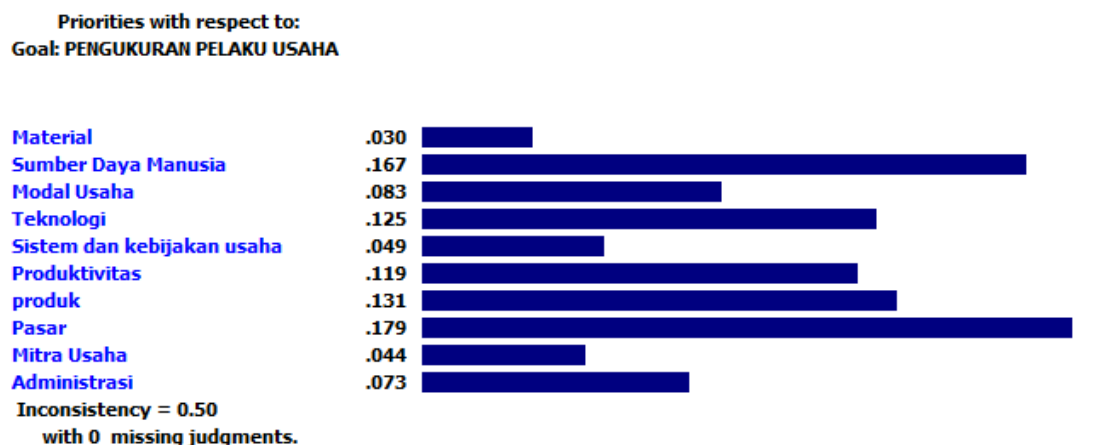


Antar indikator kriteria administrasi



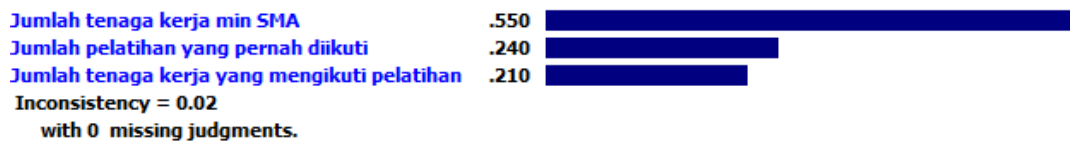
Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERDAGIN)

Antar kriteria



Antar indikator pada kriteria Sumber Daya Manusia

Priorities with respect to:
Goal: PENGUKURAN PELAKU USAHA
>Sumber Daya Manusia



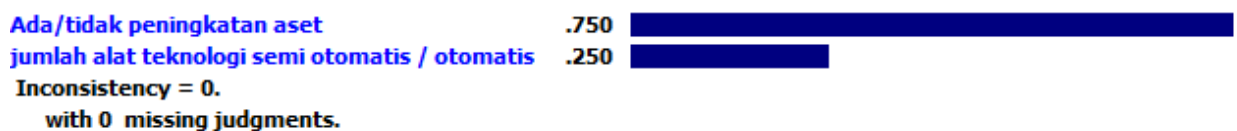
Antar indikator pada kriteria modal usaha

Priorities with respect to:
Goal: PENGUKURAN PELAKU USAHA
>Modal Usaha



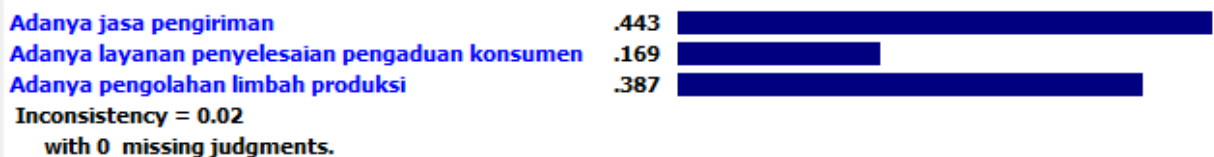
Antar indikator pada kriteria teknologi

Priorities with respect to:
Goal: PENGUKURAN PELAKU USAHA
>Teknologi



Antar indikator pada kriteria Sistem dan kebijakan usaha

Priorities with respect to:
Goal: PENGUKURAN PELAKU USAHA
>Sistem dan kebijakan usaha



Antar indikator pada kriteria produktivitas

Priorities with respect to:
Goal: PENGUKURAN PELAKU USAHA
>Produktivitas



Antar indikator pada kriteria produk

Priorities with respect to:
Goal: PENGUKURAN PELAKU USAHA
>produk

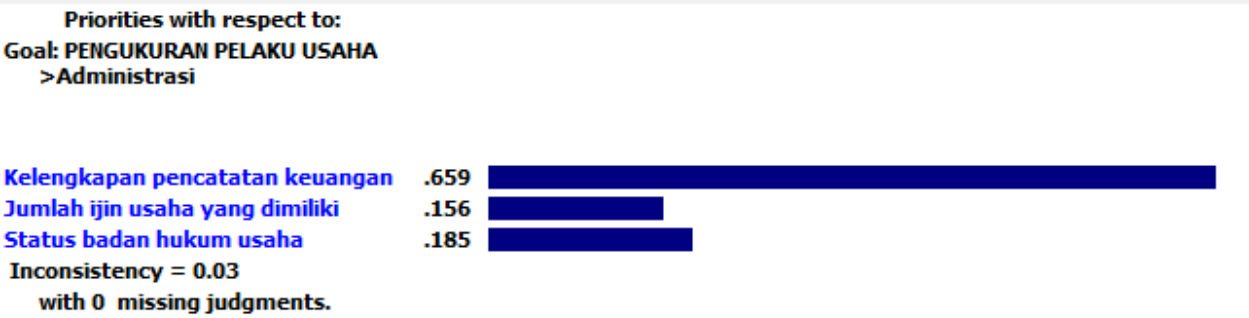


Antar indikator pada kriteria pasar

Priorities with respect to:
Goal: PENGUKURAN PELAKU USAHA
>Pasar



Antar indikator pada kriteria administrasi



Lampiran 2. Performance Indicators Properties

BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT (BAPEMAS)

Kriteria	Kode	Indikator	Target	Tujuan	Formula	Satuan	Frekuensi Pengukuran	Frekuensi Review	Pihak yang Mengukur	Sumber Data	Pemilik PI	Sifat Target	Keterangan
Sumber Daya Manusia	B1	jumlah pelatihan yang pernah diikuti	1	Mengukur banyaknya pelatihan yang pernah diikuti	[Jumlah pelatihan yang pernah diikuti dalam periode tiga bulan]	satuan	3 Bulan	6 Bulan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
	B2	jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan hasil usaha ekonomi makro yang pernah diikuti	1	Mengukur banyaknya kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan masyarakat yang pernah diikuti	[jumlah kegiatan fasilitasi yang pernah diikuti dalam periode tiga bulan]	satuan	3 Bulan	6 Bulan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	kegiatan fasilitasi yang dimaksud adalah kegiatan fasilitasi yang merupakan program BAPEMAS
Produktivitas	B3	Ada / tidaknya kegiatan produksi dilakukan secara rutin setiap bulan	1 : Ada	mengetahui kontinuitas usaha	1: Ada kegiatan produksi yang dilakukan secara kontinyu selama satu bulan, 0: Tidak ada kegiatan produksi yang dilakukan secara kontinyu selama satu bulan	-	Bulanan	3 Bulan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>0 - 1</i>	-
	B4	Adanya pembagian pekerjaan antar tenaga kerja	1 : Ada	Mengetahui ada atau tidaknya sistem pembagian pekerjaan	1: Ada, 0: Tidak ada	-	Bulanan	3 Bulan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>0 - 1</i>	-

Kriteria	Kode	Indikator	Target	Tujuan	Formula	Satuan	Frekuensi Pengukuran	Frekuensi Review	Pihak yang Mengukur	Sumber Data	Pemilik PI	Sifat Target	Keterangan
	B5	Adanya penggunaan teknologi sederhana(manual/semi otomatis/otomatis) dalam proses produksi	1 : Penggunaan teknologi manual	Mengukur penggunaan teknologi pelaku usaha dalam proses produksi	3 :Penggunaan teknologi otomatis, 2: Penggunaan teknologi semiotomatis, 1: Penggunaan teknologi manual, 0 :Tidak ada penggunaan teknologi		3 Bulan	6 Bulan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
Produk	B6	Adanya kemasan produk	1 : Ada	Mengukur kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan produk layak jual	1: Ada, 0: Tidak		Bulanan	3 Bulan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>0 - 1</i>	kemasan produk yang dimaksud adalah sebatas kemasan yang digunakan dalam penjualan
Pasar	B7	tercapai/tidaknya <i>Break Even Point</i>	1 : Tercapainya <i>Break Even Point</i>	Mengukur profitabilitas usaha	1 : Tercapai <i>Break Even Point</i> dalam periode 3 Bulan, 0 : Tidak tercapai <i>Break Even Point</i> dalam periode 3 Bulan		3 Bulan	6 Bulan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>0 - 1</i>	-
	B8	Adanya pendapatan yang kontinyu	1 : Adanya pendapatan yang pasti setiap bulan	Mengukur besarnya peningkatan pendapatan	1 : Adanya pendapatan yang pasti setiap bulan, 0 : Tidak ada pendapatan pasti	-	Bulanan	3 Bulan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>0 - 1</i>	-
Mitra kerja	B9	Pernah/belum pernah mendapatkan sumber pendanaan dari lembaga pendanaan	1 : Pernah	Mengetahui apakah pelaku usaha pernah mendapat sumber pendanaan dari	1: Pernah, 0: Belum pernah	-	3 Bulan	6 Bulan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>0 - 1</i>	-

Kriteria	Kode	Indikator	Target	Tujuan	Formula	Satuan	Frekuensi Pengukuran	Frekuensi Review	Pihak yang Mengukur	Sumber Data	Pemilik PI	Sifat Target	Keterangan
				lembaga pendanaan									
	B10	jumlah sumber pendanaan diluar modal sendiri	1	Mengetahui berapa banyak sumber pendanaan (lembaga pendanaan) yang sedang memberikan bantuan	[Banyaknya sumber pendanaan(periode sekarang) diluar modal sendiri]	satuan	Bulanan	3 Bulan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
	B11	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	1 : Tergabung dalam komunitas	Mengetahui kemampuan pelaku usaha menjalin hubungan dengan komunitas	1: Tergabung dalam komunitas, 0: Tidak tergabung dalam komunitas	-	Bulanan	3 Bulan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>0 - 1</i>	-

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA (DISPORA)

Kriteria	Kode	Indikator	Target	Tujuan	Formula	Satuan	Frekuensi Pengukuran	Frekuensi Review	Pihak yang Mengukur	Sumber Data	Pemilik PI	Sifat Target	Keterangan
Sumber Daya Manusia	P1	Jumlah tenaga kerja	2	Mengukur jumlah tenaga kerja yang diserap oleh pelaku usaha	[Jumlah tenaga kerja]	Orang	Bulanan	3 Bulan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
	P2	Jumlah pelatihan yang pernah diikuti	2	Mengukur banyaknya pelatihan yang pernah diikuti	[Jumlah pelatihan yang pernah diikuti dalam periode tiga bulan]	satuan	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
	P3	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	2	Mengukur jumlah tenaga kerja yang pernah mengikuti pelatihan	[Jumlah tenaga kerja yang pernah mengikuti pelatihan dalam periode tiga bulan]	Orang	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
Produktivitas	P4	Adanya kegiatan produksi secara kontinyu selama 3 bulan	1: Ada kegiatan produksi yang dilakukan secara kontinyu selama 3 bulan	Mengukur kontinuitas usaha	1: Ada kegiatan produksi yang dilakukan secara kontinyu selama 3 bulan, 0: Tidak ada kegiatan produksi yang dilakukan secara kontinyu selama 3 bulan	-	3 Bulan	3 Bulan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>0 - 1</i>	selama 3 bulan, pelaku usaha melakukan produksi secara kontinyu
Produk	P5	Ada/tidaknya produk	1 : Ada	Mengukur pelaku usaha dalam menciptakan produk baru	1: Ada, 0: Tidak	satuan	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>0 - 1</i>	produk yang dipasarkan sudah apsti dan tidak berubah-ubah
	P6	Adanya kemasan produk	1 : Ada	Mengukur kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan produk layak jual	1: Ada, 0: Tidak		Bulanan	3 Bulan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>0 - 1</i>	kemasan produk yang dimaksud adalah sebatas kemasan yang digunakan dalam penjualan
	P7	Produk memiliki nama dagang	1 : Ada	Mengukur kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan produk layak jual	1: Ada, 0: Tidak		Bulanan	3 Bulan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>0 - 1</i>	nama dagang yang dimaksud adalah sebatas nama yang

Kriteria	Kode	Indikator	Target	Tujuan	Formula	Satuan	Frekuensi Pengukuran	Frekuensi Review	Pihak yang Mengukur	Sumber Data	Pemilik PI	Sifat Target	Keterangan
													digunakan dalam penjualan
Pasar	P8	Adanya pendapatan yang kontinyu	1 : Ada	Mengukur besarnya pendapatan kontinyu	1 : Adanya pendapatan yang pasti setiap bulan, 0 : Tidak ada pendapatan pasti	-	Bulanan	3 Bulan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pelaku usaha	Pelaku usaha	0 - 1	-
	P9	Adanya website/fanpage sebagai media informasi produk	1 : Ada	Mengukur kemampuan pelaku usaha dalam memasarkan produk	1: Ada, 0: Tidak		Bulanan	3 Bulan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pelaku usaha	Pelaku usaha	0 - 1	-
	P10	Jumlah pameran yang pernah diikuti	1	Mengukur jumlah pameran yang telah diikuti oleh pelaku usaha	[Jumlah kegiatan pemasaran atau pameran yang diikuti dalam tiga bulan]	satuan	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pelaku usaha	Pelaku usaha	Higher is better	-
	P11	Sebaran geografis pemasaran produk	1 : Kecamatan	Mengetahui sebaran geografis penjualan	3: Provinsi, 2: Kota, 1: Kecamatan		Bulanan	3 Bulan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pelaku usaha	Pelaku usaha	Higher is better	-
Mitra Usaha	P12	Pernah/belum pernah mendapatkan sumber pendanaan dari lembaga pendanaan	1 : Pernah	Mengetahui apakah pelaku usaha pernah mendapat sumber pendanaan dari lembaga pendanaan	1: Pernah, 0: Belum pernah	-	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pelaku usaha	Pelaku usaha	0 - 1	-
	P13	Pertumbuhan modal kerja	3%	Mengukur pertumbuhan modal kerja pelaku usaha	[[Modal kerja bulan ini(t) - Modal kerja bulan lalu (t-1)] / Modal kerja bulan lalu(t-1)] x 100%	%	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pelaku usaha	Pelaku usaha		-
	P14	Jumlah sumber pendanaan diluar modal sendiri	1	Mengetahui berapa banyak sumber pendanaan (lembaga pendanaan) yang sedang memberikan bantuan	[Banyaknya sumber pendanaan(periode sekarang) diluar modal sendiri]	-	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pelaku usaha	Pelaku usaha	Higher is better	-

DINAS PERTANIAN (DISPERTAN)

Kriteria	Kode	Indikator	Target	Tujuan	Formula	Satuan	Frekuensi Pengukuran	Frekuensi Review	Pihak yang Mengukur	Sumber Data	Pemilik PI	Sifat Target	Keterangan
Sumber Daya Manusia	T1	jumlah pelatihan yang diikuti	1	Mengukur banyaknya pelatihan yang pernah diikuti	[Jumlah pelatihan yang pernah diikuti dalam periode tiga bulan]	satuan	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Pertanian	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
Material	T2	ada/tidak supplier tetap	1 : Ada	Memantau pelaku usaha apakah dapat mempertahankan kelancaran pasokan bahan baku demi kelancaran proses produksi	1: Ada, 0: Tidak ada	-	Bulanan	3 Bulan	Dinas Pertanian	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>0 - 1</i>	-
	T3	Proporsi penggunaan bibit unggul dibanding bibit biasa	50%	Mengukur persiapan pelaku usaha dalam meningkatkan produksi	[Jumlah bibit unggul/Jumlah bibit biasa] x 100%	%	Bulanan	3 Bulan	Dinas Pertanian	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
Produktivitas	T4	Adanya penerapan metode baru dalam proses budidaya	1: Ada	Mengukur perkembangan kemampuan pelaku usaha	1: Ada, 0: Tidak ada	-	Bulanan	3 Bulan	Dinas Pertanian	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>0 - 1</i>	-
	T5	Adanya/tidak keberlanjutan setelah panen	1 : Ada	Mengukur kontinuitas usaha dari pelaku usaha	1: Ada, 0: Tidak ada	-	Bulanan	3 Bulan	Dinas Pertanian	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>0 - 1</i>	Mengetahui pelaku usaha melakukan kegiatan produktif atau tidak setelah panen periode sebelumnya

Kriteria	Kode	Indikator	Target	Tujuan	Formula	Satuan	Frekuensi Pengukuran	Frekuensi Review	Pihak yang Mengukur	Sumber Data	Pemilik PI	Sifat Target	Keterangan
	T6	Adanya peningkatan produksi	2,5 %	Mengukur besarnya pertumbuhan produksi	[[Produksi periode ini(t) - Produksi periode lalu (t-1)] / Produksi periode lalu(t-1)] x100%	%	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Pertanian	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
Produk	T7	Jumlah sertifikat produk yang dimiliki	1	Mengukur banyaknya jumlah sertifikasi produk yang sudah dimiliki	[Jumlah sertifikasi produk yang dimiliki]	satuan	Bulanan	3 Bulan	Dinas Pertanian	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
Pasar	T8	Luas ruang lingkup area penjualan hasil panen	1 : Kecamatan	Mengetahui sebaran geografis penjualan	3: Provinsi, 2: Kota, 1: Kecamatan		Bulanan	3 Bulan	Dinas Pertanian	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
Mitra usaha	T9	adanya sumber pendanaan dari lembaga keuangan	1	Mengetahui berapa banyak sumber pendanaan (lembaga pendanaan) yang sedang memberikan bantuan	[Banyaknya sumber pendanaan(periode sekarang) diluar modal sendiri]	-	Bulanan	3 Bulan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
	T10	Tergabung dalam kelompok tani	1 : Tergabung dengan komunitas lokal	Mengetahui kemampuan pelaku usaha menjalin hubungan dengan komunitas	1: Tergabung, 0: Tidak tergabung	-	Bulanan	3 Bulan	Dinas Pertanian	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>0 - 1</i>	-

DINAS KOPERASI DAN UMKM (DINKOP & UMKM)

Kriteria	Kode	Indikator	Target	Tujuan	Formula	Satuan	Frekuensi Pengukuran	Frekuensi Review	Pihak yang Mengukur	Sumber Data	Pemilik PI	Sifat Target	Keterangan
Material	K1	Ada/tidaknya <i>supplier</i> tetap	1	Memantau pelaku usaha apakah dapat mempertahankan kelancaran pasokan bahan baku demi kelancaran proses produksi	1: Ada, 0: Tidak ada	-	Bulanan	3 Bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaku usaha	Pelaku usaha	0 -1	mengetahui apakah bisnis pelaku usaha memiliki supplier tetap atau tidak
Sumber Daya Manusia	K2	Jumlah tenaga kerja	3	Mengukur jumlah tenaga kerja yang diserap oleh pelaku usaha	[Jumlah tenaga kerja]	Orang	Bulanan	3 Bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
	K3	persentase kenaikan jumlah tenaga kerja	30%	Mengukur peningkatan jumlah tenaga kerja yang diserap	[[Jumlah tenaga kerja periode ini(t) - Jumlah tenaga kerja periode lalu (t-1)] / Jumlah tenaga kerja periode lalu(t-1)] (1 periode = 3bulan)	%	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
	K4	jumlah pelatihan yang pernah diikuti	3	Mengukur banyaknya pelatihan yang pernah diikuti	[Jumlah pelatihan yang pernah diikuti dalam periode tiga bulan]	satuan	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
	K5	jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	3	Mengukur jumlah tenaga kerja yang pernah mengikuti pelatihan	[Jumlah tenaga kerja yang pernah mengikuti pelatihan dalam periode tiga bulan]	Orang	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-

Kriteria	Kode	Indikator	Target	Tujuan	Formula	Satuan	Frekuensi Pengukuran	Frekuensi Review	Pihak yang Mengukur	Sumber Data	Pemilik PI	Sifat Target	Keterangan
Modal usaha	K6	Jumlah sumber pendanaan diluar modal sendiri	1	Mengetahui berapa banyak sumber pendanaan (lembaga pendanaan) yang sedang memberikan bantuan	[Banyaknya sumber pendanaan(periode sekarang) diluar modal sendiri]	-	Bulanan	3 Bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
	K7	Proporsi hutang dibanding modal sendiri	30%	Mengukur berapa besar hutang yang sedang dimiliki oleh pelaku usaha	[Jumlah hutang / Jumlah modal sendiri]	%	Bulanan	3 Bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
Sistem & kebijakan usaha	K8	Jumlah hari kerja 20 hari/bulan	1	Mengukur kontinuitas produksi	1 : usaha dijalankan secara kontinyu 20 hari/bulan, 0 : usaha dijalankan tidak secara kontinyu	hari	Bulanan	3 Bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>0 - 1</i>	-
Produktivitas	K9	peningkatan kapasitas produksi	30%	Mengukur besarnya pertumbuhan produksi	[[Produksi periode ini(t) - Produksi periode lalu (t-1)] / Produksi periode lalu(t-1)] x 100%	%	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-

Kriteria	Kode	Indikator	Target	Tujuan	Formula	Satuan	Frekuensi Pengukuran	Frekuensi Review	Pihak yang Mengukur	Sumber Data	Pemilik PI	Sifat Target	Keterangan
	K10	adanya peningkatan omzet	5%	Mengukur besarnya peningkatan pendapatan	$\frac{[\text{Jumlah pendapatan bulan ini}(t) - \text{Jumlah pendapatan bulan lalu}(t-1)]}{\text{Jumlah pendapatan bulan lalu}(t-1)}$	%	Bulanan	3 Bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
Produk	K11	produk sudah memiliki kemasan yang paten	1	Mengukur kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan produk layak jual	1: Ada kemasan produk yang sudah paten, 0: kemasan produk belum paten		Bulanan	3 Bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaku usaha	Pelaku usaha	0 - 1	Kemasan produk sudah tetap dan tidak seadanya
	K12	Ada / tidak variasi produk	1	Mengukur pelaku usaha dalam menciptakan produk baru	1: Ada, 0: Tidak	satuan	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaku usaha	Pelaku usaha	0 - 1	variasi produk yang dimaksud adalah variasi produk dari produk eksisting. Bukan varian produk abru
	K13	adanya merek dagang	1	Mengukur kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan produk layak jual	1: Ada, 0: Tidak		3 Bulan	6 Bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaku usaha	Pelaku usaha	0 - 1	merek dagang yang dimaksud adalah sebatas nama yang digunakan dalam penjualan/pemasaran

Kriteria	Kode	Indikator	Target	Tujuan	Formula	Satuan	Frekuensi Pengukuran	Frekuensi Review	Pihak yang Mengukur	Sumber Data	Pemilik PI	Sifat Target	Keterangan
Pasar	K14	Adanya target pasar dan strategi pemasaran yang jelas	1	Mengetahui kemampuan marketing pelaku usaha	1 : Target pasar pasti dan ada metode pemasaran, 0 : Target pasar tidak pasti dan tidak ada metode pemasaran		3 Bulan	6 Bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaku usaha	Pelaku usaha	0 - 1	-
	K15	Ruang lingkup wilayah pemasaran	3	Mengetahui sebaran geografis penjualan	3: Provinsi, 2: Kota, 1: Kecamatan		Bulanan	3 Bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
	K16	Jumlah pameran yang pernah diikuti	2	Mengukur jumlah pameran yang telah diikuti oleh pelaku usaha	[Jumlah kegiatan pemasaran atau pameran yang diikuti dalam satu periode]	satuan	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	Jenis pameran yang diikuti tidak harus pameran yang diadakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, namun pameran apapun diperbolehkan
	K17	lingkup pameran yang pernah diikuti	3	Mengukur tingkat pameran yang diikuti	3: Provinsi, 2: Kota, 1: Kecamatan	-	Bulanan	3 Bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-

Kriteria	Kode	Indikator	Target	Tujuan	Formula	Satuan	Frekuensi Pengukuran	Frekuensi Review	Pihak yang Mengukur	Sumber Data	Pemilik PI	Sifat Target	Keterangan
	K18	ada/tidak pertumbuhan konsumen	1	Mengukur kemampuan pelaku usaha untuk menumbuhkan jumlah konsumen/pelanggan	Jika [Jumlah konsumen bulan ini - Jumlah konsumen bulan lalu] > 0 , maka Ada	-	Bulanan	3 Bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaku usaha	Pelaku usaha	0 - 1	-
Administrasi	K19	Ada/tidaknya status badan hukum usaha	1	Mengetahui posisi bentuk usaha	3: CV, 2: UD, 1: Koperasi, 0: Belum ada	-	Bulanan	3 Bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaku usaha	Pelaku usaha	0 - 1	-
	K20	Ada/tidak pencatatan keuangan sederhana	2	Mengetahui apakah pelaku usaha sudah mampu melakukan pencatatan keuangan	3: Program, 2: Ms. Excel, 1: Manual, 0: Belum ada	-	Bulanan	3 Bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaku usaha	Pelaku usaha	Higher is better	-
	K21	jumlah ijin usaha yang dimiliki	1	Mengukur banyaknya jumlah ijin usaha yang sudah dimiliki	[Jumlah ijin usahan yang dimiliki]	satuan	bulanan	3 bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	pelaku usaha	pelaku usaha	Higher is better	-

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Kriteria	Kode	Indikator	Target	Tujuan	Formula	Satuan	Frekuensi Pengukuran	Frekuensi Review	Pihak yang Mengukur	Sumber Data	Pemilik PI	Sifat Target	Keterangan
Material	I1	Proporsi supplier tetap	30%	Memantau pelaku usaha apakah dapat mempertahankan kelancaran pasokan bahan baku demi kelancaran proses produksi	[Jumlah material dengan supplier tetap / Jumlah material yang harus di-supply]x 100%	%	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	perbandingan jumlah item material yang harus di supply, dengan jumlah supplier tetap
Sumber Daya Manusia	I2	Jumlah tenaga kerja dengan pendidikan terakhir SMA/SMK	5 Orang	Mengukur kemampuan IKM dalam mengambil tenaga kerja berpendidikan	[Jumlah tenaga kerja dengan pendidikan SMA ke atas]	Orang	Bulanan	3 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
	I3	Jumlah pelatihan yang pernah diikuti	3	Mengukur banyaknya pelatihan yang pernah diikuti	[Jumlah pelatihan yang pernah diikuti dalam periode tiga bulan]	satuan	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
	I4	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	5	Mengukur jumlah tenaga kerja yang pernah mengikuti pelatihan	[Jumlah tenaga kerja yang pernah mengikuti pelatihan dalam periode tiga bulan]	Orang	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
Modal usaha	I5	Adanya peningkatan modal usaha	5%	Mengukur pertumbuhan modal kerja pelaku usaha	[[Modal kerja periode ini(t) - Modal kerja periode lalu (t-1)] / Modal kerja periode lalu(t-1)]	%	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
	I6	Adanya sumber pendanaan yang tetap	1:Ada	Mengetahui kerjasama pelaku usaha dengan lembaga pendanaan	1 : Ada, 0 : Tidak ada		Bulanan	3 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>0 - 1</i>	-

Kriteria	Kode	Indikator	Target	Tujuan	Formula	Satuan	Frekuensi Pengukuran	Frekuensi Review	Pihak yang Mengukur	Sumber Data	Pemilik PI	Sifat Target	Keterangan
Teknologi	I7	Ada/Tidaknya peningkatan aset (alat produksi)	1 : [Jumlah alat produksi periode ini - Jumlah alat produksi periode lalu] > 0	Mengetahui adanya peningkatan nilai investasi	Jika [Jumlah alat produksi periode ini - Jumlah alat produksi periode lalu] > 0 , maka nilai = 1 ; jika tidak ada , nilai = 0	satuan	3 bulan	6 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	0 - 1	-
	I8	Jumlah alat teknologi semi otomatis/otomatis dan ramah lingkungan	1	Mengukur kemampuan pelaku usaha dalam kepemilikan alat produksi	[Jumlah alat produksi semi otomatis dan otomatis]	unit	Bulanan	3 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	Higher is better	-
Sistem dan kebijakan usaha	I9	Adanya jasa pengiriman	1	Mengukur kemampuan pelaku usaha dalam memberikan layanan lebih terhadap konsumen dalam layanan pemesanan & pengiriman	[Jumlah nilai kinerja layanan pemesanan dan pengiriman]. Pemesanan-> 1: Pemesanan dapat dilakukan dengan media komunikasi (telp, sms, media social), 0: Pemesanan harus dilakukan di tempat. Pengiriman-> 1: Ada layanan pengiriman, 0: Tidak ada layanan pengiriman.	-	Bulanan	3 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	Higher is better	-

Kriteria	Kode	Indikator	Target	Tujuan	Formula	Satuan	Frekuensi Pengukuran	Frekuensi Review	Pihak yang Mengukur	Sumber Data	Pemilik PI	Sifat Target	Keterangan
	I10	Adanya layanan penyelesaian pengaduan konsumen	1:Ada layanan tidak lanjut pengaduan konsumen	Mengukur kemampuan pelaku usaha dalam peningkatan layanan kepada pelanggan	1: Ada layanan tidak lanjut pengaduan konsumen, 0: Tidak ada		Bulanan	3 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	0 - 1	-
	I11	Adanya pengolahan limbah produksi	1:Ada pengolahan limbah produksi	Mengetahui kemampuan pelaku usaha dalam mengolah limbah produksi	1 : Ada pengolahan limbah produksi, 0 : Belum ada pengolahan limbah produksi		Bulanan	3 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	0 - 1	sebatas adanya aktivitas pengolahan limbah, tidak harus bersertifikat.
Produktivitas	I12	Produktivitas produksi	70%	Mengukur produktivitas usaha	[Jumlah kapasitas produksi terpakai / Jumlah kapasitas produksi sebenarnya] x 100%	%	Bulanan	3 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	higher is better	-
	I13	Adanya peningkatan produksi	30%	Mengukur besarnya pertumbuhan produksi	[[Produksi periode ini(t) - Produksi periode lalu (t-1)] / Produksi periode lalu(t-1)] x 100%	%	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	Higher is better	-
	I14	Zero Non-Performing Loan	1 : Tidak ada <i>non-performing</i>	Mengetahui <i>track record</i> kerjasama pelaku usaha dengan lembaga keuangan	1 : Tidak ada <i>non-performing</i> Loan, 0 : Adanya <i>non-performing loan</i>		6 Bulan	1 Tahun	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	Higher is better	zero non-performing loan adalah hutang yang tidak dibayar
Produk	I15	Kelengkapan sertifikasi produk	5	Mengukur banyaknya jumlah sertifikasi produk yang sudah dimiliki	[Jumlah sertifikasi produk yang dimiliki]	satuan	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	Higher is better	-

Kriteria	Kode	Indikator	Target	Tujuan	Formula	Satuan	Frekuensi Pengukuran	Frekuensi Review	Pihak yang Mengukur	Sumber Data	Pemilik PI	Sifat Target	Keterangan
	I16	Adanya inovasi desain produk dan kemasan	1	Mengukur kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan kemasan dan bentuk produk yang akan memberikan nilai tambah lebih	[Jumlah nilai kinerja adanya inovasi kemasan dan bentuk produk]. Kemasan- > 1: Ada inovasi kemasan, 0: Tidak ada inovasi kemasan. Bentuk produk-> 1: Ada inovasi bentuk produk, 0: Tidak ada inovasi bentuk produk.	-	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	inovasi desain produk dan kemasan sudah lebih modern dan dipatenkan (telah memiliki ijin)
	I18	Pertumbuhan omzet	20%	Mengukur besarnya peningkatan pendapatan	[Jumlah pendapatan bulan ini(t) - Jumlah pendapatan bulan lalu(t-1)] / Jumlah pendapatan bulan lalu(t-1)] x 100%	%	Bulanan	3 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
Pasar	I19	Peningkatan jumlah konsumen	50%	Mengukur kemampuan pelaku usaha untuk menumbuhkan jumlah konsumen/pelanggan	[Jumlah konsumen bulan ini - Jumlah konsumen bulan lalu] / Jumlah konsumen bulan lalu] x 100%	%	Bulanan	3 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
	I20	Lingkup pemasaran regional dan internasional	2	Mengetahui sebaran geografis penjualan	3: Internasional, 2: Regional, 1: Lokal	-	Bulanan	3 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
	I21	Ada/tidak penjualan <i>Business to Business</i>	1	Mengukur peningkatan target pasar	1 : Ada penjualan <i>Business to Business</i> , 0 : Tidak ada penjualan <i>Business to Business</i>	-	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>0 - 1</i>	mengetahui apakah pelaku usaha melayani penjualan dalam jumlah besar (berperan sebagai supplier usaha lain)

Kriteria	Kode	Indikator	Target	Tujuan	Formula	Satuan	Frekuensi Pengukuran	Frekuensi Review	Pihak yang Mengukur	Sumber Data	Pemilik PI	Sifat Target	Keterangan
Mitra Usaha	I22	Tergabung dalam komunitas usaha nasional dan internasional	1	Mengetahui kemampuan pelaku usaha menjalin hubungan dengan komunitas sejenis	3 : Tergabung dalam komunitas internasional, 2 : Tergabung dalam komunitas nasional, 1 : Tergabung dalam komunitas regional	-	3 Bulan	6 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
Administrasi	I23	Kelengkapan pencatatan keuangan	2	Mengukur berapa jauh kelengkapan pencatatan keuangan	3: Ada laporan laba-rugi, 2: Ada laporan omzet, 1: Ada laporan transaksi keluar masuk, 0: Belum ada pencatatan keuangan	-	Bulanan	3 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
	I24	Jumlah ijin usaha yang dimiliki	5	Mengukur banyaknya jumlah ijin usaha yang sudah dimiliki	[Jumlah ijin usahan yang dimiliki]	Satuan	Bulanan	3 Bulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-
	I25	Status badan hukum usaha	2	Mengetahui posisi bentuk usaha	3:PT , 2: UD atau CV, 1: Koperasi	-	Bulanan	3 Bulan	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaku usaha	Pelaku usaha	<i>Higher is better</i>	-

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Lampiran 3. *Form* Petunjuk Teknis

FORM A – BAPEMAS

A1 – Pendaftaran Usaha Binaan BAPEMAS

Nama Usaha : _____

Alamat : _____

Contact Person : _____

**Ket : Nama – Nomor HP*

Menjadi binaan BAPEMAS sejak : _____

FORM A – BAPEMAS

A2 – Penilaian Usaha Binaan BAPEMAS

Nama Usaha :

Waktu Penilaian :

Nama Pendamping :

Isilah pada kolom *Pencapaian Pelaku Usaha!*

No	INDIKATOR	PENCAPAIAN PELAKU USAHA
1	Jumlah pelatihan yang pernah diikuti	
2	Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan hasil usaha ekonomi makro yang pernah diikuti	
3	Ada / tidak kegiatan produksi dilakukan secara rutin setiap bulan	
4	Ada / tidak pembagian pekerjaan antar tenaga kerja	
5	Adanya penggunaan teknologi sederhana dalam proses produksi (manual/semi otomatis/otomatis)	
6	Ada / tidak kemasan produk	
7	Tercapai/tidak <i>Break Even Point</i>	
8	Ada / tidak pendapatan yang kontinyu	
9	Pernah/belum pernah mendapatkan sumber pendanaan dari lembaga pendanaan	
10	Jumlah sumber pendanaan diluar modal sendiri	
11	Tergabung dalam komunitas / tidak tergabung dalam komunitas	

FORM B – DISPORA

B1 – Pendaftaran Usaha Binaan DISPORA

Nama Usaha : _____

Alamat : _____

Contact Person : _____

**Ket : Nama – Nomor HP*

Menjadi binaan DISORA sejak : _____

FORM B – DISPORA

B2 – Penilaian Usaha Binaan DISPORA

Nama Usaha :

Waktu Penilaian :

Nama Pendamping :

Isilah pada kolom *Pencapaian Pelaku Usaha!*

NO	INDIKATOR	PENCAPAIAN PELAKU USAHA
1	Jumlah tenaga kerja	
2	Jumlah pelatihan yang pernah diikuti	
3	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	
4	Ada / tidak kegiatan produksi secara kontinyu selama 3 bulan	
5	Ada/tidak produk baru	
6	Ada / tidak kemasan produk	
7	Produk memiliki nama dagang	
8	Ada / tidak pendapatan yang kontinyu	
9	Ada / tidak website/fanpage sebagai media informasi produk	
10	Jumlah pameran yang pernah diikuti	
11	Sebaran geografis pemasaran produk	
12	Pernah/belum pernah mendapatkan sumber pendanaan dari lembaga pendanaan	
13	Besarnya modal kerja 3 Bulan pertama	
14	Besarnya modal kerja 3 Bulan kedua	

NO	INDIKATOR	PENCAPAIAN PELAKU USAHA
15	Jumlah sumber pendanaan diluar modal sendiri	

FORM C – DISPERTAN

C1 – Pendaftaran Usaha Binaan DISPERTAN

Nama Usaha : _____

Alamat : _____

Contact Person : _____

**Ket : Nama – Nomor HP*

Menjadi binaan DISPERTAN sejak : _____

FORM C – DISPERTAN

C2 – Penilaian Usaha Binaan DISPERTAN

Nama Usaha :

Waktu Penilaian :

Nama Pendamping :

Isilah pada kolom *Pencapaian Pelaku Usaha!*

NO	INDIKATOR	PENCAPAIN PELAKU USAHA
1	Jumlah pelatihan yang diikuti	
2	Ada/tidak supplier tetap	
3	Jumlah bibit unggul yang digunakan	
4	Jumlah total bibit yang digunakan	
5	Ada / tidak penerapan metode baru dalam proses budidaya	
6	Ada/tidak keberlanjutan setelah panen	
7	Total Produksi 3 Bulan pertama	
8	Total Produksi 3 Bulan kedua	
9	Jumlah sertifikat produk yang dimiliki	
10	Luas ruang lingkup area penjualan hasil panen (Keterangan :Provinsi / Kota / Kecamatan)	
11	Ada / tidak sumber pendanaan dari lembaga keuangan	
12	Tergabung / tidak tergabung dalam kelompok tani	

FORM D – DINKOP&UMKM

D1 – Pendaftaran Usaha Binaan DINKOP&UMKM

Nama Usaha : _____

Alamat : _____

Contact Person : _____

**Ket : Nama – Nomor HP*

Menjadi binaan DINKOP&UMKM

sejak : _____

FORM D – DINKOP&UMKM

D2 – Penilaian Usaha Binaan DINKOP&UMKM

Nama Usaha :

Waktu Penilaian :

Nama Pendamping :

Isilah pada kolom *Pencapaian Pelaku Usaha!*

NO	INDIKATOR	PENCAPAIAN PELAKU USAHA
1	Ada/tidak <i>supplier</i> tetap	
2	Jumlah tenaga kerja	
3	Jumlah karyawan triwulan 1	
4	Jumlah karyawan triwulan 2	
5	Jumlah pelatihan yang pernah diikuti	
6	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	
7	Jumlah sumber pendanaan diluar modal sendiri	
8	Jumlah besarnya modal yang hutang	
9	Jumlah modal dari dana pribadi	
10	Apakah Jumlah hari kerja 20 hari/bulan? Ya/Tidak	
11	Kapasitas produksi triwulan pertama	
12	Kapasitas produksi triwulan kedua	
13	Besarnya pendapatan Bulan 1	
14	Besarnya pendapatan Bulan 2	
15	Ada/tidak kemasan yang paten	
16	Ada / tidak varian produk baru	

NO	INDIKATOR	PENCAPAIAN PELAKU USAHA
17	Ada / tidaknya merek dagang	
18	Ada / tidaknya target pasar dan strategi pemasaran yang jelas	
19	Ruang lingkup wilayah pemasaran Keterangan = Provinsi / Kota / Kecamatan	
20	Jumlah pameran yang pernah diikuti	
21	Lingkup pameran yang pernah diikuti Keterangan = Provinsi / Kota / Kecamatan	
22	Ada/tidak pertumbuhan konsumen	
23	Ada / tidaknya status badan hukum usaha	
24	Pencatatan keuangan sederhana Keterangan = Ada program khusus / Ms. Excel / Manual / Belum ada	
25	Jumlah ijin usaha yang dimiliki	

FORM E – DISPERDAGIN

E1 – Pendaftaran Usaha Binaan DISPERDAGIN

Nama Usaha : _____

Alamat : _____

Contact Person : _____

**Ket : Nama – Nomor HP*

Menjadi binaan DISPERDAGIN

sejak : _____

FORM E – DISPERDAGIN

E2 – Penilaian Usaha Binaan DISPERDAGIN

Nama Usaha :

Waktu Penilaian :

Nama Pendamping :

Isilah pada kolom *Pencapaian Pelaku Usaha!*

NO	INDIKATOR	PENCAPAIAN PELAKU USAHA
1	Jumlah <i>item</i> material yang harus di supply	
2	Jumlah <i>item</i> material yang memiliki supplier tetap	
3	Jumlah tenaga kerja dengan pendidikan terakhir SMA/SMK	
4	Jumlah pelatihan yang pernah diikuti	
5	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	
6	Besarnya Modal 3 Bulan pertama	
7	Besarnya Modal 3 Bulan kedua	
8	Ada / tidak sumber pendanaan yang tetap	
9	Ada/Tidak peningkatan aset (alat produksi)	
10	Jumlah alat teknologi semi otomatis/otomatis dan ramah lingkungan	
11	Ada / tidak jasa pengiriman	
12	Ada / tidak layanan penyelesaian pengaduan konsumen	

NO	INDIKATOR	PENCAPAIAN PELAKU USAHA
13	Ada / tidak pengolahan limbah produksi	
14	Kapasitas produksi terpakai	
15	Kapasitas Produksi sebenarnya	
16	Jumlah Produksi 3 bulan pertama	
17	Jumlah Produksi 3 bulan kedua	
18	Ada / Tidak <i>Zero Non-Performing Loan</i>	
19	Jumlah sertifikasi produk	
20	Ada / tidak inovasi desain produk dan kemasan	
21	Jumlah Pendapatan Bulan ini	
22	Jumlah Pendapatan Bulan sebelumnya	
23	Jumlah konsumen 3 bulan pertama	
24	Jumlah konsumen 3 bulan kedua	
25	Lingkup pemasaran regional dan internasional Keterangan = Internasional / Regional / Lokal	
26	Ada//Tidak penjualan <i>Business to Business</i>	
27	Tergabung/Tidak dalam komunitas usaha nasional dan internasional	
28	Kelengkapan pencatatan keuangan Keterangan : Ada laporan laba-rugi / Ada laporan omzet / Ada laporan transaksi keluar masuk/ Belum ada pencatatan keuangan	
29	Jumlah izin usaha yang dimiliki	
30	Status badan hukum usaha Keterangan = PT / UD / CV / Koperasi	

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Lampiran 4. Uji Coba *Spreadsheet Modelling*

DISPORA

Update data binaan dari pelaku usaha kategori pemuda.

Pemerintah Kota Surabaya
Jawa Timur

Update Binaan DISPORA

Nama Usaha :

Alamat :

Contact Person : *Nama - No Hp

Dibina Sejak : *Tahun

Update Binaan BAPEMAS > BINAAN BAPEMAS > INPUT BAPEMAS > LOGIN DISPORA > Data Login Dispora > Menu Login DISPORA

Input penilaian untuk data binaan Raja Konveksi

KRITERIA	BOBOT	KODE	INDIKATOR	BOBOT	BOBOT GLOBAL	TARGET	SCORING SYSTEM	Raja Konveksi		
								Pencapaian	score	weighted score
Sumber Daya Manusia	0.413	P1	Jumlah tenaga kerja	0.084	0.034692	2	Higher is better	1	0.50	0.017346
		P2	Jumlah pelatihan yang pernah diikuti	0.472	0.194936	2	Higher is better	2	1.00	0.194936
		P3	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	0.444	0.183372	2	Higher is better	1	0.50	0.091686
Produktivitas	0.398	P4	Adanya kegiatan produksi secara kontinyu selama 3 bulan	1	0.398	1	0 - 1	ada	1.00	0.398
Produk	0.078	P5	Ada/tidaknya produk baru	0.073	0.005694	1	0 - 1	tidak ada	0.00	0
		P6	Adanya kemasan produk	0.44427	0.03465306	1	0 - 1	ada	1.00	
		P7	Produk memiliki nama dagang	0.5	0.039	1	0 - 1	ada	1.00	0.039
Pasar	0.057	P8	Adanya pendapatan yang kontinyu	0.066	0.003762	1	0 - 1	ada	1.00	0.003762
		P9	Adanya website/fanpage sebagai media informasi produk	0.328	0.018696	1	0 - 1	ada	1.00	0.018696
		P10	Jumlah pameran yang pernah diikuti	0.279	0.015903	1	Higher is better	1	1.00	0.015903
		P11	Sebaran geografis pemasaran produk	0.328	0.018696	1	Higher is better	1	1.00	0.018696
			Keterangan= 3: Provinsi, 2: Kota, 1:							
Mitra Usaha	0.055	P12	Pernah/belum pernah mendapatkan sumber pendanaan dari lembaga pendanaan	0.125	0.006875	1	0 - 1	ada	1.00	0.006875
		P13	Pertumbuhan modal kerja	0.15	0.00825	2%	Higher is better	25.00%	1.00	0.00825
			modal quarter 1					2000000		
			modal quarter 2					2500000		
		P14	Jumlah sumber pendanaan diluar modal sendiri	0.725	0.039875	1	Higher is better	1	1.00	0.039875


Submit

Hasil input penilaian ditampilkan pada Sheet Binaan DISPORA

No	Nama Usaha	Kode Usaha	Alamat	Contact Person	Dibina sejak	Status	Score Akhir
1	Raja Konveksi	DISPORA1	Jl. Pucang Raya	Fikar - 0851239870	2016	Lanjut	0.85

DISPERTAN

Update data binaan dari pelaku usaha kategori pertanian.



Pemerintah Kota Surabaya
Jawa Timur

Update Binaan DISPERTAN

Nama Usaha :	<input type="text" value="TANI MAKMUR"/>	
Alamat :	<input type="text" value="Gunung Sari Barat"/>	
Contact Person :	<input type="text" value="Pak Dodo - 08129882462"/>	<i>*Nama - No Hp</i>
Dibina Sejak :	<input type="text" value="2016"/>	<i>*Tahun</i>

[BINAAN DISPORA](#) / [INPUT DISPORA](#) / [LOGIN DISPERTAN](#) / [Data Login Dispertan](#) / [Menu Login DISPERTAN](#) / [Update Binaan DISPERTAN](#)

Input penilaian untuk data binaan “TANI MAKMUR”

								TANI MAKMUR		
KRITERIA	BOBOT	KODE	INDIKATOR	BOBOT	BOBOT GLOBAL	TARGET	SCORING SYSTEM	Pencapaian	score	weighted score
Sumber Daya Manusia	0.339	T1	jumlah pelatihan yang diikuti	1	0.339	2	Higher is better	1	0.50	0.1695
Material	0.046	T2	ada/tidak supplier tetap	0.111	0.005106	1	0 - 1	Tidak ada	0.00	0
		T3	Proporsi penggunaan bibit unggul dibanding bibit biasa	0.889	0.040894	50%	Higher is better	20.00%	0.40	0.0163576
			Bibit unggul					10		
			Total bibit yang digunakan					50		
		Produktivitas	0.125	T4	Ada/tidaknya penerapan metode baru dalam proses budidaya	0.8	0.1	1	0 - 1	Tidak ada
T5	Adanya/tidak keberlanjutan setelah panen			0.1	0.0125	1	0 - 1	Tidak ada	0.00	0
T6	Adanya peningkatan produksi			1	0.125	2.50%	Higher is better	10.00%	1.00	0.125
	Produksi quarter 1 (2015)							50		
	Produksi quarter 2 (2015)							55		
Produk	0.031	T7	Jumlah sertifikat produk yang dimiliki	1	0.031	1	Higher is better	0	0.00	0
Pasar	0.373	T8	Luas ruang lingkup area penjualan hasil panen	1	0.373	1	Higher is better	1	1.00	0.373
			Keterangan= 3: Provinsi, 2: Kota, 1: Kecamatan							
Mitra usaha	0.087	T9	Ada/Tidak sumber pendanaan dari lembaga keuangan	0.875	0.076125	1	Higher is better	tidak ada	0.00	0
		T10	Tergabung/tidak dalam kelompok tani	0.125	0.010875	1	0 - 1	tidak	0.00	0

Submit

Hasil input penilaian ditampilkan pada Sheet Binaan DISPERTAN

No	Nama Usaha	Kode Usaha	Alamat	Contact Person	Dibina sejak	Status	Score Akhir
1	TANI MAKMUR	DISPERTAN1	Gunung Sari Barat	Pak Dodo - 0812988246	2016	Lanjut	0.6839

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian tugas akhir ini.

6.1 Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan dari penelitian tugas akhir :

1. Pengukuran Kinerja pelaku usaha pada pembinaan berkelanjutan telah dirancang dengan menggunakan *framework Intergrated Performance Measurement System (IPMS)*, dengan sasaran yang akan diukur dengan pengukuran kinerja ini adalah pelaku usaha kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS), Pelaku usaha kategori pemuda, dan pelaku usaha dari sektor pertanian. Penyusunan indikator kinerja sasaran tersebut diturunkan dari pihak yang mengintervensi, yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS), Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA), Dinas Pertanian (DISPERTAN), Dinas Koperasi & UMKM (DINKOP&UMKM), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERDAGIN). Dalam penyusunan indikator kinerja pelaku usaha, indikator diturunkan dari *stakeholder requirement* dari *key stakeholder*. *Stakeholder requirement* kemudian diterjemahkan menjadi *objective* hingga selanjutnya menjadi Indikator kinerja. Penyusunan indikator kinerja juga memperhatikan integrasi antar level sehingga mampu mencapai tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu menciptakan pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing.
2. *Spreadsheet modeling* dirancang untuk membantu pihak – pihak yang terlibat dalam melakukan penilaian dan *update* data. *Spreadsheet modeling* dapat diakses oleh *User* dan pelaku usaha. Namun, pelaku usaha hanya dapat mengakses hingga menu *overview* saja. Adanya *Spreadsheet modeling* ini diharapkan dapat membantu mengintegrasikan penilaian pelaku usaha antar level. Sehingga, didapatkan informasi terkait kinerja pelaku usaha setelah mendapatkan pembinaan dari masing – masing instansi, yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

6.2 Saran

Saran yang diberikan dalam penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Untuk keberhasilan implementasi sistem pengukuran kinerja pelaku usaha dalam pembinaan berkelanjutan, diperlukan pemahaman yang baik tentang peran dan fungsi instansi dalam pembinaan berkelanjutan, serta indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja pelaku usaha. Sehingga, instansi yang terlibat harus memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami dan mengerti maksud, tujuan, serta aktivitas yang harus dilakukan dalam implementasi sistem pengukuran kinerja ini.
2. Instansi yang terlibat harus memastikan bahwa data yang diinputkan dalam pengukuran adalah data yang valid dan sesuai dengan kondisi nyata.
3. Perlu adanya pengarahan dan pelatihan terkait penggunaan spreadsheet modeling untuk menghindari adanya kesalahan dalam melakukan pengukuran.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPS), B. P. (2015). *Sensus Penduduk 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- ASEAN. (2008). *ASEAN Economic Community Blueprint*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN. (2012). *ASEAN Economic Community Blueprint*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Laporan Hasil Sensus Pertanian*. Jakarta: BPS.
- Bierbusse, P. and Siesfeld, T. (1997). Measures that matter, *Journal of Strategic Performance Measurement* Vol 1. No. 2. 6 - 11.
- Biro Peraturan Perundang- undangan Bidang Perekonomian dan Industri. (2010). *Undang - Undang RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Bititci, U. S., Carrie, A. S., & Liam McDevitt. (1997). Integrated performance measurement systems: a development guide. *International Journal of Operations & Production Management*, Vol. 17 Iss 5 pp. 522 - 534.
- Hidayat, F. A. (2015). *Performance Measurement System Development For Micro Enterprises Under the Coaching Program of Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Indonesia, K. S. (2013, Oktober 13). *Panduan Pendataan PMKS dan PSKS*. Retrieved Maret 5, 2016, from http://www.kemsos.go.id/unduh/pdf/PanduanPendataanPMKS_PSKS.pdf
- Kementrian Pemuda dan Olahraga. (2009). *Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009*. Jakarta: Kementrian Pemuda dan Olahraga.

- Kementrian Pertanian. (2013). *Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013*. Jakarta: Kementrian Pertanian RI.
- Mahendrawathi ER, A. H. (2014). Readiness of Indonesian Companies for ASEAN Economic Community. *Proceedings of the 2014 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 2133 - 2142.
- Neely, A., Gregory, M., & Platts, K. (1995). Performance measurement system design: A literature review and research agenda. *International Journal of Operations & Production Management*, Vol. 15 Iss 4 pp. 80 - 116.
- Parmenter, D. (2010). *Developing, Implementing, and Using Winning KPI*. Canada: John Wiley & Sons, Inc.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2008). *Peraturan Daerah No 8*. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press. 855 hal.
- Saaty, T. L. (2008). Decision Making with the Analytic Hierarchy Process . *International Journal Services Sciences*, Vol. 1, No. 1.
- Surabaya, P. K. (2008). *Peraturan Walikota SURabaya No 91 Tahun 2008*. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.
- UKM, B. P. (2015, Juli). Renstra Kementrian Koperasi dan UKM.
- UMKM, K. K. (n.d.). Undang – Undang Nomor 20 tahun 2008. *Undang – Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
- Veithzal, R. (2005). *manajemen SUMber Daya Manusia*. Jakarta: raja Grafindo Persada.

BIODATA PENULIS



Penulis dilahirkan di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur pada 7 Agustus 1994 dengan nama lengkap Delina Risa Kinasih. Pada kesehariannya, penulis biasa disapa dengan nama Delina. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sudiono dengan Ibu Rumani. Penulis menempuh pendidikan SD di SD Negeri Mojogede, dan dilanjutkan dengan jenjang menengah di SMP Negeri 1 Balongpanggang dan SMA Negeri 1 Gresik. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA nya, penulis melanjutkan studi di Jurusan Teknik Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember di tahun 2012. Selama perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan - kegiatan baik yang diselenggarakan oleh ITS ataupun pihak diluar ITS. Penulis juga mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa di tingkat fakultas, sebagai staff Departemen Keilmiah dan Teknologi, BEM FTI 2014/2015. Penulis juga aktif sebagai Pemandu FTI angkatan 2012 (Pemandu ATLAS). Selain aktif organisasi, penulis juga aktif dalam bidang akademik dan penelitian dengan menjadi asisten Laboratorium Pengembangan Sistem dan Manajemen Industri. Penulis merupakan salah satu penerima Djarum Beasiswa Plus pada tahun ketiga perkuliahan, dan merupakan penerima beasiswa Karya Salemba Empat pada tahun keempat perkuliahan. Penulis memiliki ketertarikan pada bidang ilmu manajemen kinerja, manajemen sumber daya manusia, perencanaan, analisis kelayakan, dan analisis keuangan. Penulis dapat dihubungi melalui email delina_risa@yahoo.com.